

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN	2024
PROGRAM	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</li> <li>- Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh</li> <li>- Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR</li> </ul>
KEGIATAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
SUB KEGIATAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
KODE KEGIATAN	1.04.03.2.03
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <p>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha meliputi pembangunan dan penyediaan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh seluruh penghuni rumah dan lingkungan baik laki-laki maupun perempuan antara lain pembangunan hunian, penataan jalur pejalan kaki, penataan jalan lingkungan, dan perbaikan ruang terbuka publik melalui penataan tata letak atau ukuran plot.</p> <p>Di Kabupaten Solok pada tahun 2024 terdapat Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 5.302 unit rumah yang perlu diperbaiki. Sedangkan penerima bantuan setiap tahunnya hanya 5 unit rumah. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan berdasarkan kerusakan yang terjadi dan kebutuhan akan pembangunan Rumah tersebut. Perbaikan Rumah dilakukan guna mendapatkan hunian yang aman, nyaman dan sehat bagi masyarakat.</p> <p>Dari data diatas belum adanya Pembangunan Rumah Layak Huni yang memadai, aman dan responsif gender bagi semua kalangan masyarakat.</p> <p>2. Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Akses : Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan berdasarkan kerusakan yang terjadi dan kebutuhan akan</p>

pembangunan Rumah tersebut. Perbaikan Rumah dilakukan guna mendapatkan hunian yang aman, nyaman dan sehat bagi masyarakat.

b. Partisipasi :

- Dalam pembangunan perbaikan Rumah Layak Huni partisipasi laki laki lebih dominan ( 99%) dibandingkan perempuan (1%) karena pekerjaan merupakan pekerjaan konstruksi bangunan.
- Usulan Rumah Tidak Layak Huni dapat diajukan oleh semua masyarakat baik laki - laki maupun perempuan.

c. Kontrol : Kontrol pelaksanaan pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan oleh tim perencana, pelaksana, dan pengawas yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan

d. Manfaat :

- Belum terbangunnya dengan baik Rumah Layak Huni secara optimal karena belum tuntasnya pembangunan infrastruktur berkaitan dengan Rumah Layak Huni
- Penerima manfaat di sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah laki-laki dan perempuan yang merupakan masyarakat yang berstatus MBR

3. Sebab Internal

- a. Belum adanya Pembangunan Rumah Layak Huni yang memadai, aman dan responsif gender bagi semua kalangan masyarakat
- b. Belum dilaksanakannya Sosialisasi permen pu yang responsif gender
- c. Proses Perencanaan yang belum memahami konsep gender secara maksimal
- d. Belum Optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dan lintas sector
- e. Masih adanya SDM di OPD terkait yang belum memahami konsep gender
- f. Masih kurangnya personil di OPD dalam penyelesaian target Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

4. Sebab Eksternal


Masih rendahnya peran tokoh masyarakat dalam pembangunan Rumah Layak Huni, sehingga rendahnya swadaya masyarakat dalam hal perbaikan rumah tidak layak huni. Hal ini juga diperparah dengan letak

	geografis daerah Kab. Solok yang berada pada daerah rawan akan bencana. Sehingga akses daerah yang sulit dijangkau.		
PERENCANAAN KEGIATAN	Rencana Aksi	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
		Tujuan	Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.
		Aktifitas	1. Pendataan penerima pembangunan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			2. Pelaksanaan rencana perbaikan Rumah Layak Huni sesuai dengan hasil pendataan kebutuhan dan ketersediaan anggaran
			3. Sosialisasi permen pu yang responsif gender
			4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor serta memonitoring dan evaluasi pembangunan rumah
			5. Pengadaan media informasi pembangunan infrastruktur yang responsif gender
		Sumber daya	Dana : 130.000.000,-  SDM : Narasumber /fasilitator L : 1 P : 1  Peserta L : 25 P : 25
		Indikator Output	Jumlah Peserta sosialisasi yang memahami permen PU laki laki = 25 Perempuan = 25  Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni = 5 Unit  Koordinasi yang terlaksana = 3 kali



			Jumlah media informasi yang disebarkan : Leaflet = 20 exemplar Pamflet = 20 exemplar Baliho = 1 buah
DAMPAK / MANFAAT (OUTCOME)	Membangun Rumah dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan, bagi masyarakat baik laki - laki maupun perempuan.		

Arosuka, 1 Juli 2024  
KEPALA DINAS

  
**RETNY HUMAIRA, ST**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19770306 200003 2 002




GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBIJAKAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA REDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESERUJANGAN	SEBAB INTERNAL	SEBAB EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASE-LINE DATA	INDIKATOR KINERJA
Program: Kawasan Permukiman  Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha  Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	- No. SE-46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Akses :  Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan berdasarkan kerusakan yang terjadi dan kebutuhan akan pembangunan rumah tersebut. Perbaikan Rumah dilakukan guna mendapatkan hunian yang aman, nyaman dan sehat bagi masyarakat	1. Belum adanya Pembangunan Rumah Layak Huni yang memadai, aman dan responsif gender bagi semua kalangan masyarakat	1. Masih rendahnya peran tokoh masyarakat dalam pembangunan Rumah Layak Huni	Meningkatkan pengadaan hunian layak bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang berstatus MBR dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Pendataan penerima pembangunan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	- Penerima Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 5 Unit Rumah	1. Pendataan penerima pembangunan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang sesuai dengan spesifikasi teknis
	- Surat Edaran Menteri PU Nomor : 13/SE/M/2013 tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender.	Partisipasi : Dalam pembangunan perbaikan Rumah Layak Huni partisipasi laki-laki lebih dominan ( 99%) dibanding perempuan (1%) karena pekerjaan merupakan pekerjaan konstruksi bangunan  Usulan Rumah Tidak Layak Huni dapat diajukan oleh semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan	2. Belum dilaksanakannya Sosialisasi permen pu yang responsif gender	2. Akses daerah yang sangat jauh sehingga sulit dijangkau oleh tim		2. Pelaksanaan rencana perbaikan Rumah Layak Huni sesuai dengan hasil pendataan kebutuhan dan ketersediaan anggaran	- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha meliputi pembangunan dan penyediaan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh seluruh penghuni rumah dan lingkungan baik laki-laki maupun perempuan	2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang layak bagi masyarakat yang berstatus MBR baik laki-laki maupun perempuan
	- Penerima Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 5 Unit Rumah	Kontrol : Kontrol pelaksanaan pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan oleh tim perencana, pelaksana, dan pengawas yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan	3. Proses Perencanaan yang belum memahami konsep gender secara maksimal				Input : Rp. 110.000.000, Output: Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki Outcome : 95 % Membangun Rumah dan permukiman yang inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan, bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan	

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBUAKAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB INTERNAL	SEBAB EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASE-LINE DATA	INDIKATOR KINERJA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha meliputi pembangunan dan penyediaan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh seluruh penghuni rumah dan lingkungan baik laki - laki maupun perempuan antara lain pembangunan hunian, penataan jalur pejalan kaki, penataan jalan lingkungan, dan perbaikan ruang terbuka publik melalui penataan tata letak atau ukuran plot</li> <li>- Besar anggaran Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</li> </ul>	Manfaat : Belum terbangunnya dengan baik Rumah Layak Huni secara optimal karena belum tuntasnya pembangunan infrastruktur berkaitan dengan Rumah Layak Huni - Penerima manfaat di sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah laki-laki dan perempuan yang merupakan masyarakat yang berstatus MBR	4. Belum Optimainya koordinasi dengan OPD terkait dan lintas sector  5. Masih adanya SDM di OPD terkait yang belum memahami konsep gender			3. Sosialisasi permen pu yang responsif gender		3. Sosialisasi teknis terhadap pembangunan rumah yang responsif gender bagi perencana, tim survei, tenaga pengawas, dan masyarakat  Input : 50.000.000,- Output : Terlaksananya sosialisasi responsif gender bagi perencana, tim survei, tenaga pengawas, dan masyarakat
			6. Masih kurangnya personil di OPD dalam penyelesaian target Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Outcome 80% pemahaman terhadap sosialisasi responsif gender bagi perencana, tim survei, tenaga pengawas, dan masyarakat

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
KEBUJAKAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBUJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB INTERNAL	SEBAB EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASE-LINE DATA	INDIKATOR KINERJA
Tujuan: - Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya - mengurangi luas dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh - memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR  Sasaran : Seluruh lapisan masyarakat (laki-laki, perempuan, lansia, anak-anak, dan kaum disabilitas)	- Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni terdiri dari 11 personil (1 Kepala Bidang, 6 staf PNS, dan 4 Tenaga Kontrak).					4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor serta memonitoring dan evaluasi pembangunan Rumah  5. Pengadaan media informasi pembangunan infrastruktur yang responsif gender		4. Meningkatkan pembangunan informasi yang mengenai pembangunan yang responsif gender  Input : 5.000.000,- Output : Jumlah media informasi yang diadakan Outcome : Pahamiya semua kalangan masyarakat mengenai responsif gender

Ardua, 1 Juli 2024  
KETALA DINAS

  
BETNY H. MAJURA, ST  
Pembina (T/PA)  
NIP. 19770306 200003 2 002



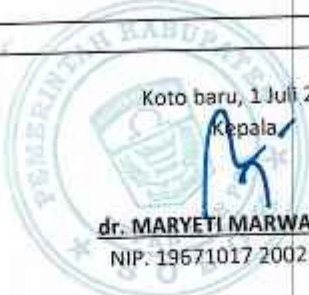
**DAFTAR NAMA SUB KEGIATAN PADA GAB DAN GBS TAHUN 2025**

No	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	DPPKBP3A	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1
2	BPBD	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1
3	DPMN	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	1
4	DISPERBUD	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar	2
5	SEKRETARIAT DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	1
6	KESBANGPOL	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1
7	DISDIKPORA	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1
8	DINKES	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1
9	DINAS PERHUBUNGAN	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1
10	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1
11	DISPERSIP	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1
12	DISDUKCAPIL	Pendaftaran Penduduk	1
13	SATPOLPP dan DAMKAR	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangi bahaya kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	1
14	DINAS BKD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1
15	BAPELITBANG	Kegiatan Musrenbang Kabupaten/Kota	1
16	KOPERINDAG	Koordinasi, Sikronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1
17	DLH	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1
18	DPMPTSP	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1
19	DPUPR	Peningkatan Pelaksanaan Rehabilitas Jalan Sarik Alahan Tigo- Sungai Abu	1
20	BKPSDM	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pemimpin Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1
21	DISKOMINFO	Relasi Media	1

22	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Review PPRG, Monev PPRG, Bimtek PPRG, Sharing Informasi PPRG	1
23	SEKRETARIAT DPRD	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1
24	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	1
25	DINAS SOSIAL	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1
26			1

Koto baru, 1 Juli 2024

Kepala,


  
dr. MARYETI MARWAZI, MARS  
NIP: 19671017 200212 2 001

# MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY ( GAP)

SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN			PENGUKURAN HASIL		
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor kesenjangan	Sebab kesenjangan Internal	Sebab kesenjangan Eksternal	Reformulasi	Rencana Aksi	Basis Data	Indikator Kinerja
Program Perlindungan Perempuan	1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No.5 Tahun 2015 tentang Penyediaan sarana Kerja Yang responsif Gender dan Peduli anak di tempat kerja.	Akses : * Kurangnya peningkatan kualitas Sumber daya pengurus dan anggota	* Program dan kegiatan pelaksanaan organisasi wanita dipegang oleh beberapa anggota dan pengurus saja	* Kurangnya minat dan semangat bagi wanita untuk berorganisasi	* Meningkatkan kualitas sumber daya pengurus dan anggota	* Kegiatan pertemuan bulanan organisasi wanita	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No.5 Tahun 2015 tentang sitem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Output : Terfasilitasinya organisasi wanita di Kabupaten Solok
Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No.2 Tahun 2017 tentang Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Partisipasi : * Masih kurangnya pemahaman dan minat terhadap program dan kegiatan berorganisasi pada kelompok wanita	* Masih kurangnya SDM yang Berkualitas dalam berorganisasi	* Kurangnya SDM dan sumber daya dari pengurus dan anggota organisasi wanita dalam pembangunan	* Menyesuaikan tatanan organisasi dengan kebijakan Pemerintah	* Melaksanakan Sosialisasi kepemimpinan untuk anggota organisasi	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No.2 Tahun 2017 tentang Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Infut : Rp.350.000.000
Sub.Kegiatan Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Data Organisasi Wanita di Kabupaten Solok	Kontrol : * Kurangnya SDM wanita dalam pengetahuan berorganisasi	* Kurang nya sarana dan Prasarana dalam rangka peningkatan dan pemahaman dalam berorganisasi	* Kurangnya waktu bagi wanita dalam berorganisasi	* Meningkatkan ketahanan keluarga melalui kegiatan dalam berbagai aspek kehidupan	* Melaksanakan seminar parenting untuk anggota organisasi	Data organisasi wanita Kabupaten Solok Tahun 2024	Out Come : Meningkatnya peran kelembagaan organisasi wanita dalam pemberdayaan perempuan
		Mamfaat : * Meningkatkan kualitas hidup anggota organisasi wanita di Kabupaten Solok			* Memajukan Status wanita dibidang Sosial,Ekonomi,Politik dan pendidikan	* Mengikuti kegiatan dan acara Pemerintahan		

Koto Baru, Juni 2024  
Kepala DPPKBP3A


  
dr. Maryeti Marwazi Mars  
NIP: 19671017200212001



**FORMAT GBS**  
**Pernyataan Anggaran Gender**  
**(Gender Budget Statemen )**

**SKPD** : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan  
**Tahun anggaran** : 2025  
**Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Solok**

<b>PROGRAM</b>	Perlindungan Perempuan	
<b>KEGIATAN</b>	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/kota	
<b>SUB.KEGIATAN</b>	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	
<b>Anggaran Sub.Kegiatan</b>	Rp.350.000.000,-	
<b>HASIL/OUTPUT</b>	Terfasilitasinya organisasi yang ada di Kabupaten Solok	
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p>I. Data Pembuka Wawasan</p> <p>1.Peraturan Mentri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No.5 Tahun 2015 tentang Penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja</p> <p>2.Peraturan Mentri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No.2 Tahun 2017 tentang Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>II. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>1. Kesenjangan Aksaes</p> <p>Kurangnya peningkatan kualitas Sumber daya pengurus dan anggota</p> <p>2. Kesenjangan Partisipasi</p> <p>Masih kurangnya pemahaman dan minat terhadap program dan kegiatan berorganisasi pada kelompok wanita</p> <p>3. Kesenjangan Kontrol</p> <p>Kurangnya SDM wanita dalam pengetahuan berorganisasi</p> <p>4. Kesenjangan Mamfaat</p> <p>Meningkatkan kualitas hidup anggota organisasi wanita di Kabupaten Solok</p> <p>A.. Penyebab Internal</p> <p>1. Program dan kegiatan pelaksanaan organisasi wanita dipegang oleh beberapa anggota dan pengurus saja</p> <p>2. Masih kurangnya SDM yang Berkualitas dalam berorganisasi</p> <p>3. Kurang nya sarana dan Prasarana dalam rangka peningkatan dan pemahaman dalam berorganisasi</p> <p>B. Penyebab Ekternal</p> <p>1. Kurangnya minat dan semangat bagi wanita untuk berorganisasi</p> <p>2. Kurangnya SDM dan sumber daya dari pengurus dan anggota organisasi wanita dalam pembangunan</p> <p>3. Kurangnya waktu bagi wanita dalam berorganisasi</p>	
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Komponen 1</b>	1. Pertemuan bulanan organisasi wanita
		Tujuan :
		* Meningkatkan kualitas sumber daya pengurus dan anggota

	Komponen 2	2. Melaksanakan Sosialisasi kepemimpinan untuk anggota organisasi
		Tujuan :
		* Menyesuaikan tatanan organisasi dengan kebijakan Pemerintah
	Komponen 3	3. Melaksanakan seminar parenting untuk anggota organisasi
		Tujuan :
		* Meningkatkan ketahanan keluarga melalui kegiatan dalam berbagai aspek kehidupan
	Komponen 4	4. Mengikuti kegiatan dan acara Pemerintahan
		* Memajukan Status wanita dibidang Sosial, Ekonomi, Politik dan pendidikan
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<b>Indikator Output :</b> Terfasilitasinya organisasi wanita di Kabupaten Solok  <b>Indikator Outcome</b>  Meningkatkan Peran serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	
	<div style="text-align: right;"> Kepala Dinas    <u>dr. Marveti Marwazi. Mars</u>  NIP: 19671017200212001 </div>	

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

**SKPD** : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok  
**ALAMAT** : Jln.Raya Koto Baru  
**TAHUN** : 2024  
**ANGGARAN**

<b>PROGRAM</b>	Program Penanggulangan Bencana
<b>KODE PROGRAM</b>	1.05.03
<b>KEGIATAN</b>	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
<b>SUB KEGIATAN</b>	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
<b>HASIL/OUTPUT</b>	Meningkatnya pengetahuan anggota TRC dan masyarakat khususnya kaum perempuan tentang kebencanaan

**ANALISIS  
SITUASI**

**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana
- Jumlah Penduduk Kabupaten Solok 408.424 orang
  - Laki-laki sebanyak 204.667 orang
  - Perempuan sebanyak 203.747
- Data korban bencana 1.688 orang
  - Laki-laki sebanyak 854 orang
    - o Anak-anak sebanyak 398 orang
    - o Dewasa sebanyak 456 orang
  - Perempuan sebanyak 834 orang
    - o Anak-anak sebanyak 379 orang
    - o Dewasa sebanyak 455 orang
- Jumlah penduduk di daerah rawan bencana 408.424
- Luas wilayah Kabupaten Solok 3.738 KM<sup>2</sup>
- Luas wilayah rawan bencana 3.738 KM<sup>2</sup>

**2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender**

**Akses :**

Masih kurangnya pengetahuan Tim Reaksi Cepat (TRC)

**Partisipasi :**

Masih kurangnya anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang perempuan

**Kontrol :**

Kurangnya dukungan keluarga

**Manfaat :**

Masyarakat akan sadar terhadap bahaya dan dampak dari bencana

**a. Penyebab Internal :**

1. Masih kurangnya sosialisasi tentang kebencanaan
2. Sumber Data Manusia (SDM) Tim Reaksi Cepat (TRC) perempuan yang belum memadai



	<b>b. Penyebab Eksternal :</b> 1. Kurangnya kepedulian serta kesadaran masyarakat tentang kebencanaan		
PERENCANAAN KEGIATAN	Rencana Aksi	Tujuan	Pengembangan kapasitas TRC
		Aktivitas	1. Peningkatan SDM ( kualitas dan kuantitas ) dalam wawasan kebencanaan terhadap Perempuan
		Sumber Daya ( Out Put )	Dana : Rp. 78.417.597
			Panitia : BPBD
			Peserta : TRC BPBD Perempuan dan masyarakat
			Saran Prasarana : ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer.
		Out Come	<b>Rumusan kinerja</b> Terdapat kekurangan personil dalam melakukan evakuasi korban bencana yang mayoritas dari kejadian tersebut adalah perempuan .  <b>Indikator Kinerja</b> Jumlah personil Tim Reaksi Cepat yang sebelumnya 10 orang diusahakan menjadi 15 orang
<div style="text-align: center;">   <b>Kepala Pelaksana</b>  <b>Drs. IRWAN EFENDI</b>  <b>NIP. 19690409 198902 1 001</b> </div>			

**GAP (Gender Analysis Pathway)**  
**SKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Tahun : 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Program :</b> Program Penanggulangan Bencana	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	<b>Isu Gender</b>			<b>Kebijakan dan Rencana Ke Depan</b>		<b>Pengukuran Hasil</b>	
		<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	<b>Reformulasi Tujuan</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Data Dasar (Base-line)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
		<b>Akses :</b> Masih kurangnya Pengetahuan Tim Reaksi Cepat (TRC) tentang Kebencanaan	1. Kurangnya sosialisasi kebencanaan 2. Sumber daya Manusia (SDM) Tim Reaksi Cepat (TRC) belum memadai	Mindset masyarakat tentang kebencanaan masih rendah	Meningkatkan pengetahuan Tim Reaksi Cepat tentang kebencanaan	Peningkatan Kapasitas SDM TRC	Jumlah anggota TRC 36 orang	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota  <b>Input :</b> Rp. 78.417.597  <b>Output :</b> Tersedianya SDM TRC <b>Outcome :</b> Meningkatnya Kualitas SDM TRC
		<b>Partisipasi :</b> Belum meratanya kesempatan Tim reaksi cepat (TRC) BPBD untuk mengikuti pelatihan						
		<b>Kontrol :</b> Kurangnya dukungan Keluarga  <b>Manfaat :</b> Pemerataan						
<b>Kegiatan :</b> Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Bencana  Jumlah penduduk: 408.424							
<b>Sub kegiatan :</b> Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Tim Reaksi cepat Sebanyak 36 Orang yang terdiri dari : Laki-laki 25 orang Perempuan 11 Orang							
<b>Tujuan :</b> Meningkatkan Pengetahuan masyarakat dan TRC khususnya kaum perempuan dalam mitigasi	Data Korban Bencana sebanyak 1.688 Orang Jumlah Penduduk di daerah rawan bencana 408.424 orang  Luas wilayah Kab.							

bencana	Solok 3.738 Km2 Luas Wilayah Rawan Bencana 3.738 Km2	ilmu kebencanaan untuk TRC khususnya kaum perempuan							
---------	--	---	--	--	--	--	--	--	--



Kepala Pelaksana

**Drs. IRWAN EFENDI**  
NIP. 19690409 198902 1 001



**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)**  
(Pernyataan Anggaran Gender)  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI**

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI  
TAHUN : 2025

<b>PROGRAM</b>	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
<b>KODE PROGRAM</b>	2 13 05 2.01 02 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
<b>KEGIATAN</b>	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
<b>SUB KEGIATAN</b>	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
<b>ANALISA SITUASI</b>	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender dan Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.</li> <li>b. No. SE-46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).</li> <li>c. Jumlah Posyandu yang ada di Kabupaten Solok adalah 516 Posyandu</li> <li>d. Jumlah Pengurus Kader Posyandu di Kabupaten Solok pada Tahun 2022 adalah 3071 Orang dan semua kader adalah perempuan</li> </ul> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Faktor Kesenjangan Minimnya informasi yang di dapat oleh lembaga Kemasyarakat yang ada di Nagari Khususnya Posyandu mengenai kesetaraan gender.</li> <li>b. Penyebab Internal <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mindset masyarakat bahwa kegiatan Posyandu adalah kegiatannya untuk perempuan saja.</li> <li>2. belum dilakukannya sosialisasi mengenai kesetaraan gender dalam suatu lembaga.</li> </ul> </li> <li>c. Penyebab eksternal Kurangnya sarana informasi dan pengetahuan mengenai kesetaraan gender dalam lembaga baik di nagari, kecamatan dan kabupaten. Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait (lintas sektor)</li> </ul>
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<p>1. Tolak Ukur Membentuk kompetensi kepengurusan yang bagus berdasarkan kesetaraan gender dalam lembaga di Kabupaten, Kecamatan maupun Nagari.</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja Terlaksananya Pembinaan terhadap Kader Posyandu yang ada di Kabupaten Solok terlaksananya Monitoring dan Evaluasi lembaga Kemasyarakatan khususnya Posyandu Nagari di Kabupaten Solok</p>
<b>JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN</b>	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp. 139.000.000,-
<b>RENCANA AKSI</b>	<p>1. Melaksanakan Sosialisasi berkala terhadap lembaga-lembaga yang ada di Nagari</p> <p>2. Mengadakan Bimtek atau peningkatan kapasitas bagi anggota atau kepengurusan lembaga-lembaga yang ada di Nagari</p> <p>2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kelembagaan Posyandu di Kabupaten Solok</p> <p>3. Melaksanakan sosialisasi kesetaraan gender terhadap kelembagaan Masyarakat khususnya Posyandu di Kabupaten Solok Rp. 139.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)</p>

Solok, 20 Juni 2024  
Kepala,  
**ROMHENDRAWAN, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19731106 199303 1 002



# DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

KESEMAIAN	DATA PEMBUKA WAKASAH	ISU RENDAH			REVISI DAN RENCANA KEDERAHAN		PENGUKURAN HASIL	
		ISU RENDAH			REVISI DAN RENCANA KEDERAHAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESEJAJARAN	SEBAB INTERNAL	SEBAB EKSTERNAL	REVISI DAN RENCANA KEDERAHAN	REVISI DAN RENCANA KEDERAHAN	REVISI DAN RENCANA KEDERAHAN	REVISI DAN RENCANA KEDERAHAN
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Hukum Adat	No. 32-UN/PP-PA/10/2002 Tentang Strategi Nasional Penguatan PUS melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRC)	Alasan : Minimnya informasi yang di dapat oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari khususnya Pasyandu mengenai kesetaraan gender.	1. Rendahnya masyarakat bahwa kegiatan Pasyandu adalah kegiatan untuk perempuan saja	1. Kurangnya sarana informasi dan pengetahuan mengenai kesetaraan gender dalam lembaga baik di nagari, kecamatan dan kabupaten.	Memenuhi kompetensi kepengurusan yang Nagas berdasarkan kesetaraan gender dalam lembaga di Kabupaten, Kecamatan maupun Nagari.	1. Melaksanakan Sosialisasi berbasis terhadap lembaga-lembaga yang ada di Nagari.	Jumlah Pengurus Kader Pasyandu di Kabupaten Solok pada Tahun 2023 adalah 3071 Orang dan semua kader adalah perempuan.	1. Melaksanakan Sosialisasi mengenai pentingnya kesetaraan gender pada lembaga kemasyarakatan di nagari khususnya Pasyandu.
		Partisipasi : Kader Pasyandu yang ada di Kabupaten Solok semuanya perempuan	2. Belum sempurnanya informasi mengenai responsif gender kepada masyarakat	2. Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait lintas sektor		2. Menghasilkan Surat atau pengumuman kepada bagi anggota atau kepengurusan lembaga-lembaga yang ada di Nagari	Jumlah Pasyandu yang ada di Kabupaten Solok adalah 414 Pasyandu	Input : Rp. 139.000.000 - Output : Terlaksananya Pembinaan terhadap Kader Pasyandu yang ada di Kabupaten Solok Outcome : 1. Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan keterampilan pengurus Loka-Loka pada Lembaga Kemasyarakatan Khususnya Pasyandu Kabupaten Solok.
		Kontrol : Belum adanya informasi ke masyarakat mengenai kegiatan pasyandu bukan khusus untuk perempuan saja	3. Belum dilaksanakannya sosialisasi mengenai kesetaraan gender dalam suatu lembaga	3. Rendahnya masyarakat tentang kegiatan pasyandu yang masih pada lama		3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang ada di Nagari		2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kelembagaan Pasyandu di Kabupaten Solok. Input : 139.000.000 - Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pasyandu di Kabupaten Solok. Outcome : Bertercapainya sebagai permasalahan yang ada di lembaga kemasyarakatan khususnya Pasyandu sehingga dapat dicari pemecahan masalahnya.
		Manfaat : Belum terlaksanakannya peran laki-laki dalam kegiatan pasyandu	4. Proses Perencanaan yang belum memahami konsep gender secara maksimal 5. Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dan lintas sektor					
Tujuan Peningkatan Penguatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Pasyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								



**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS )**  
**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024**

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER ( GENDER BUDGET STATEMENT)</b>	
<b>SKPD</b>	<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>2024</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif</b>
<b>KODE PROGRAM</b>	<b>3.26.05</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</b>
<b>SUB- KEGIATAN</b>	<b>Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.</b>
<b>ANGGARAN SUB - KEGIATAN</b>	Rp. 155.374.900
<b>HASIL/OUTPUT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya bimbingan teknis bagi pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf)</li> <li>- Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan dengan pelaku Parekraf</li> </ul>
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p>a. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) :</p> <p>Data Yang Dibutuhkan :</p> <p>b. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024</p> <p>c. Data jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas Pelaku Parekraf yaitu sejumlah 40 Orang, diantaranya laki-laki 80% namun perempuan hanya 20%</p> <p>d. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p><b>Kesenjangan Akses :</b></p> <p>e. Akses jalan menuju objek wisata rawan bagi perempuan</p> <p><b>Kesenjangan Partisipasi, yaitu :</b></p> <p>f. kelkutsertaan kaum perempuan dalam kepengurusan parekraf masih rendah,kebanyakan perempuan berpartisipasi sebagai pelaku industry seperti kuliner dan kerajinan</p> <p><b>Kesenjangan Kontrol :</b></p> <p>g. Masih adanya kesenjangan peran laki-laki dan Perempuan dalam Parekraf dan dalam hal pengambilan keputusan laki-laki memiliki kontrol yang lebih luas.</p> <p><b>Kesenjangan Manfaat :</b></p> <p>h. Masyarakat belum dapat merasakan Peran perempuan di kelompok Parekraf</p> <p><b>i. Penyebab Internal :</b></p> <p>j. Masih belum adanya juknis yang jelas bagi pelaku Parekraf</p> <p>k. Masih kurangnya kualitas SDM dalam hal kepariwisataan</p> <p>l. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk pengembangan pelaku Parekraf</p> <p>m. Kurangnya sosialisasi untuk mengajak para pelaku Parekraf agar mengikuti pelatihan/Bimbingan teknis.</p> <p>n. Kurang koordinasi dan pembinaan terhadap pelaku Parekraf</p> <p>o. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait (Lintas Sektor)</p> <p>p. Kurangnya sarana informasi baik offline maupun online(brosur,baliho, medsos, vidio tron, dll )tentang kepariwisataan kab. Solok</p>



	<b>b. bab Eksternal :</b> q. Masih terbatasnya minat investor dalam mengembangkan objek wisata r. Kurangnya sarana dan parasarana disekitar Kawasan objek wisata. s. Kurangnya dukungan keluarga bagi pelaku Parekraf perempuan karena alasan keamanan, lokasi wisata, dan sebagainya t. Kurangnya keterlibatan warga sekitar kawasan wisata sebagai pelaku Parekraf		
<b>PERENCANAAN KEGIATAN</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Tujuan</b>	Meningkatkan kapasitas SDM Pariwisata demi terwujudnya responsive gender
		<b>Aktifitas</b>	1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata melalui bimtek pelaku Parekraf 2. Sosialisasi tentang Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no 11 PM 17/PR.001/MKP/08 tentang sadar wisata 3. Pembinaan dan koordinasi dengan pelaku Parekraf
		<b>Sumberdaya (Output)</b>	Dana: Rp.155.374.900
			Panitia: Disparbud
			Peserta : Pelaku Parekraf
			Saran Prasarana : ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer
		<b>Outcome</b>	<b>Rumusan kinerja</b> Meningkatnya pengembangan Sumber daya manusia pelaku Parekraf di Kabupaten Solok  <b>Indikator Kinerja</b> Jumlah Peserta bimtek yang memiliki GAP dan GBS pada lampiran rencana kerja

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
**KEPALA DINAS,**



**ARMEN, AP, MM**

**Nip. 19740207 199311 1 001**

# GAP (Gender Analysis Pathway)

SKPD: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM :	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Kinerja
<p><b>Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif</b></p> <p><b>KEGIATAN :</b></p> <p><i>Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</i></p> <p><b>SUB KEGIATAN</b></p> <p><b>1. Fasilitasi pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b></p> <p><b>2. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</b></p> <p><b>TUJUAN :</b></p> <p><b>Meningkatkan kapasitas SDM</b></p>	<p>Data Yang Dibutuhkan :</p> <p>1. Permen Parekraf Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024</p> <p>2. Data jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (peserta parekraf) dikembangkan kompetensinya yaitu</p>	<p><b>Akses:</b></p> <p>Akses jalan menuju objek wisata belum responsive Gender</p> <p><b>Partisipasi</b></p> <p>keikutsertaan kaum perempuan dalam kepengurusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) masih rendah,kebanyakan perempuan berpartisipasi sebagai pelaku usaha kuliner/kerajinan</p> <p><b>Kontrol</b></p> <p>Masih adanya kesenjangan peran laki-laki dan</p>	<p>▪ Masih belum adanya juknis yang jelas bagi pelaku Parekraf</p> <p>▪ Masih kurangnya peningkatan kualitas SDM dalam hal kepariwisataan melalui sosialisasi</p> <p>▪ Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk pengembangan pelaku Parekraf.</p> <p>▪ Kurang koordinasi terhadap pelaku Parekraf</p> <p>▪ Kurangnya koordinasi</p>	<p>▪ Masih terbatasnya minat Investor yang mendukung dalam mengembangkan parekraf</p> <p>▪ Kurangnya dukungan keluarga bagi pelaku Parekraf perempuan karena alasan keamanan, lokasi wisata, dan sebagainya</p> <p>▪ Kurangnya keterlibatan</p>	<p>▪ Meningkatkan kapasitas SDM Pariwisata baik laki-laki maupun perempuan dalam pengembangan pelaku parekraf</p>	<p>• Tersedianya juknis yang mendukung pelaku parekraf</p> <p>• Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata yang responsive Gender melalui bimtek pelaku Parekraf</p> <p>• Melakukan koordinasi dg SKPD Lintas sector tentang pengadaan jalan dan transportasi yang responsive gender</p>	<p>• Jumlah Pelaku Parekraf di kabupaten Solok sekitar 200 orang</p> <p>• Peserta Yang telah mengikuti BIMTEK rata-rata diikuti oleh 40 orang peserta. Dengan persentase 80% laki-laki saat Bimtek dan 20 % perempuan.</p>	<p>Indikator: Meningkatkan kapasitas SDM kepariwisataan</p> <p><b>Input:</b> Rp.155.374.900</p> <p><b>Out Put :</b> Terlaksananya peningkatan kapasitas pelaku Parekraf</p> <p><b>Out Come</b> :Meningkatnya Kontribusi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada perekonomian daerah.</p>

<b>Pariwisata demi terwujudnya responsive gender</b>	<p>sejumlah 40 Orang, dimana 30 orang laki-laki, dan hanya 10 orang perempuan</p> <p>3. Data Jumlah objek wisata yang aktif: 49 objek wisata</p> <p>4. Pelaku Parekraf yg ada di Kab. Solok yaitu sekitar 200 orang</p>	<p>Perempuan dalam Kepengurusan Parekraf Dalam hal pengambilan keputusan laki-laki memiliki kontrol yang lebih luas.</p> <p><b><u>Manfaat:</u></b></p> <p>Masyarakat belum dapat merasakan Peran perempuan di Tim Parekraf.</p>	<p>dengan SKPD terkait (Lintas Sektor)</p> <p>• Kurangnya sarana informasi baik offline maupun online(brosur,ba liho, medsos, vidio tron, dll )tentang kepariwisataan kab. solok</p>	<p>warga sekitar kawasan wisata sebagai pelaku Parekraf terutama perempuan</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya sarana prasarana yang responsive gender</li> <li>• Sosialisasi Terhadap pelaku parekraf perempuan sesuai Peraturan Menteri Kebudayaan an Pariwisata no 11 PM 17/PR.001/MK P/2008 tentang sadar wisata</li> </ul>		
--	---	---	--	--	--	---	--	--

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. SOLOK

KEPALA DINAS

ARMEN AP. MM

Nip. 19740211993111001



FORMAT GBS  
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

SKDP : SEKRETARIAT DAERAH  
Tahun Anggaran : 2025

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program Kode Program Kegiatan Sub Kegiatan	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota : 4.01.01 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Output Kegiatan	: Terpenuhinya kebutuhan Laptop untuk ASN Perempuan di bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Analisis Situasi	: 1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilihan Gender) 2. Data Jumlah ASN di Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda yang akan mengikuti Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi di Luar Kantor yang mengharuskan membawa Laptop Perempuan : 6 Orang Laki-laki : 5 Orang 3. Data Jumlah Laptop yang bisa untuk digunakan dan dibawa keluar keluar kantor oleh ASN Perempuan Laptop yang tersedia : 5 Unit Laptop yang mendukung untuk dibawa oleh ASN Perempuan acara acara di luar kantor : 0 Unit 4. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender 1. Kesenjangan terhadap jumlah peralatan kantor (laptop) yang ada untuk mendukung aktifitas kerja di luar kantor antara ASN laki-laki dan perempuan. 2. Pengadaan Laptop belum mempertimbangkan kondisi fisik antara laki-laki dan perempuan.
4	Rencana Aksi	: 1. Sumber Daya Pendukung (Peralatan Kantor) Menambah jumlah pengadaan Laptop di Bagian Perencanaan dan keuangan khususnya untuk ASN Perempuan. 2. Alokasi Anggaran : Rekening Belanja Modal Personal Computer (Lapto) sebesar : Rp. 30.000.000,-

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK  
  
MEDISON S.Sos.M.Si  
NIP. 19770409 199203 1 003

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN : PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolak Ukur Kinerja/Data Dasar (Base Line)	Indikator Kinerja
<b>Program :</b> Perumpan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota  <b>Kegiatan :</b> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi yang akan dilakukan/dihadiri : 12 Kali  Jumlah Laptop yang ada untuk mendukung pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi untuk : Laki-laki : 5 Unit Perempuan : 0 Unit	<b>Akses:</b> Terjadi kesenjangan peralatan (Laptop) yang ada untuk mendukung pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi.  <b>Partisipasi :</b> Dibutuhkan Laptop yang mendukung untuk melaksanakan Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi, terutama bagi perempuan (Laptop yang lebih ringan) yang dapat dibawa kemana-mana (kerja diluar kantor).	1. Kesenjangan terhadap Laptop yang tersedia dengan ASN Perempuan yang akan menggunakannya yang mana Laptop yang tersedia tidak memberikan kenyamanan terutama dibawa acara keluar kantor, karena laptop yang tersedia ukurannya cukup besar dan berat.  2. ASN yang akan mengikuti Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi adalah Analis Perencana yang merupakan seorang ASN Perempuan	1. Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi sering dilakukan di Luar Kantor.  2. Belum optimalnya rencana pengadaan peralatan kerja (laptop) dengan ASN yang akan menggunakannya (Laki-laki/ Perempuan)	Terfasilitasinya Tugas dan Pekerjaan ASN Perempuan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang Responsif Gender	1. Menambah/ pengadaan peralatan kerja (Laptop) untuk ASN Perempuan di Bagian Perencanaan dan keuangan khususnya untuk Perencana yang akan mengikuti dan menghadiri Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi yang memerlukan Laptop di Luar Kantor	Input : Merencanakan dan menyiapkan kebutuhan Laptop untuk ASN Perempuan di Bagian Perencanaan dan Keuangan  Output : Terpenuhinya kebutuhan Laptop untuk ASN Perempuan di bagian Perencanaan dan Keuangan	<b>Indikator Kinerja :</b> Jumlah ASN Perempuan yang akan mengikuti Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi di Luar Kantor yang mengharuskan membawa Laptop  <b>Outcome :</b> Meningkatnya kualitas hasil pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan Konsultasi di Luar Kantor





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat  
Telepon (0755) 31479 Fax. (0755) 31479

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
KEGIATAN	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	
KODE SUB KEGIATAN	8.01.02.2.01.0004	
ANALISIS SITUASI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Data Umum : Jumlah Calon Paskibra Kabupaten Solok Akses : SDM, Sumber Daya Keuangan, Ketersediaan Layanan Pemerintah Partisipasi : Jumlah Laki-Laki dan Perempuan yang akan mengikuti calon Paskibra Tahun 2025 Kontrol : Jumlah laki-laki dan perempuan yang mengikuti calon Paskibra Manfaat : Seluruh lapisan pelajar dapat merasakan kemerdekaan dengan penuh rasa tanggung jawab</li><li>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender<ol style="list-style-type: none"><li>a. Faktor Kesenjangan yaitu :<ul style="list-style-type: none"><li>• Akses : SDM, Sumber Daya Keuangan, Ketersediaan Layanan Pemerintah</li><li>• Kontrol/Kewenangan : Jumlah laki-laki dan perempuan yang mengikuti paskibra</li><li>• Partisipasi : Banyaknya laki-laki dan perempuan yang mengikuti paskibra</li><li>• Manfaat : Seimbangnya laki-laki dan perempuan yang mengikuti paskibra</li></ul></li><li>b. Penyebab Internal<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih terbatasnya kapasitas SDM</li></ul></li><li>c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih terbatasnya pemahaman pelajar tentang Paskibra</li></ul></li></ol></li></ol>	
RENCANA TINDAK	Kegiatan	Melaksanakan pemilihan calon Paskibra Tahun 2025 tidak membedakan laki-laki dan perempuan



		Tujuan	Meningkatnya peran serta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti penerimaan paskibra
		Aktivitas	Penerimaan Calon Paskibra Tahun 2025 : 1. Menentukan dan mengundang peserta calon paskibra yang terdiri dari pelajar SLTA 2. Menyelenggarakan penerimaan calon Paskibra 3. Membuat Laporan <b>Input :</b> 1) Panduan tentang paskibra 2) Calon paskibra 3) Pelatih dan Panitia <b>Output :</b> Terlaksananya Penerimaan calon paskibra di Kabupaten Solok
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran Rp. 508.795.600,- SDM : Peserta, Pelatih dan panitia. Peralatan dan mesin : laptop, printer, pengeras suara dll yang dirasa perlu		
OUTCOMES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rumusan Kinerja Meningkatnya keinginan Pelajar dalam penerimaan Paskibra tahun 2025</li> <li>Indikator Kinerja Jumlah laki-laki dan perempuan dalam mengikuti Paskibra 2025</li> </ul>		

Arosuka, Juni 2024

**KEPALA**



**DONLY WANZE LUBIS, S.STP**  
 NIP. 19831102 200212 1 001

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KANTOR  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  
SOLOK TAHUN 2025**

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolak Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Program : PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Data Umum : Jumlah calon Paskibra Kabupaten Solok	Akses : SDM, Sumber Daya Keuangan, Ketersediaan Layanan Pemerintah	Masih terbatasnya kapasitas SDM	Masih terbatasnya pemahaman Pelajar tentang Paskibra	Meningkatnya peran serta laki-laki dan perempuan dalam penerimaan calon paskibra Tahun 2025	Meningkatnya peran serta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti penerimaan paskibra	Input : 1)Panduan tentang paskibra 2)Calon paskibra 3)Pelatih dan Panitia	Rumusan Kinerja : Meningkatnya keinginan pelajar dalam penerimaan paskibra tahun 2025
Kegiatan : PERUMUSAN KEBUAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI WAWASAN DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Akses : SDM, Sumber Daya Keuangan, Ketersediaan Layanan Pemerintah	Partisipasi : Banyaknya laki-laki dan perempuan yang mengikuti paskibra					Output : Terlaksananya penerimaan calon paskibra di Kabupaten Solok	Indikator Kinerja : Jumlah laki-laki dan perempuan dalam mengikuti Paskibra 2025
Sub Kegiatan : PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	Partisipasi : Jumlah Laki-Laki dan Perempuan yang akan mengikuti calon Paskibra Tahun 2025	Kontrol : Jumlah laki-laki dan perempuan yang mengikuti Paskibra						
Tujuan : MENINGKATNYA PERAN SERTA PELAJAR DIKABUPATEN SOLOK DALAM PENERIMAAN PASKIBRA TAHUN 2025.	Kontrol : Jumlah laki-laki dan perempuan yang mengikuti calon Paskibra	Manfaat : Seimbangnya laki-laki dan perempuan yang mengikuti Paskibra						

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolak Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
	Manfaat : Seluruh lapisan pelajar dapat merasakan kemerdekaan dengan penuh rasa tanggung jawab							

Arosuka, Juni 2024

KEPALA



**DONLY WANCE LUBIS, S.STP**

NIP. 19831102 200212 1 001



**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK**

NO.	ASPEK	URAIAN
1.	<b>Program Kegiatan Subkegiatan</b>	Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
2.	<b>Output Subkegiatan</b>	<b>UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kab. Solok</b> Tersedianya gedung pustaka sekolah yang layak dan nyaman dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran siswa terhadap pentingnya ilmu pengetahuan.
3.	<b>Analisis Situasi</b>	<p>1. Kondisi sekarang perpustakaan sejumlah sekolah dari segi struktur sudah tidak layak pakai, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung pustaka.</p> <p>2. Kondisi Pustaka Sekolah yang belum ada di beberapa satuan pendidikan SD, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung pustaka.</p> <p><b>Data Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 364 SD</li> <li>- Jumlah peserta didik SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 44.934 orang</li> <li>- Jumlah guru SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 3.903 orang</li> </ul> <p><b>Akses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah gedung perpustakaan SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 314 unit.</li> <li>- Kondisi perpustakaan SD yang belum ada di Kabupaten Solok saat ini adalah 33 unit.</li> </ul> <p><b>Partisipasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Peserta SD laki-laki 23.255 orang dan perempuan 21.682 orang</li> </ul> <p><b>Kontrol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru SD laki-laki 735 orang dan Perempuan 3.168 orang</li> </ul>

		<b>Manfaat</b> – Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka baik laki-laki maupun perempuan sehingga kebiasaan membaca di kalangan peserta didik baik laki-laki maupun perempuan menjadi meningkat. Selain itu, dalam rangka pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, maka diperlukan ruang perpustakaan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa mengenai literasi membaca, numerasi, sains, TIK, finansial, serta budaya dan kewargaan/ kemasyarakatan	
4	<b>Rencana Aksi</b>	Komponen input 1	Menyediakan fasilitas pustaka dan pendukung kenyamanan dalam perpustakaan  <b>Output:</b> Persentase Bangunan Pustaka yang sesuai Standar Nasional Pendidikan  <b>Anggaran:</b> Rp. 3.344.547.440,-
5.	<b>Alokasi Anggaran Output Subkegiatan</b>	– Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan SD sebesar Rp. 3.344.547.440,-	
6.	<b>Dampak/ Hasil Output Subkegiatan</b>	1. Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka 2. Membudayanya perilaku suka membaca di kalangan peserta didik 3. Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Peserta Didik	

Arosuka, Januari 2024  
 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
 Olahraga Kabupaten Solok

  
**ZAINAL JUSMAR, S.Pd, MM, M.Si**  
 Pembina Tk. I/ IV.B  
 NIP. 19730516 199903 1004



## MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

**OPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<b>Program :</b> Program Pengelolaan Pendidikan  <b>Kegiatan :</b> Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  <b>Subkegiatan :</b> Pembangunan Perpustakaan Sekolah  <b>Tujuan :</b> Tersedianya gedung pustaka sekolah layak dan nyaman dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran siswa terhadap pentingnya ilmu pengetahuan  <b>Indikator Kinerja :</b> Tersedianya bangunan Pustaka yang permanen, standar, nyaman, representatif, dan layak pakai. Tercapainya Indikator	- Dasar regulasi sub kegiatan pembangunan perpustakaan sekolah, yaitu: Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa terdapat 6 standard nasional perpustakaan, yaitu: standard koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, an standard pengelolaan.	- Kondisi Pustaka Sekolah yang sudah tidak layak pakai, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung pustaka  Akses - Ketidaklayakan kondisi pustaka dan kantin menyulitkan peserta didik khususnya yang perempuan mendapatkan ruang dan waktu yang nyaman saat menggunakan pustaka  Partisipasi - Jumlah siswa lelaki lebih	- Kondisi bangunan pustaka sekolah lain rata-rata belum representatif dan memerlukan kesegeraan penanganan yang sama - Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk memperbaiki bangunan pustaka sekolah lain	- Masih kurangnya lama kunjungan siswa ke pustaka - Koleksi perpustakaan masih kurang lengkap - Lahan ada namun terbatas	Tersedianya gedung pustaka sekolah yang layak dan nyaman dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran siswa terhadap pentingnya ilmu pengetahuan yang berbasis responsif gender	- Menyediakan buku koleksi perpustakaan yang lebih lengkap - Menyediakan fasilitas pendukung kenyamanan dalam perpustakaan - Memfokuskan anggaran untuk perbaikan bangunan pustaka agar sesuai standar nasional	<b>Bangunan Pustaka sekolah yang belum ada:</b>  - bangunan	<b>Output :</b> Rumusan Kinerja : - Bangunan Pustaka yang sesuai Standar Nasional Pendidikan  <b>Indikator Kinerja :</b> - Tersedianya bangunan Pustaka yang sesuai Standar Nasional Pendidikan  <b>Outcome :</b> Rumusan Kinerja: - Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka - Membudayanya perilaku suka membaca di kalangan peserta didik



<p>Kinerja diharapkan berdampak pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka baik laki-laki maupun perempuan</li> <li>2. Meningkatnya kebiasaan membaca di kalangan peserta didik baik laki-laki maupun perempuan</li> </ol>	<p>Selain itu, dalam sekolah diminta untuk: memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik; mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan; mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.</p>	<p>banyak dibanding siswa perempuan</p> <p>Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Representatif perempuan sebagai pengambil keputusan lebih besar karena berperan sebagai kepala sekolah</li> <li>Proporsi Guru yang didominasi oleh perempuan</li> </ul> <p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siswa perempuan dan lelaki tidak mendapatkan manfaat yang maksimal saat menggunakan Pustaka</li> </ul>						<p><b>Indikator Kinerja :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kunjungan peserta didik ke pustaka setiap harinya</li> <li>- Budaya perilaku suka membaca dan lama kunjungan peserta didik ke pustaka</li> </ul> <p><b>Anggaran :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Rp. <b>3.344.547.440</b></li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar penganggaran kegiatan, yaitu Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2025 dalam rangka mencapai tujuan strategis untuk menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan merata.</li> <li>- Kondisi sekarang Pustaka sejumlah sekolah dari segi struktur sudah tidak layak pakai, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung pustaka.</li> </ul> <p><b>Data Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 364 SD</li> <li>- Jumlah peserta didik SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 44.934 orang</li> <li>- Jumlah guru SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 3.903 orang</li> </ul>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p><b>Akses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah gedung perpustakaan SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 324 unit.</li> <li>- Kondisi gedung perpustakaan SD yang belum ada di Kabupaten Solok saat ini adalah 33 unit</li> </ul> <p><b>Partisipasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Peserta SD laki-laki 23.255 orang dan perempuan 21.682 orang</li> </ul> <p><b>Kontrol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru 735 laki-laki dan Perempuan SD 3.168 orang</li> </ul> <p><b>Manfaat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka baik laki-laki maupun perempuan sehingga</li> </ul>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



	kebiasaan membaca di kalangan peserta didik baik laki-laki maupun perempuan menjadi meningkat. Selain itu, dalam rangka pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, maka diperlukan ruang perpustakaan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa mengenai literasi membaca, numerasi, sains, TIK, finansial, serta budaya dan kewargaan/kemasyarakatan							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Arosuka, Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Solok



**GENDER BUDGET STATEMEN (GBS)**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK**  
**TAHUN 2025**

ASPEK	URAIAN
Program	<p><b>Program:</b>  Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Tujuan : Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB)</p>
Kode Program	Kode Rekening : 1.02.02.2.01
Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota.
Analisis Situasi	<p>Pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan ibu bersalin belum mencapai 100 %  Antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka kematian ibu: 148/100.000 KH tahun 2021, 78.85/100.000 KH tahun 2022, 146,32 / 100.000 KH tahun 2023</li> <li>• Pelayanan kesehatan pada ibu hamil 84,41% tahun 2021, 97,04% tahun 2022 dan 100% tahun 2023</li> <li>• Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin 81,9% tahun 2021, 92,61% tahun 2022, 99,76% tahun 2023</li> <li>• Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir 84,64% tahun 2021, 91,59% tahun 2022, 99,84% tahun 2023</li> <li>• Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir 84,64% tahun 2021, 91,59% tahun 2022, 99,84% tahun 2023</li> <li>• Dokter 1:10.141 Bidan 1:805, Perawat 1:1.489</li> <li>• Puskesmas 1:19.749, Puskesmas Pembantu 1:4.414, Tempat Tidur 1:3.506</li> <li>• Jumlah dukun aktif 83 orang</li> </ul> <p>Ibu Dan Kesenjangan Gender:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Faktor Kesenjangan</b> <p><b>Akses :</b> Masih kurangnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil karena keterbatasan tenaga dan transportasi yang belum memadai berdasarkan keadaan geografis Kabupaten Solok</p> <p><b>Partisipasi</b>  Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan bayi (skrining kesehatan sesuai standar,</p> <p><b>Kontrol</b>  Masih kurangnya upaya deteksi resiko tinggi dan penanganan komplikasi pada ibu dan bayi</p> <p><b>Manfaat</b> Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan bersalin dapat menurunkan AKI di Kab. Solok</p> </li> <li>• <b>Penyebab Interna</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penempatan tenaga strategis (dokter dan bidan) yang belum merata terutama di daerah terpencil.</li> <li>➢ Keterbatasan tenaga jumlah tenaga kesehatan (9 jenis tenaga kesehatan)</li> <li>➢ Keterbatasan sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam memberikan pelayanan esensial kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)</li> <li>➢ Pelayanan kesehatan pada ibu dan bayi sesuai standar</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kompetensi tenaga kesehatan (Dokter, Bidan dan Perawat) yang masih kurang terutama tentang Penanganan Obstetri Neonatal Dasar)</li> <li>▪ <b>Penyebab Eksternal</b></li> <li>➤ Budaya yang masih susah untuk di rubah tentang perlunya melakukan persalinan di fasyankes sehingga terjadi 3T (Terlambat mengambil keputusan, Terlambat sampai ke fasilitas dan Terimbat Mendapat Penanganan)</li> <li>➤ Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan terutama kesehatan ibu dan bayi sehingga masih terjadi 4 T (Terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak) dan persalinan dengan dukun</li> <li>➤ Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan terutama kesehatan ibu sehingga terdapat 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat dan Terlalu Banyak)</li> <li>➤ Masih terdapatnya ibu hamil/bersalin dan bayi tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan</li> <li>➤ Keterbatasan sarana transportasi dan akses jalan di daerah tersulit</li> </ul>	
Capaian Program	<p>1. Tolak Ukur : Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)</p> <p>2. Indikator dan target Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar</li> <li>▪ Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar</li> <li>▪ Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar</li> <li>▪ Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar</li> <li>▪ Persentase nagari Siaga Aktif</li> <li>▪ Persentase UHC (Universal Health Coverage)</li> </ul>	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	<b>Rp 10.555.000.000,-,-</b>	
Rencana Aksi	Komponen input 1	Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Input : Rp. 20.000.000,- Output : Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Outcome : Angka Kematian Ibu
	Komponen input 2	Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin Sesuai Standar Input : Rp. 50.000.000 Output : Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin Sesuai Standar Outcome : Angka Kematian Ibu
	Komponen Input 3	Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Input : Rp. 190.000.00 Output : Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Outcome : Angka Kematian Bayi
	Komponen Input 4	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Input: Rp.250.00.000,- Output: Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan Outcome: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar
	Komponen Input 5	Pemenuhan Kebutuhan SDM Sesuai Standar Input: Rp.700.000.000,- Output: Jumlah SDM yang memenuhi standar di fasyankes Outcome: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar
	Komponen Input 6	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Input: Rp. 345.000.000 Output: Persentase RT yang ber PHBS Outcome: Persentase nagari siaga



	Komponen Input 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Input: Rp. 9.000.000,- Output: Persentase UHC (Universal Health Coverage) Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat
--	---------------------	---

Arosuka, Mei 2024  
Kepala Dinas Kesehatan Kab.Solok  
  
**ZULHENDRI, SKM. M. Kes**  
NIP. 19660604 198703 1 005

TIM DRIVER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER  
KABUPATEN SOLOK

Mengetahui:	Tanda Tangan
	1.....
	2.....
	1. ....
	2. ....

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2025**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender: Masih tingginya angka kematian Ibu			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Kinerja
<b>Program:</b> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  <b>Kegiatan:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan: Tingkat daerah Kabupaten/Kota  <b>Tujuan :</b> Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Solok	Sesuai Peraturan Pemerkes Nomor 06 Tahun 2024, tentang Standar Teknis pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Antara lain:  • Pelayanan kesehatan pada ibu hamil 100%  • Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin 100%  • Pemayanan kesehatan pada bayi baru lahir 100%	<b>Akses</b> Masih kurangnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat di daerah terpencil karena keterbatasan tenaga dan transportasi yang belum memadai berdasarkan kendian geografis Kabupaten Solok  <b>Partisipasi</b> Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya	• Penempatan tenaga strategis (dokter dan bidan) yang belum merata terutama di daerah terpencil.  • Keterbatasan tenaga jumlah tenaga kesehatan (9 jenis tenaga kesehatan)  • Keterbatasan sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam memberikan pelayanan esensial kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)  • Pelayanan kesehatan pada ibu dan bayi sesuai standar	• Budaya yang masih susah untuk di rubah tentang perlunya melakukan persalinan di fasyankes sehingga terjadi 3T (Terlambat mengambil keputusan, Terlambat sampai ke fasilitas dan Terlambat Mendapat Penanganan)  • Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan terutama kesehatan ibu dan bayi sehingga masih terjadi 4 T (Terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu	• Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 205/100.000 KH menjadi 200/100.000 KH  • Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 8,35 / 1.000 KH menjadi 8,13 / 1.000 KH	1. Melakukan Analisa terhadap anjalisa jabatan dan Analisa beban kerja serta peta jabatan terhadap tenaga kesehatan  2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pemenuhan SDMK sesuai standar di fasilitas kesehatan  3. Menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana dan	• Pelayanan kesehatan pada ibu hamil 84,41% tahun 2021, 97,04% tahun 2022 dan 100% tahun 2023  • Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin 81,9% tahun 2021, 92,61% tahun 2022, 99,76% tahun 2023  • Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir 84,64% tahun 2021, 91,59% tahun 2022, 99,84% tahun 2023	1. Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Input: Rp. 20.000.000,- Output: Presentase Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Outcome: Angka Kematian Ibu  2. Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin Sesuai Standar Input: Rp. 50.000.000 Output: Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Ibu bersalin sesuai standar Outcome: Angka Kematian Ibu  3. Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir Sesuai standar Input: Rp. 190.000.000 4. Output: Persentase Pelayanan Kesehatan



	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar ketenagaan puskesmas (Tenaga Kesehatan dan tenaga non)</li> <li>• Standar bangunan puskesmas, prasarana puskesmas dan peralatan puskesmas</li> </ul> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>Permenkes Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	<p>kesehatan ibu dan bayi (skrining kesehatan sesuai standar,</p> <p><b>Kontrol</b> Masih kurangnya upaya deteksi resiko tinggi dan penanganan komplikasi pada ibu dan bayi</p> <p><b>Manfaat</b> Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan bersalin dapat menurunkan AKI di Kab. Solok</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi tenaga kesehatan (Dokter, Bidan dan Perawat) yang masih kurang terutama tentang Penanganan Obstetri Neonatal Dasar)</li> </ul>	<p>banyak) dan persalinan dengan dukun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan terutama kesehatan ibu sehingga terdapat 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat dan Terlalu Banyak)</li> <li>• Masih terdapatnya ibu hamil/bersalin dan bayi tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan</li> <li>• Keterbatasan sarana transportasi dan akses jalan di daerah tersulit</li> </ul>		<p>alat kesehatan sesuai standar dan mengalokasikan pengadaan baik melalui APBD maupun DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan</p> <p>4. Melaksanakan pelayanan kesehatan pada ibu dan bayi sesuai standar</p> <p>5. Meningkatkan upaya promosi kesehatan pada masyarakat</p> <p>6. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui bimbingan teknis dan pelatihan</p> <p>7. Melakukan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait jaminan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar 80%</li> <li>• Dokter 1:10.141, Bidan 1:805, Perawat 1:1.489</li> <li>• Puskesmas 1:19.749, Puskesmas Pembantu 1:4.414, Tempat Tidur 1:3.506</li> <li>• Jumlah dukun aktif 83 orang</li> </ul>	<p>Pada Bayi Baru Lahir Sesuai standar Outcome: Angka Kematian Bayi</p> <p>5. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Input: Rp.250.000.000,- Output: Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan Outcome: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar</p> <p>6. Pemenuhan Kebutuhan SDM Sesuai Standar Input: Rp.700.000.000,- Output: Jumlah SDM yang memenuhi standar di fasyankes Outcome: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar</p> <p>7. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Input: Rp. 345.000.000 Output: Persentase RT yang ber PHBS Outcome: Persentase nagari siaga</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

	<p>Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter 1:2.500, Bidan 1:1.000, Perawat 1:855</li> <li>• Puskesmas 1:16.000, Puskesmas Pembantu 1:1.500, Tempat Tidur 1:1.000</li> </ul>					<p>Kesehatan pada ibu dan bayi dari keluarga kurang mampu</p>		<p>8. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Input: Rp. 9.000.000,- Output: Persentase UHC (Universal Health Coverage) Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Arosuka, Mei 2024  
Kepala Dinas Kesehatan Kab.Solok

  
ZU HENDRI, SKM. M. Kes  
NIP. 19660604 198703 1 005



**GBS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SOLOK**

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)</b>			
SKPD	: Dinas Perhubungan Kabupaten Solok		
Tahun Anggaran	: 2025		
Program	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
Kode Program	2 15 02 2 06 04		
Kegiatan	Pengawasan dan Pengerutan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Kinerja Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya sosialisasi PPRG dan PUG oleh Pimpinan, Pengawas dan Pelaksana Kegiatan</li> <li>• Jumlah titik Petugas Pengamanan (PAM) lalu lintas di daerah rawan kecelakaan</li> <li>• Jumlah petugas Petugas Pengamanan (PAM) Dinas Perhubungan di Kabupaten Solok</li> </ul>		
Hasil/Output	Terlaksanya PAM lalu lintas di daerah rawan kecelakaan yang berbasis gender.		
Analisis Situasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna jalan terutama perempuan seringkali kurang nyaman bila diatur oleh petugas laki – laki, sehingga mereka cenderung menghindari ketika hendak menyeberang.</li> </ul>		
Rencana Aksi	Komponen 1	Tujuan	1. Sosialisasi mengenai PP No 37 Tahun 2017 tentang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Peningkatan Mutu dan Kualitas SDM petugas PAM lalu lintas.
		Alokasi Anggaran	Rp. 25.000.000,-
	Komponen 2	Tujuan	1. Pengadaan Kelengkapan Pakaian Dinas Keselamatan Petugas PAM Lalu Lintas
		Alokasi Anggaran	Rp. 55.500.000,-
	Total anggaran		Rp. 80.500.000,-
Capaian Program	Output 1. Terlaksananya sosialisasi mengenai keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Peningkatan Mutu dan Kualitas SDM petugas PAM lalu lintas. 3. Tersedianya kelengkapan Pakaian Dinas Keselamatan Petugas PAM Lalu lintas		



Indikator Out Come :

1. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas di titik rawan kecelakaan
2. Meningkatnya partisipasi petugas PAM Perempuan di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

Koto Baru, Juni 2024

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Solok,



MUHAMMAD QINIS STP, M.Si  
NIP. 1976011001997031003



Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kegiatan Program Kegiatan	Data Pembiayaan Wewenang	ISU GENDER			REHABILITASI DAN BENCANA KURUPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Ketersediaan	Salah Ketersediaan Internal	Salah Ketersediaan Eksternal	Reformasi Tegapan	Reformasi Akut	Reformasi Basis Data (Basis Data)	Indikator Kinerja
Penyediaan pelayanan kesehatan kebidanan dan kesehatan ibu dan anak	Data Sekunder: RUMAH SAKIT (RS) dan data lain yang relevan di Kabupaten Solok	Ketersediaan	Salah Ketersediaan Internal	Salah Ketersediaan Eksternal		Melakukan koordinasi dan sinergi dengan mitra sektoral		
		Ketersediaan pelayanan dan ketersediaan tenaga PAM dan yang terkait					Penyediaan pelayanan kebidanan dan kesehatan ibu dan anak (KKBIA)	Penyediaan Monev dan Kajian SGM pelayanan PAM dan
	Data Sekunder: data lain dan lain							Input: Rp 72 juta Output: Peningkatan dan penguatan SGM pelayanan PAM Penyediaan Ketersediaan Pelayanan dan Ketersediaan Pelayanan PAM dan Kajian
	Salah Ketersediaan: pelayanan PAM dan Ketersediaan SGM							Output: Peningkatan dan penguatan pelayanan PAM dan SGM





**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

**SKPD** : (Dinas Pertanian)  
**TAHUN** : (2025)  
**ANGGARAN**

<b>PROGRAM</b>	(Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian)
<b>KODE PROGRAM</b>	3.27.02
<b>KEGIATAN</b>	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>SUB KEGIATAN</b>	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000,-
<b>HASIL/OUTPUT</b>	<b>1.</b> Jumlah petani yang mengikuti bimbingan teknis GAP padi organik sebanyak 40 orang
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<b>1. Data Pembuka Wawasan</b> Jumlah Penyuluh Pertanian : 77 orang Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani Laki-laki= 18.090 orang Perempuan= 19.495 orang Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari laki-laki SK Penetapan Kelompok Tani  <b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b> A. Faktor Kesenjangan a. Aspek Akses:- b. Aspek partisipasi: Pada keikutsertaan bimtek penyusunan SOP GAP kelompok tani lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. c. Aspek kontrol: Anggota kelompok tani lebih didominasi oleh perempuan  B. Aspek manfaat: Manfaat bimbingan teknis GAP pada saat ini lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh Petani perempuan  C. Penyebab Internal a. Masih kurangnya sosialisasi ke petani tentang penyusunan SOP GAP padi organik.  D. Penyebab Eksternal: a. Laki-laki sebagai petani sebagian besar bekerja pada saat pengolahan tanah b. Perempuan sebagai petani juga sebagai pemilik lahan merupakan pengambil kebijakan untuk menentukan system budidaya padi

RENCANA AKSI	Komponen 1	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		Tujuan	Meningkatkan pengetahuan petani tentang penyusunan SOP GAP padi organik.
		Alokasi Anggaran	Rp. 50.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Output dan dampak kegiatan yang memperlihatkan perbaikan kearah KKG (Diambil dari GAP langkah 9 ) Output 1. Jumlah petani yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan SOP padi organic (40 orang)  <i>Outcome</i>  <b>Meningkatnya produktifitas komoditi pertanian</b>		

Arosuka, 14 Juni 2024



Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Solok

Drh. Kenedy Hamzah, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650727 199202 1 002

### GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DINAS PERTANIAN TAHUN 2025

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Kinerja Output
<b>Kegiatan:</b> <b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b> <b>Sub Kegiatan:</b> <b>Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ tanaman</b> <b>Tujuan Kegiatan:</b> <b>Meningkatkan pengetahuan petani tentang Budidaya padi</b>	<i>Jumlah Penyuluh Pertanian : 77 orang</i>  <i>Jumlah kelompok tani: 1.782</i>  <i>Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani</i>  <i>Laki-laki= 18.090 orang</i>  <i>Perempuan = 19.495 orang</i>	<i>Faktor kesenjangan:</i> 1. Aspek Akses;- 2. Aspek partisipasi; Pada pertemuan kelompok tani lebih sedikit laki-laki (20%) dibandingkan perempuan (80%) 3. Aspek kontrol: Anggota kelompok perempuan lebih banyak dari laki-laki	<i>Masih kurangnya sosialisasi ke petani tentang penyusunan SOP GAP padi organik .</i>	1. Laki-laki sebagai petani sebagian besar bekerja pada saat pengolahan tanah 2. Perempuan sebagai petani juga sebagai pemilik lahan merupakan pengambil kebijakan untuk menentukan system budidaya padi.	<b>Reformulasi tujuan</b> <i>Meningkatnya pengetahuan petani tentang penyusunan SOP GAP padi organik.</i>	1. Meningkatkan pengetahuan petani tentang penyusunan SOP GAP padi organik dengan melaksanakan bimbingan teknis penyusunan SOP GAP padi organik komposisi peserta perempuan dan laki-laki 60 : 40).	<i>Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani</i> <i>Laki-laki= 18.090 orang</i> <i>Perempuan= 19.495 orang</i>  <i>Jumlah Penyuluh Pertanian 77 orang</i>	<i>Jumlah petani yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan SOP padi organik (40 orang) dengan anggaran Rp. 50.000.000</i>  <b>Outcome</b> <b>Meningkatnya produktifitas komoditi pertanian</b>



Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
organik sesuai SOP Good Agriculture Practise (GAP)  Sasaran kegiatan:  Kelompok tani	SK Penetapan Kelompok tani	4. Aspek manfaat: Manfaat bimtek penyusunan SOP GAP lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh Perempuan						

Arosuka, 14 Juni 2024

  
 Kepala Dinas Pertanian  
 Kabupaten SoloK  
 Drh. Kenedy Hamzah, M.Si  
 Pembina Utama Madya/IVc  
 NIP. 19650727 199202 1 002

## **GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)**

**NAMA OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. SOLOK**  
**TAHUN : 2025**

Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	
Anggaran Sub Kegiatan	Rp.25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah)	
Indikator Kinerja Kegiatan	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dengan memperhatikan pengarusutamaan gender.	
Output Kegiatan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang responsive gender.	
Analisis Situasi	<p>Kurangnya toilet yang responsive gender di kantor .</p> <p><b><u>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</u></b></p> <p><b>Akses :</b> Tidak seimbangnya toilet laki-laki dan perempuan di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.</p> <p><b>Peran :</b> Kurangnya sarana dan prasana toilet yang responsive gender.</p> <p><b>Kontrol :</b> Kurangnya pemahaman tim teknis dan perencana dalam membuat toilet yang responsive gender.</p> <p><b>Manfaat :</b> Menciptakan kenyamanan bagi perempuan pergi ketoilet yang responsive gender.</p> <p><b><u>Penyebab Internal :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Permen PU No. 38 tahun 2007 dan PP. 6 tahun 2021 tentang bangunan Gedung yang responsive gender.</li> <li>2. Kurangnya pemahaman tim teknis dan perencana dalam membuat toilet yang responsive gender.</li> <li>3. Masih kurangnya koordinasi antara tim teknis perencana dan pengawas.</li> </ol> <p><b><u>Penyebab Eksternal :</u></b> Kurangnya SDM pengawas DPU tentang bangunan yang responsive gender.</p>	
Rencana Aksi	Kegiatan	1. Melaksanakan rehabilitasi pembuatan toilet yang responsive gender.
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah )	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Toilet yang responsive gender : 2 buah toilet beserta sarana dan prasarananya	


**KEPALA**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
  
**Drs. ZULMARNUS**  
 Pembina Utama Muda, IV.c  
 NIP. 19670316 199003 1 005



## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

### DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan Yang Dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Program :</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  <b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  <b>Tujuan :</b> Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1. Permen PU No 38 tahun 2007 dan PP. 6 tahun 2021 tentang bangunan Gedung.  laki- laki.  2. Jumlah ASN/Non ASN Dispersip 39 orang terdiri dari 19 orang perempuan dan 20 orang  3. Jumlah Toilet yang ada 6 unit. 1 unit di ruang Kepala Dinas, 1 unit di sekretariat serta 4 unit di Perpustakaan.  4. Jumlah toilet yang sudah responsive	<b>Akses :</b> -Tidak seimbang toilet laki-laki dan perempuan di kantor /Perpustakaan Umum Daerah OPD.  <b>Peran :</b> -Kurang nyamannya perempuan pergi ke toilet karena kurangnya sarana dan prasarana  <b>Kontrol :</b> Kurangnya pemahaman tim teknis dan perencanaan dalam membuat toilet yang	1. Sosialisasi Permen PU No 38 tahun 2007 dan PP. 6 tahun 2021 tentang bangunan Gedung yang responsive gender.  2. Kurangnya pemahaman tim teknis dan perencanaan dalam membuat toilet yang responsive gender  3. Masih kurangnya koordinasi antara tim teknis perencanaan dan pengawas.	Kurangnya Koordinasi dengan SDM pengawas DPU tentang bangunan yang responsive gender.	Meningkatkan sarana dan prasarana toilet yang responsive Gender.	Melakukan sosialisasi tentang toilet yang responsive gender. (Permen PU No 38 tahun 2007 dan PP. 6 tahun 2021 tentang bangunan Gedung yang responsive gender).  Melaksanakan pembangunan pembuatan toilet yang responsive gender.  Meningkatkan koordinasi antara tim teknis perencanaan dan pengawas.	Jumlah ASN/Non ASN Dispersip 39 orang terdiri dari 19 orang perempuan dan 20 orang	<b>Kegiatan</b> sosialisasi tentang toilet responsive gender  <b>Peserta Sosialisasi:</b> 35 Orang  <b>Indikator:</b> Terlaksananya kegiatan yang responsive gender.  <b>Input :</b> untuk Sosialisasi toilet yang responsive gender : Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)  untuk pemeliharaan toilet yang responsive gender : Rp 22.000.000 ( Dua puluh dua Juta Rupiah )



Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan Yang Dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	gender ada 4 unit	responsive						<b>Output:</b> Terpeliharanya Toilet yang responsive Gender : 2 buah toilet beserta sarana dan prasarananya.  <b>Toilet yang  resposive  gender : 2 bh  toilet yang  responsive  gender.</b>



KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

**Drs. ZULMARNUS**

Pembina Utama Muda, IV.c

NIP. 19670316 199003 1 005

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER</b> <b>( GENDER BUDGET STATEMENT )</b>	
<b>SKPD</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok
<b>ALAMAT</b>	Arosuka
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	2025
<b>PROGRAM</b>	PENDAFTARAN PENDUDUK
<b>KODE PROGRAM</b>	2.12.02.
<b>KEGIATAN</b>	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
<b>SUB KEGIATAN</b>	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
<b>HASIL/OUTPUT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online untuk 14 Kecamatan</li> <li>2. Terlaksananya pelayanan langsung di Nagari-nagari dengan menggunakan mobil pelayanan disdukcapil ( Inovasi marawa) serta layanan predator untuk kaum marginal ( Lansia, ODGJ, Disabilitas dan Orang sakit)</li> <li>3. Tersedianya sarana dan prasana lengkap yang memenuhi standar pelayanan publik</li> <li>4. Terlaksananya Bimbingan teknis peningkatan kompetensi SDM untuk pelayanan publik</li> </ol>
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi kependudukan 190 orang per hari terdiri dari 100 orang pelayanan langsung, 90 orang pelayanan online.</li> <li>2. Jumlah yang melakukan pelayanan langsung 100 orang / hari terdiri dari Perempuan 70 orang dan laki-laki 30 orang.</li> <li>3. Jumlah loket pelayanan langsung 3 loket, 1 petugas perempuan dan 2 petugas laki-laki.</li> <li>4. Jumlah petugas online 2 operator marawa dan 3 operator marawa nagari.</li> </ol> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>Akses :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasnya wilayah Kabupaten solok yang terdiri dari 74 Nagari dimana sebagian besar nagari terletak dilokasi yang jauh dari Pusat layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.</li> <li>- Terdapat beberapa wilayah yang tidak terjangkau akses internet.</li> <li>- Sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang representatif dalam menunjang pelayanan Publik.</li> </ul> <p><b>Partisipasi :</b></p> <p>Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan fasilitas pengurusan administrasi kependudukan secara online sehingga masih terdapat penumpukan antrian di loket pelayanan langsung Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Solok</p> <p><b>Kontrol :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya perhatian para pengambil kebijakan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik terutama menyangkut pengarusutamaan gender</li> </ul>



	<b>Manfaat :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh lapisan masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa harus datang ke disdukcapil Kab. Solok dan tidak mengganggu aktifitas hariannya tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama dan lebih hemat dari segi waktu dan biaya</li> <li>- Meningkatnya kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil</li> </ul> <b>a. Penyebab Internal :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah masyarakat dan dokumen yang akan di proses.</li> <li>2. Sarana dan prasarana penunjang yang tersedia masih kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.</li> <li>3. Kurangnya SDM dari segi kualitas dan kuantitas yang dapat memberikan pelayanan maksimal ke seluruh lapisan masyarakat.</li> </ol> <b>b. Penyebab Eksternal :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan.</li> <li>2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online.</li> <li>3. Banyaknya nagari yang lokasinya jauh dari pusat layanan disdukcapil Kab. Solok.</li> </ol>		
<b>PERENCANAAN KEGIATAN</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Tujuan</b>	Tersedianya kemudahan dan kenyamanan bagi semua lapisan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan baik secara online maupun pelayanan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<b>Aktifitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online kepada seluruh lapisan masyarakat untuk 74 Nagari</li> <li>- Melakukan pelayanan langsung jemput bola ke nagari-nagari atau kecamatan di seluruh wilayah Kab. Solok ( SIJARLA) serta terlaksananya inovasi predator ( perekaman dengan motor) khusus untuk kaum marjinal ( Lansia, ODGJ, Disabilitas dan Orang sakit)</li> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang lengkap demi nyaman seluruh lapisan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan</li> <li>- Meningkatkan kompetensi SDM melalui Bimtek tentang standar pelayanan Publik</li> </ul>
		<b>Sumber Daya ( Out Put )</b>	Dana : Rp. 814.641.500,-
			Panitia : DISDUKCAPIL
			Peserta : Perangkat Nagari, Perwakilan Masyarakat, Camat, Kepala OPD, KUA, Puskesmas, dan Pengadilan Agama

			<p>Sarana Prasarana : ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer, Konsumsi, Honor narasumber. Sarana Prasarana : ruang tunggu, area parkir, area bermain anak, toilet, dan ruang laktasi.</p>
		Out Come	<p><b>Rumusan kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya jumlah pelayanan secara online sehingga mengurangi daftar antrian di loket pelayanan offline</li> <li>- meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan</li> <li>- Terciptanya kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan ( Indeks Kepuasan Masyarakat)</li> <li>- meningkatnya kualitas pelayanan disdukcapil ( Indeks Kepuasan Masyarakat)</li> </ul> <p><b>Indikator Kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan online meningkat sebanyak 20%</li> <li>- Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap demi menunjang kenyamanan penduduk dalam melakukan pengurusan administrasi kependudukan di pusat layanan</li> </ul>
	<p><b>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Solok</b></p> <div style="text-align: center;">  <p><b><u>RICKY CARNOVA, S. STP,MM</u></b>  <b>Nip. 19810618 200112 1 002</b></p> </div>		



# MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROGRAM : PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBUAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	Indikator Kinerja
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	
<p><b>Program :</b> PENDAFTARAN PENDUDUK</p> <p><b>Kegiatan :</b> Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b> Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p>	<p>Jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil rata-rata 190 orang/ hari, terdiri dari :</p> <p>1. 100 orang yang melakukan pelayanan langsung ke Disdukcapil</p> <p>2. 90 Orang yang melakukan pelayanan secara online</p> <p>Jumlah Penduduk Kabupaten Solok 408.424 jiwa</p> <p>Rata-rata jumlah dokumen yang diterbitkan setiap bulannya adalah 8.500 dokumen</p>	<p><b>Akses :</b> Luasnya wilayah Kabupaten solok yang terdiri dari 74 Nagari dimana sebagian besar nagari terletak dilokasi yang jauh dari Pusat layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Terdapat beberapa wilayah yang susah akses internet seperti : Nagari pasilihan, Nagari Sarlak alahan tigo, Nagari garabak data, Nagari Sumiso, Nagari Aia Batumbuak, Nagari Aia Iuo, Nagari sungai abu</p>	<p>Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah masyarakat dan dokumen yang akan di proses</p> <p>Sarana dan prasarana penunjang yang tersedia masih kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas</p> <p>Kurangnya SDM dari segi kualitas dan kuantitas yang dapat memberikan pelayanan maksimal ke seluruh lapisan masyarakat</p>	<p>Masih Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan</p> <p>Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online</p>	<p>Memberikan kenyamanan kepada Seluruh lapisan Masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan baik secara online maupun pelayanan langsung</p> <p>Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang lengkap demi kenyamanan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan</p> <p>Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai demi menunjang pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat</p>	<p>Perlu diadakan sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online kepada seluruh lapisan masyarakat untuk 74 Nagari</p> <p>Melakukan pelayanan langsung jemput bola ke nagari-nagari atau kecamatan di seluruh wilayah Kab. Solok</p> <p>Pemberian informasi melalui media cetak dan media komunikasi</p>	<p>Jumlah nagari di Kabupaten Solok 74 nagari yang sebagian besar wilayahnya jauh dari pusat pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Arosuka.</p> <p>Jumlah pelayanan yang dilakukan setiap hari sebanyak 190 orang dengan total dokumen kurang lebih 400 layanan per hari</p>	<p>1. Sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online untuk 14 Kecamatan</p> <p>Input : Rp. 28.570.000,-</p> <p><b>Output :</b> Terlaksananya sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online untuk 14 kecamatan di Kab. Solok</p>

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	Indikator Kinerja
<b>Tujuan :</b>  Tersedianya kemudahan dan kenyamanan bagi semua lapisan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan baik secara online maupun pelayanan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Untuk pengurusan administrasi secara langsung didominasi oleh perempuan sekitar 70 % ( 100 orang). Dan laki-laki 30 % ( 30 orang)	sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang representatif untuk penunjang pelayanan Publik  Partisipasi :  Kurang nya partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan fasilitas pengurusan administrasi kependudukan secara online sehingga masih terdapat penumpukan antrian di loket pelayanan langsung Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Kurang nya sarana informasi baik cetak maupun elektronik  Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor	Banyaknya nagari yang lokasinya jauh dari pusat layanan disudikcapil Kab. Solok		Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memenuhi standar pelayanan publik  Meningkatkan kompetensi SDM melalui Bimtek tentang standar pelayanan Publik  Perlu adanya penambahan jumlah SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang menunjang kelancaran pelayanan Publik  Perlu dilaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait	Jumlah operator pelayanan 3 orang operator online, 3 orang operator offline	Outcome : meningkatnya jumlah pelayanan secara online sehingga mengurangi daftar antrian di loket pelayanan offline  2. Melakukan pelayanan langsung jemput bola ke nagari-nagari atau kecamatan di seluruh wilayah Kab. Solok ( SIJARLA) serta layanan predator untuk kelompok marginal ( disabilitas, lansia, ODGJ, orang sakit)
	Jumlah layanan kependudukan yang di proses setiap hari lebih kurang 400 layanan/hari  Jumlah loket dan petugas pelayanan terdiri dari : - Front office 5 orang  - loket pelayanan offline 3 loket ( 2 loket umum, 1 loket khusus untuk kelompok rentan )  - loket pelayanan Online 3 loket  - Petugas verifikasi dokumen online dan offline 2 orang	Kontrol : Kurang nya perhatian para pengambil kebijakan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik terutama menyangkut pengarusutamaan gender						Input : Rp. 438.237.000,-  Output : Terlaksananya pelayanan langsung di Nagari-nagari dengan menggunakan mobil pelayanan disudikcapil

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBUAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	Indikator Kinerja
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	
	<p>Terdapat beberapa wilayah yang susah akses internet seperti : Nagari pasilihan, Nagari Sarik alahan tigo, Nagari garabak data, Nagari Sumiso, Nagari Ala Batumbuk, Nagari Ala luo, Nagari sungai abu</p> <p>Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik</p> <p>Permendagri No. 19 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik</p>	<p><b>Manfaat :</b> Seluruh lapisan masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa harus datang ke disdukcapil Kab. Solok dan tidak mengganggu aktifitas hariannya tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama dan lebih hemat dari segi waktu dan biaya</p> <p>2. Meningkatnya kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil</p>						<p>Outcome : meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan</p> <p>3. Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memenuhi standar pelayanan publik</p> <p>Input : Rp. 319.264.500,- Output : Tersedianya sarana dan prasana lengkap yang memenuhi standar pelayanan publik</p> <p>Outcome : Terciptanya kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan</p>



LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	Indikator Kinerja
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	
								4 Meningkatkan kompetensi SDM melalui Bimtek tentang standar pelayanan Publik  Input : Rp. 28.570.000,-
								Output : Terlaksananya Bimbingan teknis peningkatan kompetensi SDM untuk pelayanan publik  Outcome : meningkatnya kualitas pelayanan disdukcapi

Arosuka, Juni 2024



**RICKY CARNOVA, S. STP, MM**  
NIP. 19810618 200112 1 002



<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER</b> <b>(GENDER BUDGET STATEMENT)</b>	
SKPD TAHUN ANGGARAN	: (Dinas Pertanian) : (2025)
PROGRAM	(Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian)
KODE PROGRAM	3.27.02
KEGIATAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000,-
HASIL/OUTPUT	1. Jumlah petani yang mengikuti bimbingan teknis GAP padi organik sebanyak 40 orang
ANALISIS SITUASI	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan</b>            Jumlah Penyuluh Pertanian : 77 orang            Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani            Laki-laki= 18.090 orang            Perempuan= 19.495 orang            Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari laki-laki            SK Penetapan Kelompok Tani</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>A. Faktor Kesenjangan</p> <p>a. Aspek Akses:-</p> <p>b. Aspek partisipasi: Pada keikutsertaan bimtek penyusunan SOP GAP kelompok tani lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki.</p> <p>c. Aspek kontrol:            Anggota kelompok tani lebih didominasi oleh perempuan</p> <p>B. Aspek manfaat: Manfaat bimbingan teknis GAP pada saat ini lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh Petani perempuan</p> <p>C. Penyebab Internal</p> <p>a. Masih kurangnya sosialisasi ke petani tentang penyusunan SOP GAP padi organik.</p> <p>D. Penyebab Eksternal:</p> <p>a. Laki-laki sebagai petani sebagian besar bekerja pada saat pengolahan tanah</p> <p>b. Perempuan sebagai petani juga sebagai pemilik lahan merupakan pengambil kebijakan untuk menentukan system budidaya padi</p>

RENCANA AKSI	Komponen 1	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		Tujuan	Meningkatkan pengetahuan petani tentang penyusunan SOP GAP padi organik.
		Alokasi Anggaran	Rp. 50.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Output dan dampak kegiatan yang memperlihatkan perbaikan kearah KKG (Diambil dari GAP langkah 9 ) Output 1. Jumlah petani yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan SOP padi organic (40 orang)  Outcome  Meningkatnya produktifitas komoditi pertanian		

Arosuka, 14 Juni 2024


  
Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Solok  
Dr. Kennedy Hamzah, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650727 199202 1 002

### GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DINAS PERTANIAN TAHUN 2025

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Kinerja Output
<b>Kegiatan:</b> <b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b> <b>Sub Kegiatan:</b> <b>Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ tanaman</b> <b>Tujuan Kegiatan:</b> <b>Meningkatkan pengetahuan petani tentang Budidaya padi</b>	<b>Jumlah Penyuluh Pertanian :</b> 77 orang  <b>Jumlah kelompok tani:</b> 1.782  <b>Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani</b>  <b>Laki-laki=</b> 18.090 orang  <b>Perempuan =</b> 19.495 orang	<b>Faktor kesenjangan:</b> 1. Aspek Akses:- 2. Aspek partisipasi: Pada pertemuan kelompok tani lebih sedikit laki-laki (26%) dibandingkan perempuan (80%) 3. Aspek kontrol: Anggota kelompok perempuan lebih banyak dari laki-laki	Masih kurangnya sosialisasi ke petani tentang penyusunan SOP GAP padi organik .	1. Laki-laki sebagai petani sebagian besar bekerja pada saat pengolahan tanah  2. Perempuan sebagai petani juga sebagai pemilik lahan merupakan pengambil kebijakan untuk menentukan system budidaya padi,	<b>Reformulasi tujuan</b>  Meningkatnya pengetahuan petani tentang penyusunan SOP GAP padi organik.	1. Meningkatkan pengetahuan petani tentang penyusunan SOP GAP padi organik dengan melaksanakan bimbingan teknis penyusunan SOP GAP padi organik komposisi peserta perempuan dan laki-laki 60 : 40)	<b>Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani</b>  <b>Laki-laki=</b> 18.090 orang  <b>Perempuan=</b> 19.495 orang  <b>Jumlah Penyuluh Pertanian</b> 77 orang	<b>Jumlah petani yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan SOP padi organik (40 orang) dengan anggaran Rp. 50.000.000</b>  <b>Outcome</b>  <b>Meningkatnya produktifitas komoditi pertanian</b>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
organik sesuai SOP Good Agriculture Practise (GAP)  Sasaran kegiatan:  Kelompok tani	SK Penetapan Kelompok tani	4. Aspek manfaat: Manfaat bimtek penyusunan SOP GAP lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh Perempuan						

Arosuka, 14 Juni 2024

  
 Kepala Dinas Pertanian  
 Kabupaten Solok  
 Drh. Nedy Hamzah, M.Si  
 Petubina Utama Madya/IVc  
 NIP. 19650727 199202 1 002



## GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

NAMA OPD  
TAHUN

: BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
: 2025

Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	
Anggaran Sub Kegiatan	Rp. 551,714,000,- ( Lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).	
Indikator Kinerja Kegiatan	Terpeliharanya sarana dan prasara gedung kantor dengan memperhatikan pengarusutamaan gender.	
Output Kegiatan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang responsive gender.	
Analisis Situasi	<p>Kurangnya ruang rapat yang responsive gender di kantor.</p> <p><b><u>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</u></b></p> <p><b>Akses :</b> Tidak memadainya ruang rapat untuk pegawai di lingkungan kantor BKD.</p> <p><b>Peran :</b> Kurang memadainya ruang rapat yang responsive gender.</p> <p><b>Kontrol :</b> Kurangnya pemahaman tim teknis dan perencana dalam membuat ruang rapat yang responsive gender.</p> <p><b>Manfaat :</b> Menciptakan kenyamanan ASN dan THL mengikuti rapat yang responsive gender.</p> <p><b><u>Penyebab Internal :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan.</li> <li>2. Kurangnya pemahaman tim teknis dan perencana dalam membuat ruang rapat yang responsive gender.</li> <li>3. Masih kurangnya koordinasi antara tim teknis perencana dan pengawas.</li> </ol> <p><b><u>Penyebab Eksternal :</u></b> Kurangnya SDM pengawas DPU tentang bangunan yang responsive gender.</p>	
Rencana Aksi	Kegiatan	1. Melaksanakan rehabilitasi pembuatan ruang rapat yang responsive gender.
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 190.980.000,- (Seratus sembilan puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	1. Ruang rapat yang responsive gender beserta sarana dan prasarananya.	

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

**INDRA GUSNADY, SE.M.Si**  
NIP. 19700804 199803 1 006

**8 GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK 7 JUN 2025**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan Yang Dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Program :</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  <b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  <b>Tujuan :</b> Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	1. Permen PU No 38 tahun 2007 dan PP. 6 tahun 2021 tentang bangunan Gedung.  2. Jumlah ASN dan THL 91 orang terdiri dari 45 orang perempuan dan 46 orang laki-laki.  3. Jumlah ruang rapat yang ada dengan ukuran 6 X 8 M.	<b>Akses :</b> Tidak memadainya ruang rapat untuk pegawai di lingkungan kantor BKD.  <b>Peran :</b> Kurang memadainya ruang rapat yang responsive gender.  <b>Kontrol :</b> Kurangnya pemahaman tim teknis dan perencanaan dalam membuat ruang rapat yang responsive gender.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan.  2. Kurangnya pemahaman tim teknis dan perencanaan dalam membuat membuat ruang rapat yang responsive gender.  3. Masih kurangnya koordinasi antara tim teknis perencanaan dan pengawas.	1. Kurangnya SDM pengawas DPU tentang bangunan yang responsive gender.	Meningkatkan perluasan ruang rapat beserta sarana dan prasarana yang responsive Gender.	1. Melaksanakan pembangunan Ruang rapat yang responsive gender.  2. Menambah toilet yang responsif gender.  3. Melaksanakan pembangunan ruang untuk sholat.  4. Meningkatkan koordinasi antara tim teknis perencanaan dan pengawas.	1. Jumlah ASN dan THL 91 orang terdiri dari 45 orang perempuan dan 46 orang laki- laki.	<b>Kegiatan</b> pemeliharaan ruang rapat responsive gender.  <b>Indikator:</b> Terlaksananya pemeliharaan ruang rapat yang responsive gender.  <b>Input :</b> Pemeliharaan ruang rapat yang responsive gender : Rp. 190.980.000,- (Seratus sembilan puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).  <b>Output:</b> Terpeliharanya ruang rapat yang responsive Gender dengan ukuran 6 X 13M beserta sarana dan prasarannya.

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**

  
**INDRA GUSNADY, SE.M.Si.**  
**NIP. 197008041998031006**



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Solok di Arosuka Telepon/Fax (0755) 31161  
Jalan Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos: 27364 Provinsi Sumatera Barat  
Telepon: (0755) 31161 – Fax: (0755) 31161

Arosuka, 31 Mei 2024

Yth. Kepala DPPKBP3A Kabupaten Solok  
di  
**Arosuka**

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor: 700.1.1/460-0/Bapelitbang-2024

No.	NASKAH DINAS/BARANG YANG DIKIRIMKAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Bahan dari Hasil Pelatihan PPRG yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024 bertempat di Ruang Pertemuan Perpustakaan Daerah Kabupaten Solok.	1 (satu) berkas	Bersama ini kami sampaikan Matrix Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).

Diterima tanggal .....  
Penerima .....  
Nama Jabatan, .....

Pengirim  
**KASUBAG PROGRAM,**

**ERİYANTO.S.Sos**  
NIP. 19740913 200701 1 004

( ..... )  
No. Telepon.....



### MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

**SKPD : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok (BAPELITBANG)**

Langkah 1	Langkah 2
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan
	<p>2025) terdiri dari 350 orang yang hadir antaranya 247 orang laki-laki dan 103 orang perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juknis Pelaksanaan Musrenbang.</li> <li>- Diketahui partisipasi perempuan sangat rendah dalam mengikuti Musrenbang, dapat dilihat dari perbandingan Absensi selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:</li> <li>- Tahun 2020 peserta Musrenbang RKPD 400 orang (345 Laki-laki dan 35 Perempuan)</li> <li>- Tahun 2021 peserta Musrenbang RKPD 250 orang (207 Laki-laki 43 Perempuan)</li> </ul>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER : Peserta Musrenbang Masih didominasi oleh laki-laki			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p><b>Program :</b> Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.</p> <p><b>Kegiatan :</b> Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b> Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota.</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan jumlah partisipan perempuan yang ikut andil untuk menggali isu-isu serta permasalahan strategis pembangunan daerah pada Musrenbang Tahun 2024 untuk penyusunan RKPD Tahun 2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional</li> <li>- Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Solok</li> <li>- Jumlah Peserta Musrenbang Tahun 2024 untuk penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah 300 Undangan terdiri dari:</li> </ul>	<p><b>Akses :</b> Karena untuk mengikuti Musrenbang Tahun 2024 (Penyusunan RKPD Tahun 2025), perlu memiliki wawasan yang luas dan pemikiran terbuka guna menggali isu-isu serta permasalahan strategis sehingga tercapainya pembangunan yang sesuai dengan visi-misi daerah dan tentunya berkualitas. Lokasi Musrenbang dilaksanakan di Ibukota Kabupaten Solok pada pusat Pemerintahan.</p> <p><b>Partisipasi :</b> Kurangminat perempuan untuk ikut andil dalam Musrenbang Tahun 2024 (Penyusunan RKPD Tahun 2025) dikarenakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas SDM masih kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.</li> <li>- Terbatasnya peserta Musrenbang Tahun 2024 untuk penyusunan RKPD Tahun 2024, hanya 3 perwakilan dari setiap instansi yang diundang.</li> <li>- Kurangnya Sosialisasi tentang Musrenbang.</li> <li>- Kurangnya Pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya dukungan keluarga / suami bagi perempuan untuk mengikuti musrenbang.</li> <li>- Partisipasi Masyarakat, Bundo Kanduang dan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024 untuk penyusunan RKPD Tahun 2025 masih kurang.</li> <li>- Faktor Geografis yang menghambat peserta perempuan untuk ikut musrenbang</li> </ul>	<p>Meningkatkan jumlah partisipan perempuan yang mengikuti Musrenbang Tahun 2024 (Penyusunan RKPD Tahun 2025) Kabupaten Solok.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Musrenbang Tahun 2024 (Penyusunan RKPD 2025) dengan baik dan sesuai sasaran.</li> <li>- Peningkatan jumlah dan kualitas SDM dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Verifikasi data melalui Forum SKPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Peserta Musrenbang Tahun 2024 untuk penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah 300 Undangan terdiri dari:</li> <li>- DPRD 4 orang (3 L/P 1)</li> <li>- Kapolres 1 orang (1 L/P 0)</li> <li>- Kodim 1 orang (1 L/P 0)</li> <li>- Kepala BPS 2 Orang (2 L/P 0)</li> <li>- Ketua TP-PKK Kabupaten Solok 1 Orang (0 L/P 1)</li> <li>- Asisten 3 orang (3 L/P 0)</li> <li>- Staf Ahli Bupati 2 Orang (2 L/P 0)</li> <li>- SKPD 180 orang (97 L/P 83)</li> <li>- Camat 14 orang (13 L/P 1)</li> </ul>	<p><b>Indikator Kinerja</b> Terlaksananya Musrenbang Tahun 2024 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2025</p> <p><b>Input</b> Rp. 202.381.430</p> <p><b>Output:</b> Terlaksananya Koordinasi Musrenbang RKPD Kabupaten.</p> <p><b>Outcome;</b> Persentase keselarasan dokumen RKPD ke dalam Dokumen RPJMD.</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER : Peserta Musrenbang Masih didominasi oleh laki-laki			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2022 Peserta Musrenbang RKPD 250 Orang (197 Laki-laki dan 96 orang perempuan)</li> <li>- Penyebab rendahnya minat perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD dikarenakan kesibukan ibu rumah tangga yang dikerjakan.</li> </ul>							

Arosuka, 21 Mei 2024  
**KEPALA BAPELITBANG**  
  
**Ir. DESMALIA RAMADHANUR**  
 Nip. 19671203 199403 2 003



PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD	: Bapelitbang Kabupaten Solok
TAHUN ANGGARAN	: 2024
PROGRAM	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
KODE PROGRAM	5.01.01
KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya Koordinasi Musrenbang RKPD Kabupaten
ANALISIS SITUASI	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.</li><li>✓ Peraturan Bupati Solok Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Solok.</li><li>✓ Jumlah undangan sebanyak 300 undangan.</li></ul> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender.</b></p> <p>➤ <b>Faktor Kesenjangan</b></p> <p>✓ <b>Akses.</b></p> <p>Karena untuk mengikuti Musrenbang Tahun 2024 (Penyusunan RKPD Tahun 2025), perlu memiliki wawasan yang luas dan pemikiran terbuka guna menggali isu-isu serta permasalahan strategis sehingga tercapainya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan visi-misi daerah dan tentunya berkualitas. Lokasi Musrenbang dilaksanakan di Ibukota Kabupaten Solok pada pusat Pemerintahan.</p> <p>✓ <b>Partisipasi.</b></p> <p>Kurangnya minat perempuan untuk ikut andil dalam Musrenbang Tahun 2024 (Penyusunan RKPD Tahun 2025) dikarenakan mayoritas yang berpartisipasi aktif dalam proses musyawarah sampai dengan pengambilan keputusan adalah laki-laki.</p> <p>✓ <b>Kontrol.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya pengawasan dari Perencana pada bidang PPEPD.</li><li>• Setiap Perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama dalam pengambilan putusan.</li><li>• Setiap yang diusulkan perempuan jarang yang langsung terpenuhi</li></ul> <p>✓ <b>Manfaat.</b></p> <p>Lebih berkualitasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah karena musyawarah untuk mufakat pada Musrenbang</p>



	<p>Tahun 2025 untuk Penyusunan RKPD Tahun 2025 tidak hanya didominasi oleh laki-laki (80%) tetapi juga dari perempuan (20%) yang diketahui mempunyai sensitivitas terhadap hal-hal kecil dan hal-hal yang bersifat detail (80%) jika dibandingkan dengan laki-laki sekitar (20%).</p> <p>✓ <b>Penyebab Internal.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kualitas SDM masih kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas</li><li>• Terbatasnya peserta Musrenbang Tahun 2024 untuk penyusunan RKPD Tahun 2024, hanya 3 perwakilan dari setiap instansi yang diundang.</li><li>• Kurangnya Pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektor.</li><li>• Masih kurangnya koordinasi antar bidang- bidang</li></ul> <p>✓ <b>Penyebab Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya dukungan keluarga / suami bagi perempuan untuk mengikuti musrenbang.</li><li>• Partisipasi Masyarakat, Bundo Kandung dan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024 untuk penyusunan RKPD Tahun 2025 masih kurang</li></ul>		
CAPAIAN PROGRAM	1. <b>Tolak Ukur</b> Meningkatkan jumlah partisipan perempuan yang mengikuti Musrenbang RKPD Kab. Solok		
	2. <b>Indikator dan Target Kinerja</b>  a. Terlaksananya Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2024. <u>Input:</u> Rp. 202.381.430,- <u>Output:</u> Terlaksananya Koordinasi Musrenbang RKPD Kabupaten  <u>Outcome:</u> Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan Dokumen RPJMD		
RENCANA AKSI	KOMPONEN 1	- Terlaksananya Musrenbang RKPD Kabupaten	
		Tujuan	Meningkatkan jumlah partisipan perempuan yang ikut andil untuk menggali isu-isu serta permasalahan strategis pembangunan daerah pada Musrenbang RKPD
		Alokasi Anggaran	Rp. 202.381.430,-

Arosuka, 21 Mei 2024

KEPALA BAPELITBANG

**Ir. DESMALIA RAMADHANUR**

NIP. 19871203 199403 2 003

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER ( GENDER BUDGET STATEMENT)			
SKPD	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok		
ALAMAT	: Jln. Raya Solok-Padang KM. 5 Koto Baru		
TAHUN	: 2025		
ANGGARAN			
PROGRAM	: Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		
KODE PROGRAM	:		
KEGIATAN	: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
SUB KEGIATAN	: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
HASIL/OUTPUT	Meningkatkan persentase IKM untuk menjadi IKM yang berkompeten		
ANALISIS SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data jumlah IKM yang ada di Kabupaten Solok.</li><li>2. Data jumlah IKM yang laki-laki</li><li>3. Data jumlah IKM yang perempuan</li><li>4. Data IKM yang aktif dan yang pasif</li></ol> <p><b>Akses:</b></p> <p>Belum semua IKM yang ada di Kabupaten Solok mau ikut menjadi IKM yang berkompeten</p> <p>Kurangnya minat IKM laki-laki mau ikut menjadi IKM yang berkompeten</p> <p><b>Partisipasi</b></p> <p>Masih rendahnya partisipasi IKM laki-laki yang mau menjadi IKM yang berkompeten</p> <p><b>Kontrol</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Masih rendahnya minat IKM yang laki-laki ikut menjadi IKM yang berkompeten</li></ul> <p><b>Manfaat</b></p> <p>DKUKMPP setiap tahun memfasilitasi IKM untuk menjadi IKM yang berkompeten</p>		
PERENCANAAN KEGIATAN	Rencana Aksi		
		Tujuan	Meningkatkan persentase IKM untuk menjadi IKM yang berkompeten
		Aktifitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk tim enumerator IKM per kecamatan</li><li>2. Sosialisasi ke IKM untuk mengingatkan akan pentingnya ikut menjadi IKM yang berkompeten</li><li>3. Pembinaan dan Koordinasi dengan SKPD terkait / lintas sektor.</li></ol>

			4. Peningkatan SDM ( Kualitas dan Kuantitas) dalam pembinaan terhadap IKM
		<b>Sumber Daya ( Out Put )</b>	Dana : Rp. 1.200.000.000,-,-
			Panitia : DKUKMPP
			Peserta : IKM
			Saran Prasarana : ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer.
		Out Come	<b>Rumusan Kinerja</b> Meningkatkan persentase IKM untuk menjadi IKM yang berkompeten <b>Indikator Kinerja</b> Pembinaan ke IKM dan meningkatkan kesadaran IKM untuk ikut menjadi IKM yang berkompeten demi kelangsungan produk kedepannya
	<b>KEPALA DINAS</b>  <b>AHPI GUSTA TUSRI, S.STP, M.Si</b> Pembina Utama Muda (IV.c) Nip. 19800414 199801 2 001		



# GAP (Gender Analysis Pathway)

SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok

Tahun : 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>PROGRAM :</b> Perencanaan dan Pembangunan Industri  <b>KEGIATAN :</b> Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota  <b>SUB. KEGIATAN:</b> Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	<b>Data Pembuka Wawasan</b>  Data Yang Dibutuhkan : 1. Data jumlah IKM yang ada di Kabupaten Solok. 2. Data jumlah IKM yang laki-laki 3. Data jumlah IKM yang perempuan 4. Data IKM yang aktif dan yang pasif	<b>Isu Gender</b>			<b>Kebijakan dan Rencana Ke Depan</b>		<b>Pengukuran Hasil</b>	
		<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	<b>Reformulasi Tujuan</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Data Dasar (Base-line)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
		<b>Akses:</b> Belum semua IKM yang ada di Kabupaten Solok mau menjadi IKM yang berkompeten  Kurangnya minat IKM laki-laki mau menjadi IKM yang berkompeten  <b>Partisipasi</b> Masih rendahnya partisipasi IKM laki-laki yang mau menjadi IKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kuantitas IKM laki-laki untuk menjadi IKM yang berkompeten</li> <li>Kurangnya minat IKM untuk menjadi IKM yang berkompeten karena kurang sadar akan pentingnya kualitas produk kedepannya</li> <li>Kurangnya pembinaan ke IKM karena munculnya IKM baru yang</li> </ul>	1. laki-laki cenderung lebih cepat bosan mengikuti pelatihan produk 2. Karena jauhnya jarak IKM ke tempat pelatihan 3. Menurunnya minat IKM yang aktif karena kurangnya promosi menyebabkan IKM yang gulung tikar	Meningkatkan persentase IKM untuk menjadi IKM yang berkompeten	1. Membentuk tim enumerator IKM per kecamatan 2. Sosialisasi ke IKM untuk mengingatkan akan pentingnya menjaga kualitas produk 3. Pembinaan dan Koordinasi dengan SKPD terkait / lintas sektor. 4. Peningkatan SDM ( Kualitas dan	1. IKM yang laki-laki dalam mengikuti pelatihan sebanyak 32,47 % (962 IKM) 2. IKM yang laki-laki sebanyak 67,52 % (2.000 IKM) 3. Jumlah IKM seluruhnya 2.962	1. Pembinaan ke IKM dan meningkatkan kesadaran IKM untuk ikut menjadi IKM yang berkompeten demi kelangsungan produk kedepannya  In put Membangkitkan semangat IKM yang laki-laki dalam mengikuti pelatihan

Term Of Reference (TOR) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2025

<b>TUJUAN :</b> <b>Meningkatkan persentase IKM untuk menjadi IKM yang berkompeten</b> <b>SASARAN :</b> <b>Pelaku Usaha yang Laki-laki</b>		Yang berkompeten <b>Kontrol</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya minat IKM yang laki-laki mau menjadi IKM yang berkompeten</li> </ul>	belum terdaftar di DKUKMPP			Kuantitas) dalam pembinaan terhadap IKM		Out Put Tersedianya daftar IKM yang akan digunakan sebagai acuan untuk pemberian pembinaan dan bantuan  3.pembinaan dan Koordinasi dengan SKPD terkait / lintas sektor.
		<b>Manfaat</b> DKUKMPP setiap tahun memfasilitasi IKM untuk menjadi IKM yang berkompeten						

# **FORMAT GBS** **PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok  
Tahun Anggaran : 2024

Program : Pengelolaan Persampahan  
Kode Program : 2.11.11.2.01.04  
Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan  
Output : Terlaksananya sosialisasi terhadap 125 orang

Analisis Situasi

1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilih Gender)
2. Data Jumlah Kader Yang akan mengikuti Sosialisasi 25 (Dua Puluh Lima) Orang per Lokasi Kegiatan .  
Perempuan 20 (Dua Puluh) Orang  
Laki-laki 5 (Lima) orang
3. Lokasi Tempat dilaksanakannya sosialisasi (sedang di Survey)
4. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
  1. Kesenjangan Partisipasi :
    - Kesenjangan dalam pengelolaan sampah rumah tangga, lebih banyak dikerjakan oleh perempuan yaitu lebih kurang 80 %
  2. Kesenjangan Manfaat :  
Dimana manfaat dari kegiatan ini lebih dirasakan oleh kaum perempuan
    - a. penyebab internal :
      1. Penyampaian Informasi kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik
      2. Maindset laki-laki terkait pengelolaan sampah rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan
    - b. Penyebab Eksternal :
      1. Setiap sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, pihak nagari lebih sering mengirim kader perempuan, karena kader laki-laki jumlah nya sedikit dan umumnya tidak aktif.
      2. Sarana pemilahan sampah organic dan non organic belum tersedia di rumah tangga

Rencana Aksi	Komponen	Tujuan	Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah (25 orang) per Lokasi Kegiatan
		Alokasi Anggaran	Rp. 37,588.200,-

Arosuka, Juni 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

  
**ASNUR, SH. M.M**  
NIP. 19681209 199312 2 001



**MATRIK**  
**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SOLOK**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga			Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
<b>Program :</b> Pengelolaan Persampahan  <b>Sub Kegiatan :</b> Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan  <b>Tujuan :</b> Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup  <b>Sasaran</b> Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga	Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah  Data informasi pengelolaan lingkungan hidup terkait antara lain :  Pemilahan pengoalahan Sampah di Bank sampah  Jumlah TP 3R di Kabupaten Solok ada 8 Lokasi	1. Sarana - Kurangnya sarana dalam pengelolaan sampah di masyarakat.  2. Partisipasi : - Kesenjangan dalam pengelolaan sampah rumah tangga lebih banyak dikerjakan oleh perempuan lebih kurang (80 %)  3. Kesenjangan dalam pengelolaan sampah rumah tangga lebih banyak dikerjakan oleh perempuan lebih kuran (80 %)	1. Kurangnya sosialisasi tentang Juknis pengelolaan sampah di Bank sampah  2. Kurangnya Jumlah petugas sampah  3. Kurangnya sarana informasi dan promosi (Liflet, Brosur , Baliho, Banner dan Media)  4. Kurangnya Koordinasi dengan lintas sektor  5. Penyampaian informasi kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik.  6. Masih kurangnya pemahaman Laki-laki terkait pengelolaan sampah rumah tangga menjadi	1. Masih kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah  2. Masih kurangnya pemahaman Masyarakat bahwa pengelolaan sampah rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan	Meningkatkan pemahaman pengelolaan sampah rumah tangga baik bagi laki laki maupun perempuan melalui bank sampah	1. Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga (25 orang) per lokasi kegiatan  2. Peningkatan sarana pemilahan sampah di rumah tangga  3. Pengadaan sarana informasi dan promosi (Liflet, Brosur , Baliho, Banner dan Media Sosial)  4. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dengan lintas sektor	1. Jumlah Bank sampah adalah sebanyak 15 total jumlah pengurus 150 orang  2. Jumlah TPA Regional di kabupaten Solok ada 1 Lokasi  3. Kelompok Jumlah TP3R di Kabupaten Solok ada 8 Lokasi	1. Sosialisasi pengelolaan sampah untuk tahun 2024 direncanakan di 6 lokasi di Kab. Solok sebanyak 150 orang Input Rp.85.489.000,-  Output : Terlaksananya sosialisasi terhadap 150 orang  Outcome : Meningkatnya Pemahaman pengelolaan sampah rumah tangga oleh masyarakat  1. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Kendaraan roda tiga 4 unit Untuk Becak Motor  Input Rp.180.000.000  Output :

			tanggungjawab perempuan					<p>Tersedianya sarana dan prasarana pengangkutan sampah</p> <p>Outcome: Meningkatnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah</p>
								<p>2. Rapat Koordinasi dengan lintas sektor untuk 100 Orang Input: Rp.4.000.000 Output ; Terlaksananya rapat koordinasi dengan lintas sektor</p> <p>Outcome : Terjalannya kejasama dan sinergitas yang intens dengan instansi lintas sektor.</p>

Arosuka, Juni 2024

  
 KEPALA DINAS  
 ASNUR, SH, M.M  
 NIP. 19681209 199312 2 001

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD TAHUN ANGGARAN	: (Dinas Pertanian) : (2025)
PROGRAM	(Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian)
KODE PROGRAM	3.27.02
KEGIATAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000,-
HASIL/OUTPUT	1. Jumlah petani yang mengikuti bimbingan teknis GAP padi organik sebanyak 40 orang
ANALISIS SITUASI	<p>1. <b>Data Pembuka Wawasan</b>            Jumlah Penyuluh Pertanian : 77 orang            Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani            Laki-laki= 18.090 orang            Perempuan= 19.495 orang            Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari laki-laki            SK Penetapan Kelompok Tani</p> <p>2. <b>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>A. Faktor Kesenjangan</p> <p>a. Aspek Akses:-</p> <p>b. Aspek partisipasi: Pada keikutsertaan bimtek penyusunan SOP GAP kelompok tani lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki.</p> <p>c. Aspek kontrol:            Anggota kelompok tani lebih didominasi oleh perempuan</p> <p>B. Aspek manfaat: Manfaat bimbingan teknis GAP pada saat ini lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh Petani perempuan</p> <p>C. Penyebab Internal</p> <p>a. Masih kurangnya sosialisasi ke petani tentang penyusunan SOP GAP padi organik.</p> <p>D. Penyebab Eksternal:</p> <p>a. Laki-laki sebagai petani sebagian besar bekerja pada saat pengolahan tanah</p> <p>b. Perempuan sebagai petani juga sebagai pemilik lahan merupakan pengambil kebijakan untuk menentukan system budidaya padi</p>



RENCANA AKSI	Komponen 1	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		Tujuan	Meningkatkan pengetahuan petani tentang penyusunan SOP GAP padi organik.
		Alokasi Anggaran	Rp. 50.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Output dan dampak kegiatan yang memperlihatkan perbaikan kearah KKG (Diambil dari GAP langkah 9 ) Output 1. Jumlah petani yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan SOP padi organik (40 orang)  Outcome Meningkatnya produktifitas komoditi pertanian		

Arosuka, 14 Juni 2024


  
Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Solok  
Beth Kenedy Hamzah, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650727 199202 1 002

### GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DINAS PERTANIAN TAHUN 2025

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Kinerja Output
<b>Kegiatan:</b> Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota <b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ tanaman <b>Tujuan Kegiatan:</b> Meningkatkan pengetahuan petani tentang Budidaya padi	Jumlah Penyuluh Pertanian : 77 orang  Jumlah kelompok tani: 1.782  Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani Laki-laki= 18.090 orang Perempuan = 19.495 orang	<b>Faktor kesenjangan:</b> 1. Aspek Akses:- 2. Aspek partisipasi: Pada pertemuan kelompok tani lebih sedikit laki-laki (20%) dibandingkan perempuan (80%) 3. Aspek kontrol: Anggota kelompok perempuan lebih banyak dari laki-laki	Masih kurangnya sosialisasi ke petani tentang penyusunan SOP GAP padi organik.	1. Laki-laki sebagai petani sebagian besar bekerja pada saat pengolahan tanah 2. Perempuan sebagai petani juga sebagai pemilik lahan merupakan pengambil kebijakan untuk menentukan system budidaya padi.	<b>Reformulasi tujuan</b> Meningkatnya pengetahuan petani tentang penyusunan SOP GAP padi organik	1. Meningkatkan pengetahuan petani tentang penyusunan SOP GAP padi organik dengan melaksanakan bimbingan teknis penyusunan SOP GAP padi organik komposisi peserta perempuan dan laki-laki 60 : 40)	Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani Laki-laki= 18.090 orang Perempuan= 19.495 orang  Jumlah Penyuluh Pertanian 77 orang	Jumlah petani yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan SOP padi organik (40 orang) dengan anggaran Rp. 50.000.000  <b>Outcome</b> Meningkatnya produktifitas komoditi pertanian

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
organik sesuai SOP Good Agriculture Practise (GAP)  Sasaran kegiatan:  Kelompok tani	SK Penetapan Kelompok tani	4. Aspek manfaat: Manfaat bimtek penyusunan SOP GAP lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh Perempuan						

Arosuka, 14 Juni 2024


 Kepala Dinas Pertanian  
 Kabupaten Solok  
 Drh. Nedy Hamzah, M.Si  
 Pembina Utama Madya/IVc  
 NIP. 19650727 199202 1 002



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GANDER BUDGET STATEMENT)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN ANGGARAN : 2025**

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER GANDER BUDGET STATMANET			
SKPD	: DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		
TAHUN ANGGARAN	: 2025		
PROGRAM	: Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja		
KODE PROGRAM	: 2.07.03		
KEGIATAN	: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi		
SUB KEGIATAN	: Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi		
HASIL/OUT PUT	: Meningkatnya tenaga kerja terampil, siap pakai dan mandiri secara berimbang antara laki-laki dan perempuan		
ANALISIS SITUASI	<p>1. <b>Data Pembuka Wawasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan</li> <li>Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan system Pelatihan Kerja Nasional di Daerah</li> <li>Masih banyaknya angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan yang dapat dilihat dari data Solok dalam Angka</li> </ul> <p><i>Angkatan Kerja Tahun 2023 : 234.887</i>  Laki-laki : 134.469  Perempuan: 100.418</p> <p><i>Yang Bekerja: 223.156</i>  Laki-laki: 131,613  Perempuan: 91,543</p> <p><i>Bukan angkatan kerja tahun 2022: 71,175</i></p> <p>Laki-laki : 18.770  Perempuan : 52.405</p> <p>2. <b>Isu dan Faktor kesenjangan Gender</b></p> <p><b>A</b> Faktor kesenjangan</p> <p>Akses : Jarak tempuh dari daerah domisili ke tempat kerja yang cukup jauh  Partisipasi : Belum meratanya kesempatan kerja bagi perempuan dibandingkan laki-laki</p> <p>Kontrol : Kurang nya dukungan keluarga  Manfaat : Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kompetensi atau keahlian dalam persaingan dunia kerja</p> <p><b>B</b> Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Instruktur yang ada</li> <li>2. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang representatif</li> </ol> <p><b>C</b> Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang nya minat dari angkatan kerja untuk menciptakan lapangan kerja mandiri dan masih banyak yang berharap untuk menjadi ASN</li> <li>2. Belum maksimalnya dukungan orang tua, keluarga, dan tokoh masyarakat</li> </ol>		
RENCANA AKSI	Komponen 1	Tujuan	Terdatanya minat pemuda pemudi/calon tenaga kerja Kab Solok melalui Tranning Need Analysis serta menyebarkan informasi Pelatihan-pelatihan yang ada di BLK
		Alokasi Anggaran	Rp. 196,893,488
		Total Anggaran	Rp. 196.893.488.-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	- Meningkatnya Kompetensi dan Keahlian Tenaga Kerja - Menurunnya Angka Pengangguran		

Kepala  
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Solok



Drs. ALIBER MULYADI  
NIP. 19661226 199403 1 005

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN 2025**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Program</b> Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	<b>Pembuka Data Wawasan 1.</b> Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan <b>2. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan system Pelatihan Kerja Nasional di Daerah</b> <b>3. Masih Banyaknya angkatan kerja yang belum belum bekerja yang dapat dilihat Data Solok dalam Angka</b> <b>4. Angka Pengangguran Terbuka sesuai dengan Kabupaten Solok dalam angka pada tahun 2023 mengalami penurunan 0,9% dari tahun sebelumnya</b>	<b>Isu Gender : Masih Tingginya Angka Pengangguran di kalangan Laki-laki</b>			<b>Kebijakan dan Rencana Aksi ke depan: Menurunnya Angka Pengangguran di kalangan Perempuan</b>		<b>Pengukuran Hasil</b>	
<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster Kompetensi		<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	<b>Reformulasi Tujuan</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Data Dasar ( Base Line )</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>Sub Kegiatan</b> Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	<b>Angkatan Kerja Tahun 2023 : 234,887</b>  Laki-laki : 134,469 Perempuan: 100.418	Akses : Jarak tempuh dari daerah domisili ke tempat kerja yang cukup jauh  Partisipasi : Kurang Minat bagi laki-laki dalam menciptakan lapangan usaha mandiri  Kontrol : Kurang nya dukungan keluarga dalam penciptaan	1. Masih Kurangnya Paket Pelatihan yang diadakan  2. Masih Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Instruktur yang ada  3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung di Balai Latihan Kerja	1. Masih adanya keinginan untuk bekerja sebagai pekerja dari pada menciptakan usaha kerja mandiri  2. Belum maksimalnya dukungan orang tua, keluarga, dan tokoh masyarakat	Meningkatnya Kompetensi dan keahlian angkatan kerja bagi semua angkatan kerja	1. Mendata minat Pemuda dan pemudi atau calon tenaga kerja melalui Trainning Need Analysis  2. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop yang diselenggarakan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2023 :  Laki-laki : 87,75 Perempuan : 65,71  Tingkat Pengangguran tahun 2023 : 4,99 Laki-laki : 2,12 Perempuan : 8,84 Jumlah Instruktur : 8 org Laki-laki: 3 org Perempuan: 5 org Yang sdh bersertifikat : 6 org	Pelaksanaan Tarinning Need Analysis serta penyebaran informasi tentang pelatihan - pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Sasaran Input : Rp. 196,893,488.- Out Put : Terlaksananya Training Need Analysis serta penyebaran informasi pelatihan-pelatihan Out Come : '- Terdatanya minat pemuda-pemudi calon tenaga kerja di kabupaten Solok Tersebaranya informasi Pelatihan-pelatihan yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) - Terlaksananya Paket pelatihan untuk meningkatkan lapangan usaha bagi laki-laki

Yang Bekerja: 223,156	lapangan usaha mandiri						
Laki-laki: 131,613	Manfaat :						
Perempuan: 91,543	Kurangnya pemahaman						
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2023 : 76,74	tentang pentingnya kompetensi atau keahlian dalam persaingan dunia kerja						
Laki-laki : 87,75							
perempuan : 65,71							
Tingkat Pengangguran tahun 2023 : 4,99							
Laki-laki : 2,12							
Perempuan : 8,84							

Arosuka, juni 2024  
Kepala  
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Solok



Drs. ALIBER MULYADI  
NIP: 19661226 199403 1 005



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN
TUJUAN	Meningkatkan ketersediaan akses jalan yang aman dan nyaman pada jalan muaro-garabak yang dapat digunakan bagi seluruh lapisan masyarakat (laki-laki, perempuan, lansia, anak-anak, dan kaum disabilitas)
KEGIATAN	Peningkatan Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan SARIK ALAHAN TIGO - SUNGAI ABU
KODE KEGIATAN	1.03.10.2.01.05
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <p>Pembangunan infrastruktur mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peningkatan perekonomian tersebut didukung dengan sarana prasana yang baik. Salah satu infrastruktur jalan yang belum layak dalam pembangunannya adalah pembangunan jalan pada sariak alahan tigo - sungai abu, Berdasarkan data yang ada, Panjang jalan adalah 8,01 km, dengan jalan kondisi baik sepanjang 6,473 km dan jalan kondisi sedang sepanjang 0,734 km. Dan dalam kondisi rusak berat 0,803 km.</p> <p>Dari data diatas 10,02% terdapat jalan yang rusak berat, maka pembangunan yang berkelanjutan dan kesesuaian dengan kaidah responsif gender belum bisa dirasakan pada masyarakat yang melalui jalan sarik alahan tigo - sungai abu. Jalan sarik alahan tigo - sungai abu terdapat jumlah Kepala Keluarga yang terdiri 5.270 KK penduduk berjumlah 4.332 jiwa yang terdiri dari laki-laki 789 orang dan perempuan 839 orang.</p> <p>2. Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>Pembangunan jalan sarik alahan tigo - sungai abu dalam rangka untuk memudahkan aksesibilitas dan mobilisasi seluruh lapisan masyarakat belum terlaksana secara optimal. Pada saat pembangunan infrastrukturnya, terdapat masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan karena beban kerja pekerjaan tersebut belum bisa dilaksanakan oleh kaum perempuan namun cenderung dilaksanakan oleh kaum laki-laki.</p> <p>Dan juga persepsi masyarakat membuat hal itu terjadi. Meskipun demikian partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan jalan tersebut sudah dinilai cukup baik, melalui kegiatan rembuk jorong maupun musrenbang. Tetapi faktor aspirasi masyarakat nagari garabak yang belum terakomodir dalam realisasi pembangunan menginginkan</p>

	<p>tuntasnya pembangunan jalan.</p> <p>3. Sebab Internal</p> <p>Tidak semua pengambil keputusan mampu memahami konsep kesetaraan dan keadilan gender. Akibatnya, masih kurangnya analisis gender dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk mengakomodasi pembangunan yang responsif gender, pemerintah melalui Surat Edaran Menteri PU Nomor : 13/SE/M/2013 tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender. Dan juga masih belum tersedianya media informasi terkait pembangunan infrastruktur yang reponsif gender.</p> <p>4. Sebab Eksternal</p> <p>Dalam proses pembangunan infrastruktur masih minimnya peran serta tokoh masyarakat, sehingga rendahnya swadaya masyarakat dalam hal pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini juga diperparah dengan letak geografis daerah Kab. Solok yang berada pada daerah rawan akan bencana. Sehingga akses daerah yang sulit dijangkau.</p>		
PERENCANAAN KEGIATAN	Rencana Aksi	Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan sariak alahan tigo - sungai abu.	
		Tujuan	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan untuk menunjang akses mobilitas bagi seluruh lapisan masyarakat yang responsif gender
		Aktifitas	1. Pembangunan jalan yang responsif gender
			2. Penyusunan Juknis tentang pembangunan sarana, prasarana, pembangunan jalan dan jembatan yang responsif gender
			3. Meningkatkan koordinasi lintas sektorserta memonitoring dan evaluasi pembangunan jalan
		Sumber daya	Dana : 4.100.000.000
		Indikator Output	Jalan yang terbangun dan termanfaatkannya= 2 Km  Juknis yang tersusun = 1 juknis  Koordinasi yang terlaksana = 3 kali
DAMPAK / MANFAAT	Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan sariak alahan tigo - sungai abu dari		

(OUTCOME)	Jalan Kondisi Baik	= 6,473 Km
	Jalan Kondisi Sedang	= 0,734 km
	Jalan Kondisi Rusak Ringan	= - Km
	Jalan Kondisi Rusak Berat	= 0,803 Km
	Menjadi 2 Km kondisi jalan mantap yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang responsif gender.	

Aro Suka, Juni 2024  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
KABUPATEN SOLOK



EFFIA VIVI FORTUNA AD, ST, MM  
NIP. 19711205 199703 2 006



**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

KEBIJAKAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESEJANGKAPAN	SEBAB INTERNAL	SEBAB EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASE-LINE DATA	INDIKATOR KINERJA
Program Pembangunan Jalan	Surat Edaran 4 Menteri: No.270/M.PPH/II/2012 No. SE 33/MK.02/2012 No. 050/4379A/2012.	<b>Akses :</b> Masih Belum optimalnya akses jalan yang memadai, aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat	1. Belum adanya infrastruktur jalan yang memadai, aman dan responsif gender bagi semua kalangan masyarakat	1. Masih rendahnya peran tokoh masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan untuk menunjang akses mobilitas bagi seluruh lapisan masyarakat yang responsif gender	1. Pembangunan jalan yang responsif gender	Ruas Jalan Berada pada Kecamatan Hiliran Gumanti dengan Jenis Kelamin L: 4.745 P: 9254 dengan total 5.770. Panjang jalan yang dibutuhkan 0,803 km	1. Pembangunan jalan yang responsif gender Jalan SARIK ALAHAN TIGO - SUNGAI ABU Input : 4 MILYAR Outcome : 2 km Panjang jalan terbangun yang responsif gender untuk mobilitasi seluruh lapisan masyarakat
Kegiatan : Peningkatan Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan SARIK ALAHAN TIGO - SUNGAI ABU	No. SE-46/MPP-PA/II/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).							
Tujuan: Meningkatkan ketersediaan akses jalan yang aman dan nyaman pada jalan sarik alahan tigo - sungai abu yang dapat digunakan bagi masyarakat Sasaran : Seluruh lapisan masyarakat (laki-laki, perempuan, lansia, anak-anak, dan kaum disabilitas)	Surat Edaran Menteri PU Nomor : 13/SE/M/2013 tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender. Permen PU No. 9 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan	Partisipasi : Untuk pembangunan jalan partisipasi laki laki lebih dominan ( 99%) dibandingkan perempuan (1%). Masih minimnya partisipasi kaum wanita dalam menyuarakan perencanaan pembangunan jalan (P-20%) (1-80%)	2. Belum adanya Juknis tentang pembangunan sarana, prasarana, pembangunan jalan dan jembatan yang responsif gender	2. Rendahnya swadaya masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur		2. Penyusunan Juknis tentang pembangunan sarana, prasarana, pembangunan jalan dan jembatan yang responsif gender	Panjang jalan yang 8,01 km Jalan Kondisi baik ( 6,473 Km ) Jalan Kondisi Sedang (0,734 Km) Jalan Kondisi Rusak Ringan ( 0 Km) Jalan Kondisi Rusak Berat (0,803 Km)	2. Penyusunan Juknis tentang pembangunan sarana, prasarana, pembangunan jalan dan jembatan yang responsif gender  Input : Rp. 50.000.000.- Output : Jumlah Juknis yang tersusun Outcome : 95 % pemahaman pembangunan jalan
	Ruas Jalan Berada pada Kecamatan Hiliran Gumanti dengan Jenis Kelamin L: 4.745 dan P: 4509 dengan total 9.254.	Kontrol : Belum Terakomodirnya seluruh aspirasi masyarakat akan pembangunan infrastruktur jalan dalam terealisasi sesuai kebutuhan (tuntan)	3. Belum Optimalnya koordinasi dengan OPD terkait dan lintas sektor	3. Akses daerah yang sangat jauh sehingga sulit dijangkau oleh tim		3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor serta monitoring dan evaluasi pembangunan jalan		3 Meningkatkan koordinasi lintas sektor serta monitoring dan evaluasi pembangunan jalan  Input : 50.000.000.- Output : Jumlah koordinasi yang terlaksana antar OPD dan Lintas Sektor (3x pertemuan) Outcome : Terbangunnya koordinasi dan konsultasi lintas sektor
	Panjang jalan yang 8,01 km Jalan Kondisi baik ( 6,473 Km ) Jalan Kondisi Sedang (0,734 Km) Jalan Kondisi Rusak Ringan ( 0 Km) Jalan Kondisi Rusak Berat (0,803 Km)  Banyak Hari Hujan dan Jumlah Curah Hujan Pada Kecamatan Hiliran Gumanti. Banyak Hujan (Hari)= 157, Jumlah Curah Hujan (mm) = 2.921	Manfaat : Belum termanfaatkannya dengan baik infrastruktur jalan secara optimal karena tidak tuntasnya pembangunan infrastruktur		4 Letak geografis daerah lab. solok yang berada pada daerah rawan akan bencana				

Aro Suka, Juni 2024  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN SOLOK

**EFFIA VIVI FORTUNA AD ST.MM**  
NIP. 19711203 199703 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
(BKPSDM)

Jalan Raya Solok – Padang Km. 20 Arosuka- Kode Pos : 27364 Provinsi Sumatera Barat  
Telp / Faks (0755) 31337 Website : [www.bkd.kabsolok.com](http://www.bkd.kabsolok.com) E-mail : [bkd\\_kabsolok@yahoo.co.id](mailto:bkd_kabsolok@yahoo.co.id)

Arosuka, 11 Juni 2024

Kepada,  
Yth. Ibu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga  
Berencana dan Pemberdayaan Penduduk dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Solok  
di  
Arosuka

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : 800/038/BKPSDM-2024

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>General Budget Statement</i> (GBS) Tahun 2025	1 Dokumen	Demikian kami sampaikan kepada Bapak/Ibu untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya, terima kasih.

KEPALA



**AFRIALDI, SE, MM**  
NIP. 19750429 199403 1 002



**KAMI BERTEKAT MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK**  
- Masyarakat Bangga Pada Usaha dan Daerahnya, Bertakwa, Berakhlak, Berbudi Luhur dan Berdisiplin  
- Perantau Bangga Pada Kampung Halamannya  
- Aparat Bangga Dalam Pengabdianya

<b>Capaian Program</b> (di level kegiatan)	<b>Output :</b> Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Eselon III (PKA) <b>Outcome :</b> Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
---	--

Arosuka, 11 Juni 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**AFRIALDI, SE.MM**

NIP. 19750429 199403 1 002



**GENDER BUDGET STATEMENT**  
**(Pernyataan Anggaran Gender)**

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
TAHUN : 2025

<b>Program</b>	Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>Kode Program</b>	5.04.02
<b>Kegiatan</b>	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
<b>Sub Kegiatan</b>	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
<b>Output Kegiatan</b>	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Eselon III (PKA)
<b>Analisis Situasi</b>	<p><b>1. <u>Data Pembuka Wawasan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai amanat pada PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagai mana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN menyebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan administrator (eselon III) adalah memiliki kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.</li> <li>- Peraturan LAN No.16 Tahun 2019 yang sudah diubah dengan Peraturan LAN No 7 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan LAN No. 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).</li> <li>- Jumlah ASN yang menduduki jabatan eselon III sebanyak 146 orang terdiri dari 47 orang perempuan dan 99 laki-laki, dan yang telah mengikuti diklat PIM Tk. III (PKA) sebanyak 48 orang, terdiri dari 36 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Jadi eselon III yang belum mengikuti Diklat PIM Tk. III (PKA) adalah <b>sebanyak 98 orang, terdiri dari 63 orang laki-laki dan 35 orang perempuan.</b></li> <li>- Data pelaksanaan diklat di Kabupaten Solok terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 dengan peserta diklat sebanyak 40 orang terdiri dari 30 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Karena adanya wabah Covid-19 diklat tidak dilaksanakan selama 4 tahun. Dan kembali dilaksanakan pada tahun 2022 dengan peserta 2 orang laki-laki. Pada tahun 2023 diikuti oleh 6 orang, terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.</li> </ul> <p><b>2. <u>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</u></b></p> <p><b>Isu :</b> Kurangnya Partisipasi Pejabat eselon III bergender perempuan mengikuti Diklat PIM Tk. III (PKA)</p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan</b></p> <p><b>Akses :</b> Kurangnya sarana dan prasarana tempat penitipan bayi/ anak bagi peserta Diklat PIM III(PKA) perempuan.</p> <p><b>Partisipasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat struktural eselon III yang perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Laki-laki sebanyak 67,8 % sedangkan perempuan sebanyak 32,2%.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari seluruh pejabat eselon III diatas yang sudah mengikuti Diklat PIM III (PKA) baru 48 orang (32,87 %) terdiri dari 36 orang laki-laki (75 %) dan 12 orang perempuan (25 %).</li> <li>- Yang belum mengikuti Diklat sebanyak 98 orang (67,12 %) terdiri dari 63 orang laki-laki (64,28 %) dan 35 orang perempuan (35,72 %) Lebih Sedikit Pejabat Eselon III perempuan yang bersedia ikut diklat kepemimpinan (PKA).</li> <li>- Lebih Sedikit Pejabat Eselon III perempuan yang bersedia ikut diklat kepemimpinan (PKA).</li> </ul> <p><b>Kontrol :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya evaluasi ASN yang sudah mengikuti Diklat oleh pengambil kebijakan pengawasan oleh pengambil keputusan/ kebijakan terhadap evaluasi ASN yg sdh mengikuti diklat.</li> <li>- Belum disyarat bagi PNS sebelum menduduki jabatan eselon III.</li> </ul> <p><b>Manfaat:</b> Tidak terdapat kesenjangan manfaat antara peserta Diklat PIM III (PKA) yang laki-laki maupun yang perempuan</p> <p><b>b. Penyebab Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya kualitas SDM pejabat eselon III khususnya yang perempuan</li> <li>- Belum optimalnya pembinaan kepada pejabat eselon III yang perempuan</li> <li>- Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait (lintas sektor).</li> <li>- Terbatasnya kuota peserta untuk mengikuti PIM Tk. III (PKA) dari penyelenggara.</li> </ul> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sarana prasarana (tempat penitipan bayi, ibu menyusui, tempat bermain anak) di tempat terselenggaranya Diklat karena Pola Diklat adalah pengiriman Peserta (Pola Kontribusi)</li> <li>- Kurangnya dukungan keluarga terhadap pejabat eselon III perempuan untuk mengikuti diklat.</li> </ul>	
<b>Rencana Aksi</b>	<b>Komponen / Aktifitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Diklat PIM Tk. III (PKA) untuk pejabat eselon III (perempuan dan laki-laki) melalui pola kontribusi.</li> <li>- Meningkatkan pembinaan ke pejabat eselon III perempuan.</li> <li>- Menambah jumlah kuota sesuai kebutuhan</li> <li>- Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait (lintas sektor)</li> <li>- Mengkoordinasikan peningkatan sarana dan prasarana dengan PSDM Regional Bukittinggi di baso</li> </ul>
	<b>Total Anggaran</b>	<p>Rp.5.992.181.087,-  (Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah)  Sedangkan untuk diklat PKA sebanyak  Rp.2.263.800.000 (Uang Kontribusi, Uang Harian, Transport, Mentor, Representatif)</p>



**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN SOLOK**  
**TAHUN 2025**

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender :			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data	Indikator Kerja
<b>Program:</b> Pengembangan Sumber Daya Manusia  <b>Kegiatan:</b> Sertifikasi, kelengkapan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional  <b>Sub Kegiatan:</b> Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan  <b>Tujuan:</b> Meningkatkan Kompetensi ASN (pejabat struktural eselon III) yang responsif gender dalam rangka memenuhi Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok	Sesuai amanat pada PP Nomor 11 Tahun 2017, sebagai mana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN menyebutkan bahwa salah satu persyaratan, untuk diangkat dalam jabatan administratif (eselon III) adalah memiliki kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan  Peraturan LAN No 16 Tahun 2019 yang sudah diubah dengan Peraturan LAN No 7 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan LAN No 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	<b>Akses:</b> Kurangnya sarana dan prasarana tempat penitipan bayi/ anak bagi peserta Diklat PIM III (PKA) perempuan.  <b>Partisipasi:</b> Pejabat struktural eselon III yang perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Laki-laki sebanyak 67,8 % sedangkan perempuan sebanyak 32,2%  Dari seluruh pejabat eselon III diatas yang sudah mengikuti Diklat PIM III (PKA) baru 48 orang (32,87 %) terdiri dari 36 orang laki-laki (75 %) dan 12 orang perempuan (25 %)  Yang belum mengikuti Diklat sebanyak 98 orang (67,12 %) terdiri dari 63 orang laki-laki (64,28 %) dan 35 orang perempuan (35,72 %)	Masih kurangnya kualitas SDM pejabat eselon III khususnya yang perempuan  Belum optimalnya pembinaan kepada pejabat eselon III yang perempuan  Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait (lintas sektor)  Terbatasnya kuota peserta untuk mengikuti PIM Tk. III (PKA) dari penyelenggara	Kurangnya sarana prasarana (tempat penitipan bayi, ibu menyusui, tempat bermain anak) di tempat terselenggaranya Diklat karena Pola Diklat adalah pengiriman Peserta (Pola Kontribusi)  Kurangnya dukungan keluarga terhadap pejabat eselon III perempuan untuk mengikuti diklat	Mengembangkan Kompetensi seluruh ASN (seluruh pejabat struktural eselon III baik laki-laki maupun perempuan) yang responsif gender dalam rangka memenuhi Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok  Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait (lintas sektor)	Melaksanakan Diklat PIM Tk. III (PKA) untuk pejabat eselon III (perempuan dan laki-laki) melalui pola Kontribusi  Meningkatkan pembinaan ke pejabat eselon III perempuan  Menambah jumlah kuota sesuai kebutuhan  Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait (lintas sektor)	Jumlah ASN yang menduduki jabatan eselon III sebanyak 146 dan yang telah mengikuti diklat PIM Tk. III sebanyak 48 orang jadi eselon III yang belum mengikuti Diklat PIM Tk. III adalah sebanyak 98 orang  <b>Input:</b> Rp.5.992.181.000,- (Include PKN, PKA, PKP dan Prajabatan)	1. Terlaksananya Diklat PIM III (PKA) untuk pejabat eselon III yang responsif gender melalui pola kontribusi sebanyak 98 orang  2. Melakukan pembinaan ke pejabat eselon III perempuan  3. Menambah jumlah kuota sesuai kebutuhan



LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender : Kurangnya Partisipasi Pejabat eselon III bergender perempuan mengikuti Diklat PIM Tk. III (PKA)			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data	Indikator Kerja
	<p>Jumlah ASN yang menduduki jabatan eselon III sebanyak 146 orang terdiri dari 99 orang perempuan dan 47 laki-laki, dan yang telah mengikuti diklat PIM Tk. III (PKA) tahun ini sebanyak 48 orang, terdiri dari 36 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Jadi eselon III yang belum mengikuti Diklat PIM Tk. III (PKA) adalah sebanyak 98 orang yaitu 63 orang laki-laki dan 35 orang perempuan.</p> <p>Data pelaksanaan diklat di Kabupaten Solok terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 dengan peserta diklat sebanyak 40 orang terdiri dari 30 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Karena adanya wabah Covid-19 diklat tidak dilaksanakan selama 4 tahun. Dan kembali dilaksanakan pada tahun 2022 dengan peserta 2 orang laki-laki. Pada tahun 2023 diikuti oleh 6 orang, terdiri dari 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.</p>	<p>Lebih Sedikit Pejabat Eselon III perempuan yang bersedia ikut diklat kepemimpinan (PKA)</p> <p><b>Kontrol:</b> Masih kurangnya evaluasi ASN yang sudah mengikuti Diklat oleh pengambil kebijakan pengawasan oleh pengambil keputusan/ kebijakan terhadap evaluasi ASN yg sdh mengikuti diklat.</p> <p>Belum disyarat bagi PNS sebelum menduduki jabatan eselon III</p> <p><b>Manfaat:</b></p>	Belum memenuhi syarat kepegawaian untuk diklat PIM (PKA) internal			Mengkoordinasikan peningkatan sarana dan prasarana dengan PSOM regional tertinggi di Raso		<p>Sedangkan untuk diklat PKA sebanyak Rp. 2.263.800.000 (Uang Kontribusi, Uang Makan, Transport, Mentor Representatif)</p> <p><b>Output:</b> Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pejabat Eselon III (PKA)</p> <p><b>Outcome:</b> Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</p>

Krosaki, 2024  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SOLOK



**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK**  
**TAHUN 2024**

<b>Program</b>	Program Informasi dan Komunikasi Publik
<b>Kode Program</b>	2.16.02
<b>Analisis Situasi</b>	<p>Data Pembuka</p> <p>1. Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers</p> <p>2. Media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.</p> <p>3. Keterwakilan perempuan dalam profesi wartawan dan konten informasi yang disebarkan masih belum seimbang. Dimana jumlah media/wartawan yaitu sebanyak 94 orang dengan rincian 72,34% laki-laki dan 27,66% perempuan</p> <p>4. Meningkatkan representasi perempuan sebagai wartawan dan dalam konten informasi yang disebarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok</p>
	<p><b>Faktor Kesenjangan</b></p> <p><b>Akses :</b> Perempuan memiliki akses yang terbatas untuk menjadi wartawan dan berkontribusi dalam informasi yang disebarkan</p> <p><b>Partisipasi :</b> Partisipasi perempuan dalam profesi wartawan masih rendah</p> <p><b>Kontrol:</b> Perempuan memiliki kendali yang terbatas dalam mengatur konten informasi</p> <p><b>Manfaat :</b> Manfaat dari informasi yang disebarkan belum merata bagi perempuan</p>
	<p><b>Kesenjangan Internal</b> Tradisi yang masih kuat dalam memilih pemimpin dan kebijakan internal yang belum mendukung kesetaraan gender.</p> <p><b>Kesenjangan Eksternal</b> 1. Norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan dalam profesi wartawan dan media 2. Tuntutan industri media yang belum inklusif terhadap perempuan</p>
<b>Capaian Program</b>	<p><b>Tolak Ukur :</b> Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat perempuan dalam profesi wartawan dan konten informasi yang disebarkan</p> <p><b>Capaian Program :</b> Peningkatan jumlah wartawan perempuan</p>
<b>Jumlah Anggaran</b>	Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)
<b>Rencana Aksi</b>	<p>1. Memberikan ruang yang setara bagi wartawan perempuan dalam penyusunan berita..</p> <p>2. Mendorong media untuk memiliki kebijakan redaksi yang inklusif gender.</p> <p><b>Masukan :</b> Rp.2.000.000.000,-</p> <p><b>Keluaran :</b> Persentase konten informasi yang mencerminkan keberagaman gender</p> <p><b>Hasil :</b> Perubahan persepsi masyarakat tentang peran dan kontribusi wartawan perempuan dalam penyediaan informasi</p>

Arosuka, Juni 2024  
Kepala  
  
**TETA MIDRA, S.STP, S.Si**  
NIP 19821022 200112 2 001

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK**  
**TAHUN 2024**

**SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN KOMUNIKASI**

Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan Yang Dianalisis	Data Pemuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan Pemerintahan : Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers	<i>Akses: Perempuan memiliki akses yang terbatas untuk menjadi wartawan dan berkontribusi dalam informasi yang disebarkan</i>	Tradisi yang masih kuat dalam memilih pemimpin dan kebijakan internal yang belum mendukung kesetaraan gender.	1. Norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan dalam profesi wartawan dan konten informasi dan media	1. Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat perempuan dalam profesi wartawan dan konten informasi yang disebarkan.	1. Memberikan ruang yang setara bagi wartawan perempuan dalam penyusunan berita.	Keterwakilan perempuan dalam profesi wartawan dan konten informasi yang disebarkan masih belum seimbang. Dimana jumlah media/wartawan yaitu sebanyak 94 orang dengan rincian 72,34% laki-laki dan 27,66% perempuan	Indikator : Peningkatan jumlah wartawan perempuan
Program: Informasi dan Komunikasi Publik	2. Media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.	<i>Partisipasi : Partisipasi perempuan dalam profesi wartawan masih rendah.</i>		2. Tuntutan industri media yang belum inklusif terhadap perempuan	2. Mendorong media cetak, online, dan elektronik untuk lebih inklusif dalam memuat informasi yang mewakili perempuan.	2. Mendorong media untuk memiliki kebijakan redaksi yang inklusif gender.		Input : Rp. 2.000.000.000
Kegiatan : Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten	3. Keterwakilan perempuan dalam profesi wartawan dan konten informasi yang disebarkan masih belum seimbang. Dimana jumlah media/wartawan yaitu sebanyak 94 orang dengan rincian 72,34% laki-laki dan 27,66% perempuan	<i>Kontrol: Perempuan memiliki kendali yang terbatas dalam mengatur konten informasi.</i>						Output : Persentase konten informasi yang mencerminkan keberagaman gender
Sub kegiatan: Relasi Media	4. Meningkatkan representasi perempuan sebagai wartawan dan dalam konten informasi yang disebarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.	<i>Manfaat : Manfaat dari informasi yang disebarkan belum merata bagi perempuan.</i>						Outcome: Perubahan persepsi masyarakat tentang peran dan kontribusi wartawan perempuan dalam penyediaan informasi
Tujuan : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik								





**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK**  
**TAHUN 2024**

<b>Program</b>	Program Informasi dan Komunikasi Publik
<b>Kode Program</b>	2.16.02
<b>Analisis Situasi</b>	<p>Data Pembuka</p> <p>1. Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers</p> <p>2. Media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.</p> <p>3. Keterwakilan perempuan dalam profesi wartawan dan konten informasi yang disebarkan masih belum seimbang. Dimana jumlah media/wartawan yaitu sebanyak 94 orang dengan rincian 72,34% laki-laki dan 27,66% perempuan</p> <p>4. Meningkatkan representasi perempuan sebagai wartawan dan dalam konten informasi yang disebarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok</p>
	<p><b>Faktor Kesenjangan</b></p> <p><b>Akses :</b> Perempuan memiliki akses yang terbatas untuk menjadi wartawan dan berkontribusi dalam informasi yang disebarkan</p> <p><b>Partisipasi :</b> Partisipasi perempuan dalam profesi wartawan masih rendah</p> <p><b>Kontrol:</b> Perempuan memiliki kendali yang terbatas dalam mengatur konten informasi</p> <p><b>Manfaat :</b> Manfaat dari informasi yang disebarkan belum merata bagi perempuan</p>
	<p><b>Kesenjangan Internal</b> Tradisi yang masih kuat dalam memilih pemimpin dan kebijakan internal yang belum mendukung kesetaraan gender.</p> <p><b>Kesenjangan Eksternal</b> 1. Norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan dalam profesi wartawan dan media 2. Tuntutan industri media yang belum inklusif terhadap perempuan</p>
<b>Capaian Program</b>	<p><b>Tolak Ukur :</b> Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat perempuan dalam profesi wartawan dan konten informasi yang disebarkan</p> <p><b>Capaian Program :</b> Peningkatan jumlah wartawan perempuan</p>
<b>Jumlah Anggaran</b>	Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)
<b>Rencana Aksi</b>	<p>1. Memberikan ruang yang setara bagi wartawan perempuan dalam penyusunan berita..</p> <p>2. Mendorong media untuk memiliki kebijakan redaksi yang inklusif gender.</p> <p><b>Masukan :</b> Rp.2.000.000.000,-</p> <p><b>Keluaran :</b> Persentase konten informasi yang mencerminkan keberagaman gender</p> <p><b>Hasil :</b> Perubahan persepsi masyarakat tentang peran dan kontribusi wartawan perempuan dalam penyediaan informasi</p>

Arosuka, Juni 2024  
Kepala  
  
**TETA MIDRA, S.STP, S.Si**  
NIP 19821022 200112 2 001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2024

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN KOMUNIKASI

Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan Yang Dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan Pemerintahan : Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers	Akses : Perempuan memiliki akses yang terbatas untuk menjadi wartawan dan berkontribusi dalam informasi yang disebarkan	Tradisi yang masih kuat dalam memilih pemimpin dan kebijakan internal yang belum mendukung kesetaraan gender	1. Norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan dalam profesi wartawan dan media	1. Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat perempuan dalam profesi wartawan dan konten informasi yang disebarkan	1. Memberikan ruang yang setara bagi wartawan perempuan dalam penyusunan berita	Keterwakilan perempuan dalam profesi wartawan dan konten informasi yang disebarkan masih belum seimbang. Dimana jumlah media/wartawan yaitu sebanyak 94 orang dengan rincian 72,34% laki-laki dan 27,66% perempuan	Indikator : Peningkatan jumlah wartawan perempuan
Program: Informasi dan Komunikasi Publik	2. Media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat	Partisipasi : Partisipasi perempuan dalam profesi wartawan masih rendah		2. Tuntutan industri media yang belum inklusif terhadap perempuan	2. Mendorong media cetak, online, dan elektronik untuk lebih inklusif dalam memuat informasi yang mewakili perempuan	2. Mendorong media untuk memiliki kebijakan redaksi yang inklusif gender		Input : Rp 2.000.000.000
Kegiatan : Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten	3. Keterwakilan perempuan dalam profesi wartawan dan konten informasi yang disebarkan masih belum seimbang. Dimana jumlah media/wartawan yaitu sebanyak 94 orang dengan rincian 72,34% laki-laki dan 27,66% perempuan	Kontrol : Perempuan memiliki kendali yang terbatas dalam mengatur konten informasi						Output : Persentase konten informasi yang mencerminkan keberagaman gender
Sub kegiatan: Relasi Media	4. Meningkatkan representasi perempuan sebagai wartawan dan dalam konten informasi yang disebarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok	Manfaat : Manfaat dari informasi yang disebarkan belum merata bagi perempuan						Outcome: Perubahan persepsi masyarakat tentang peran dan kontribusi wartawan perempuan dalam penyediaan informasi
Tujuan : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik								

Aratunka, Juni 2024  
Kepala  
  
TEL: 0822 200112 2 001  
NIP: 19821022 200112 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jalan Raya Solok - Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat  
Email : inspektoratdaerahkab.solok@gmail.com

**SURAT PENGANTAR**

No. 900 /344 /INSP-D/2024

Kepada Yth : Bapak Sekretaris Daerah  
C.q. Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Solok.  
di  
Koto Baru.

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Inspektorat Daerah Tahun 2025	2 (dua) Berkas	

Arosuka 3 Juni 2024  
INSPEKTUR DAERAH,  
DERY AKMAL, ST  
Pembina (IV.a)  
NIP. 19840414 201101 1 010



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)  
INSPEKTORAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM KODE PROGRAM	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 6.01.02	
	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH X.XX.01	
ANALISIS SITUASI	1	Inspektorat dalam menjalankan fungsinya berkewajiban melakukan Review dan Monev terhadap PPRG guna memberi keyakinan bahwa OPD telah melakukan proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.	
	2	Guna terselenggaranya Review dan Monev PPRG yang berkualitas perlu ditingkatkan dan pemerataan kemampuan APIP dalam melaksanakan Review dan Monev PPRG.	
	3	Dalam upaya peningkatan kapasitas bagi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dilingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, APIP perempuan merasa kesulitan untuk mengikuti Bimtek / Diklat yang dilaksanakan diluar kantor selama sehari-hari.	
		Isu dan Faktor Kesenjangan gender	
	1	PPRG belum dilaksanakan secara baik sesuai standar yang diharapkan oleh masing-masing OPD.	
	2	APIP perempuan merasa kesulitan mengikuti diklat/bimtek jika dilaksanakan diluar kota yang mengharuskan mereka meninggalkan keluarga untuk beberapa waktu.	
CAPAIAN PROGRAM		Tolok Ukur	
	1	Terlaksananya Review, Monev PPRG, Bimtek PPRG, Sharing Informasi PPRG Pelaksanaan Pelatihan Mandiri di Kantor Sendiri secara berkala.	
	2	Tersedianya makan minum untuk penyelenggaraan Pelatihan Kantor Mandiri	
		Indikator dan target Kinerja	
	1	Terlaksananya review PPRG bagi OPD sampel Terlaksananya Monev PPRG Pertriwulan Terikutinya kegiatan Bimtek PPRG Terlaksananya sharing Informasi terkait PPRG	
	2	Terlaksananya pelatihan kantor mandiri	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM		Rp. 26.340.000,- (Dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)	
RENCANA AKSI	Sub Kegiatan 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Masukan : Dana, Rp. 26.340.000,- Keluaran : 1 Review PPRG (20 OHP @150.000 = Rp. 3.000.000) 2 Monev PPRG (4 x 20 OHP @ 150.000 = Rp. 12.000.000,- 3 Bimtek PPRG ( 2 OHP @ 150.000 = 300.000) 4 Konsultasi / Sharing informasi (6 OH @340.000) = Rp. 2.040.000 Hasil : Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan 2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Masukan Dana, Rp. 9.000.000,- Keluaran 12 Kali Pelatihan Mandiri di Kantor Sendiri a Makan Minum Rp 9.000.000 Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	

Prostuka, 2 Juni 2024  
INSPEKTUR DAERAH  
DERY AKMAL, ST.  
Rembina (B/a)  
NIP. 19840414 201101 1 010

**MATRIX GENDER ANALYSIS PATHWAYS (GAP)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2025**

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NAMA KEBIJAKAN / PROGRAM / KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASIS DATA	INDIKATOR KINERJA
Program: 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Review PPRG, Monev PPRG, Bimtek PPRG, Sharing Informasi PPRG Tujuan 1. Mengetahui apakah PPRG dilaksanakan sesuai standar atau aturan  2. Mengetahui apakah pelaksanaan PPRG mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan  3. Mengidentifikasi hal-hal penting bagi tindak lanjut atau pengembangan kebijakan dimasa yang akan datang	1. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan  2. Permen P3A No 10 Tahun 2004 terkait dengan pengawasan dan evaluasi PPRG menyatakan bahwa Inspektorat berperan melakukan pengawasan PPRG  3. Pemeriksaan belum menyentuh terhadap substansi pelaksanaan PPRG pada masing-masing sub kegiatan yang tercantum di GAP dan GBS  4. Sasaran pengawasan PPRG adalah sebanyak 26 OPD	Akses: APIP berperan melakukan Review dan Monev PPRG guna memberi keyakinan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh OPD telah responsif gender  Partisipasi: Masing-masing OPD berkewajiban menyusun PPRG, review dan monev per triwulan yang dilakukan terhadap OPD sampel  Kontrol: Perlu melaksanakan review dan monev PPRG yang lebih berkualitas dengan peningkatan kapabilitas APIP  Manfaat: Didapatkan rekomendasi pelaksanaan PPRG sesuai standar yang diharapkan pada masing-masing OPD	1. APIP belum secara merata mendapatkan pelatihan / Bimbingan Teknis terkait pelaksanaan Review PPRG  2. Keterbatasan personil, waktu dan anggaran dalam pelaksanaan review dan Monev	1. Masih kurangnya pemahaman serta rendahnya komitmen OPD dalam pengarusutamaan gender dalam proses penganggaran  2. Penyusunan GAP dan GBS belum dianggap sebagai kebutuhan tapi masih sebatas pemenuhan laporan  3. Persepsi bahwa PPRG hanya menjadi kepentingan OPD yang menangani urusan gender	1. Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada masing-masing OPD di Kabupaten Solok  2. Terjadinya peningkatan pemahaman dan kompetensi APIP secara merata dalam melaksanakan review dan monev PPRG	1. Pelaksanaan Review dan Monev PPRG terhadap OPD Sampel  2. Mengikuti Bimtek, konsultasi / sharing informasi tentang PPRG	Ketersediaan personil dan anggaran di Inspektorat Daerah untuk pelaksanaan review, Monev PPRG dan peningkatan kapabilitas APIP dalam melaksanakan review PPRG	Output: Terlaksananya review dan monev PPRG terhadap OPD Sampel serta mengikuti bimtek dan sharing informasi  Outcome: Meningkatnya kualitas pelaporan review PPRG serta peningkatan kapabilitas APIP dalam pelaksanaan review PPRG




LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NAMA KEBIAYAAN / PROGRAM / KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	FAKTOR KESENJANGAN	ISU GENDER SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	KEBUAKAN DAN RENCANA KEDEPAN REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	PENGUKURAN HASIL BASIS DATA	INDIKATOR KINERJA
<p>2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Tujuan</p> <p>1. Terperuhnya pemenuhan peningkatan kapasitas bagi APIP lingkup Inspektorat Kab. Solok secara lebih merata dan akomodatif terhadap kepentingan perempuan</p> <p>2. Memberikan kesempatan yang sama bagi APIP untuk mengikuti peningkatan kapasitas serta mengakomodasi kesulitan APIP perempuan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan diluar kota / provinsi</p>	<p>1. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan bagi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang dan bersifat dinamis, perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi APIP Inspektorat daerah secara berkala</p> <p>2. Setiap APIP berkepentingan mengikuti kegiatan peningkatan kapabilitas APIP</p>	<p>Akses: Masing-masing APIP memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapabilitas</p> <p>Partisipasi: APIP perempuan biasanya kesulitan dalam mengikuti bimbingan teknis / diklat meninggalkan rumah selama sehari-hari dengan pertimbangan keluarga.</p> <p>Kontrol: Perlu ditetapkan suatu mekanisme agar terjadi pemerataan kesempatan dan kemudahan bagi perempuan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapabilitas.</p> <p>Manfaat: Terjadinya pemerataan kesempatan dan terpenhinya kebutuhan peningkatan kapabilitas APIP</p>	<p>Perempuan sebagaimana kodratnya sebagai Ibu, sangat berperan dan berfungsi dalam sebuah rumah tangga. pelaksanaan diklat/bimtek diluar kantor selama sehari-hari meninggalkan keluarga akan mengganggu peran dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga.</p>	<p>Pelaksanaan Diklat/Bimtek umumnya dilaksanakan diluar kota sehingga mengharuskan peserta meninggalkan rumah untuk beberapa waktu</p>	<p>Perlu melaksanakan suatu mekanisme peningkatan kapasitas APIP dengan memperluas kesempatan bagi peserta serta kemudahan bagi perempuan untuk mengikuti Diklat / Bimtek dengan tidak terlalu mengganggu peran dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga</p>	<p>Mengagendakan secara berkala pelaksanaan Pelatihan kantor mandiri berlokasi dikantor sendiri dengan memperluas kesempatan secara merata</p>	<p>Ketersediaan anggaran dan kegiatan pendukung untuk pelaksanaan pelatihan mandiri di kantor sendiri</p>	<p>Terlaksananya pelatihan mandiri di kantor sendiri secara berkala</p>


 Solok, 3 Juni 2024  
 INSPEKTUR DAERAH  
 DERY AKMAL, ST.  
 Pembina (IV a)  
 NIP. 19840414 201101 1 010



**GENDER BUDGET STATEMENT  
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**

PROGRAM	DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
KEGIATAN	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
KODE REKENING	4.02.02.2.01.0002
Analisis Situasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Deta Pembuka Wawasan <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Ranperda yang dibahas sebanyak 6 Ranperda</li> <li>Jumlah Anggota DPRD yang membahas, Perempuan 3 orang dan laki-laki 32 orang.</li> <li>Jumlah Sekretariat yang mendampingi, perempuan sebanyak 5 orang dan laki-laki 10 orang.</li> </ul> </li> <li>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender <ul style="list-style-type: none"> <li>Akses : Kesempatan/peluang bagi kaum perempuan dari berbagai bidang dipersulit karena budaya patriaki, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan Pendidikan</li> <li>Partisipasi : Peran serta perempuan dari berbagai bidang masih susah karena kesempatan bagi perempuan masih terbatas oleh sebab budaya patriaki.</li> <li>Kontrol : Harus ada aturan/Undang-undang yang dapat memberi kesempatan/Peluang bagi kaum perempuan sama besar dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang.</li> <li>Manfaat : Aturan kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang profesional / berkeadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bidang.</li> </ul> </li> <li>Penyebab Kesenjangan Internal <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih Kurangnya pemahaman pengambil kebijakan terkait isu gender</li> <li>Masih kurangnya SDM Aparatur yang merata secara gender</li> <li>Masih Kurangnya sosialisasi ttg perencanaan yang responsif gender</li> <li>Masih kurangnya koordinasi lintas sektor</li> </ul> </li> <li>Penyebab Kesenjangan Eksternal <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya anggapan di masyarakat bahwa perempuan makhluk lemah, emosional dan tidak tahan banting.</li> <li>Budaya Patriaki yang masih hidup di masyarakat yang menetapkan kaum laki-laki mempunyai prioritas yang lebih tinggi.</li> </ul> </li> </ol>
Capaian Program	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tolak Ukur : Terlaksananya pembahasan yang tepat waktu</li> <li>Indikator dan Target Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</li> </ol>
Jumlah Anggaran Program/Kegiatan	Rp. 426.666.000,-
Rencana Aksi	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 6 Dokumen Hasil : Jumlah Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda sebanyak 6 Perda
	<p style="text-align: right;">Arosuka, Mei 2024</p> <p style="text-align: center;"><b>SEKRETARIS DPRD</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>Dr. ZAITUL IKHLAS, AP, MSI</b> NIP. 197301251994021001</p>

# MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Sekretariat DPRD

PROGRAM : Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER :	Kurangya kesempatan bagi perempuan dalam mengikuti pembahasan Ranperda (Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD)		KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basia Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
<p><b>Program : Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD</b></p> <p><b>Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</b></p> <p><b>Tujuan : Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</b></p> <p><b>Sasaran : DPRD</b></p>	<p>- Jumlah Ranperda/Materi yang dibahas 6 Ranperda</p> <p>- Jumlah DPRD yang membahas, Pr. 3 orang Lk. 32 orang</p> <p>- Jumlah Sekretariat yang mendampingi Pr. 5 orang Lk. 10 orang</p>	<p><b>Akses :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesenjangan/peluang bagi kaum perempuan dari berbagai bidang diperoleh karena budaya patriarki, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.</li> </ul> <p><b>Partisipasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran serta perempuan dari berbagai bidang masih susah karena kesempatan bagi perempuan masih terbatas oleh sebab budaya patriarki.</li> </ul> <p><b>Kontrol :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus ada aturan/Undang-undang yang dapat memberi kesempatan/Peluang bagi kaum perempuan sama besar dengan kaum laki – laki dalam berbagai bidang.</li> </ul> <p><b>Manfaat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aturan kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang profesional / berkeadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bidang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pemahaman pengambil kebijakan terkait isu gender</li> <li>- SDM Aparatur yang belum merata secara gender</li> <li>- Belum tersosialisasikan isu kesetaraan gender yang memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya anggapan di masyarakat bahwa perempuan makhluk lemah, emosional dan tidak tahan banting.</li> <li>- Budaya Patriarki yang masih hidup di masyarakat yang menetapkan kaum laki-laki mempunyai prioritas yang lebih tinggi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam pembahasan Ranperda (Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menciptakan suasana pembahasan yang nyaman</li> <li>- Kerjasama Tim</li> <li>- Pendampingan yang tepat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Ranperda yang dibahas (3 tahun terakhir) sebanyak 15 Ranperda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Ranperda Tahun ini yang dibahas 6 Ranperda</li> <li>- Keterlibatan peranan aktif seluruh Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD tanpa membedakan Gender</li> </ul> <p><b>Input:</b></p> <p><b>Rp</b> 3,070,765,900</p> <p><b>Output:</b></p> <p>Jumlah Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda sebanyak 6 Dokumen</p> <p><b>Outcome :</b></p> <p>Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</p>



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)  
DINAS PERIKANAN PANGAN  
TAHUN 2025**

PROGRAM	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
KODE PROGRAM		3.25.04
ANALISIS SITUASI	1	Dinas Perikanan dan Pangan dalam menjalankan fungsinya berkewajiban melakukan pengembangan kapasitas untuk pembudidaya ikan guna memberikan keyakinan bahwa OPD telah melakukan proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
	2	Dalam upaya pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, terkendala dg situasi adanya norma sosial yg membatasi perempuan dalam mengerjakan sesuatu dan belum maksimalnya dorongan orang tua keluarga dan tokoh terkait
		isu dan faktor kesenjangan gender
	1	Adanya norma sosial yang membatasi perempuan dalam mengerjakan sesuatu
	2	Belum maksimalnya dorongan orang tua, keluarga dan tokoh terkait
CAPAIAN PROGRAM		Tolak Ukur
	1	Meningkatnya kualitas SDM pembudidaya ikan dalam Cara Budidaya dan Pembenihan Ikan yang baik
		Indikator dan Target Kinerja
	1	Terlaksananya pelatihan serta pembinaan terhadap pembudidaya ikan
	2	Terlaksananya pembinaan pembudidaya ikan yang dilatih dan diberikan informasi
	3	Terdatanya jumlah pembudidaya yang bersertifikasi CBIB/CPIB di Kabupaten Solok
		Tersebar nya informasi produksi perikanan yang bersertifikat CBIB/CPIB
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM		Rp. 30.715.550,- (Tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah)
RENCANA AKSI		Sub Kegiatan 1
		Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
	Masukan	: Dana Rp. 30.715.550,-
	Keluaran	: Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas
	Hasil	: Jumlah pembudidaya ikan yang dilatih dalam budidaya dan peningkatan daya saing usaha perikanan

Koto Baru, 4 Juni 2024  
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Kepala,  
  
Ir. SYOUFIRI, M.M.  
NIP. 19701115 200502 2 002



GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)  
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN  
KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2025

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender : Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam usaha perikanan			Kebijakan dan Rencana Kedepan : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha perikanan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data	Indikator Kerja
<b>Program:</b> Program Pengelolaan Perikanan Budaya  <b>Kegiatan:</b> Pembudayaan Pembudidaya Ikan Kecil  <b>Sub Kegiatan:</b> Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil  <b>Tujuan:</b> Terperuhnya jaminan mutu pada usaha perikanan Peningkatan Produksi perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49 Tahun 2014 tentang usaha pembudidayaan ikan</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.35 Tahun 2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik</li> <li>Masih banyaknya pelaku budidaya yang belum memperoleh sertifikat CBIB / CPB</li> <li>Pelaku usaha perikanan tahun 2024 Laki laki : 1730 Perempuan : 410</li> </ul>	<b>Akses:</b> Bentuk kerja yang lebih memerlukan tenaga  <b>Partisipasi:</b> Belum merata kesempatan kerja bagi perempuan dibandingkan laki laki  <b>Kontrol:</b> Kurangnya dukungan keluarga  <b>Manfaat:</b> meningkatkan kompetensi dan keahlian pelaku usaha perikanan dan meningkatnya jumlah produksi yang berkualitas dan bermutu tinggi	Kurangnya kualitas dan kuantitas pelaku usaha perikanan  Kurangnya sarana dan prasarana yang representatif	Adanya norma sosial yang membatasi perempuan dalam mengerjakan sesuatu  Belum maksimalnya dorongan orang tua, keluarga dan tokoh terkait	Meningkatkan kualitas SDM pembudidaya ikan dalam Cara Budidaya dan Pembenihan Ikan Yang Baik	Sosialisasi dan Memberikan penyuluhan bagaimana dan apa itu CBIB/CPB  Mendata jumlah pembudidaya ikan dalam upaya memetakan kesempatan kerja bagi perempuan dan laki laki  Menambah jumlah kuota peserta pelatihan dan anggarannya  Meningkatkan koordinasi dengan kelompok pembudidaya ikan	Jumlah Partisipasi pelaku usaha perikanan : Laki laki 80,84% dan Perempuan 19,16%	Pelaksanaan pelatihan serta pembinaan terhadap pembudidaya ikan  <b>Input</b> Rp.30.715.550,- (Anggaran Tahun 2024) Rp. 30.715.550,- (Anggaran Tahun 2025)  <b>Output</b> Terlaksananya pembinaan pembudidaya ikan yang dikaji dan diberikan informasi  <b>Outcome :</b> Terdapatnya jumlah pembudidaya yang bersertifikat CBIB/CPB di Kabupaten Solok  Tersedianya informasi produksi perikanan yang bersertifikat CBIB/CPB



**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)  
DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2025**

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NAMA KEBIJAKAN / PROGRAM KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Factor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base- Line)	Indikator Kinerja
<b>Program:</b> Program Rehabilitasi Sosial  <b>Kegiatan:</b> Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial  <b>Sub Kegiatan</b>	Permensos No. 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial potensi dan sumber kesejahteraan sosial  Jenis PPKS berdasarkan Permensos No.8 Tahun 2012 terdiri dari 26 Jenis	<b>AKSES</b> Belum tersedianya Akses Lansia dan Anak Terlantar untuk mendapatkan Pelayanan Kebugaran Jasmani  Belum tersedianya Pelajaran Bimbingan Rohani untuk Anak terlantar Laki-laki.  <b>PARTISIPASI</b> Lansia terlantar	1) , Kurangnya kesadaran diri Lansia Terlantar untuk mengikuti kegiatan Kebugaran Jasmani  2) Kurangnya Kesadaran diri Anak Terlantar untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Rohani  3) Lansia Terlantar dan Anak Terlantar merasa kegiatan Bimbingan	Belum adanya analisa kebutuhan dalam penyusunan program kegiatan.  Tidak adanya (bimbingan lanjutan) terhadap kegiatan dimaksud.	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan dari Lansia Terlantar dan Anak Terlantar tentang Pentingan Bimbingan Jasmani dan Rohani baik laki- laki maupun perempuan	1) . Akan dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Kebugaran Jasmani untuk Lansia Terlantar  2) Akan dilaksanakan kegiatan Bimbingan Rohani untuk Anak Terlantar  2).Pelaksanaa n Kegiatan Bimbingan Kebugaran	Pelaksanaan Bimbingan Kebugaran Jasmani dan Bimbingan Rohani dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun yang yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok dengan peserta sebanyak: - Lansia Terlantar sebanyak 20 Orang - Anak Terlantar sebanyak 30 Orang	Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kebugaran Jasmani dan Kegiatan Bimbingan Rohani sesuai Analisa Kebutuhan Rp. 85.000.000  <b>Output :</b> -Lansia Terlantar yang mengikuti kegiatan Kebugaran Jasmani -Anak Terlantar yang mengikuti kegiatan



<p>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial.</p> <p><b>Tujuannya:</b> Meningkatkan wawasan dan pengetahuan Jumlah PPKS Terhadap Bimbingan Fisik melalui kegiatan Kebugaran Jasmani dan Kegiatan Bimbingan Rohani</p>	<p>Dari 26 Jenis ada 2 Jenis PPKS yaitu:</p> <p>1) Anak Terlantar</p> <p>2) Lanjut Usia Terlantar</p> <p>Pelaksanaan Bimbingan Fisik melalui kegiatan Kebugaran Jasmani ditujukan kepada Lansia Terlantar</p> <p>Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Rohani ditujukan kepada Anak Terlantar</p> <p>Jumlah Lansia Terlantar yang mengikuti kegiatan Kebugaran Jasmani 20 Orang</p>	<p>perempuan lebih berminat mengikuti kegiatan Kebugaran Jasmani</p> <p>Anak Terlantar perempuan lebih berminat mengikuti kegiatan Bimbingan Rohani</p> <p><b>KONTROL</b></p> <p>Masih rendahnya Pengawasan Keluarga terhadap Lansia Terlantar tentang Pentingnya kebugaran Jasmani</p> <p>Masih rendahnya pengawasan Orangtua terhadap anak terlantar tentang pentingnya</p>	<p>Kebugaran Jasmani dan kegiatan Bimbingan Rohani tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dirinya.</p>			<p>Jasmani dan Bimbingan Rohani sesuai analisa kebutuhan</p>		<p>Bimbingan Rohani</p> <p><b>Outcome :</b></p> <p>-Pelaksanaan Kegiatan Kebugaran Jasmani dan Bimbingan Rohani</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	---



	Pelaksanaan Bimbingan Jasmani dan Bimbingan Rohani dilaksanakan 2 kali dalam setahun	Bimbingan Rohani  <b>MANFAAT</b> Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan serta kesehatan Lansia Terlantar dan Anak Terlantar tentang Pentingnya Kegiatan Kebugaran Jasmani dan Bimbingan Rohani.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Arosuka, 3 Juni 2024  
Kepala Dinas Sosial



**MUEIADI MARCOS, S.E, M.M**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720303 199202 1 001

# GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD TAHUN ANGGARAN	: DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK : Tahun Anggaran 2025
PROGRAM	REHABILITASI SOSIAL
KODE PROGRAM	1.06.04
KEGIATAN	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
SUB KEGIATAN	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
ANALISIS SITUASI	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permensos No. 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial potensi dan sumber kesejahteraan sosial.</li> <li>• Jenis PPKS berdasarkan Permensos No. 8 Tahun 2012 terdiri dari 26 Jenis.</li> <li>• Dari 26 Jenis PPKS ada 2 jenis yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Anak Terlantar</li> <li>2) Lanjut Usia Terlantar</li> </ol> </li> <li>• Pelaksanaan Bimbingan Kebugaran Jasmani kepada Lansia Terlantar sebanyak 20 Orang dan Bimbingan Rohani kepada Anak Terlantar sebanyak 30 Orang dilaksanak 2 Kali dalam satu tahun.</li> </ul> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lansia Terlantar dan anak terlantar perempuan memiliki minat yang tinggi dibandingkan dengan lansia terlantar laki-laki dan anak terlantar laki-laki untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Kebugaran Jasmani dan Bimbingan Rohani</li> </ul> <p><b><u>PARTISIPASI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lansia Terlantar perempuan lebih berminat mengikuti kegiatan Bimbingan Kebugaran Jasmani</li> <li>- Anak Terlantar perempuan lebih berminat mengikuti kegiatan Bimbingan Rohani</li> </ul>

	<p><b><u>KONTROL</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya Pengawasan Keluarga terhadap Lansia Terlantar tentang Pentingnya Kegiatan Bimbingan Kebugaran Jasmani</li> <li>- Masih rendahnya pengawasan Orangtua terhadap anak terlantar tentang pentingnya Kegiatan Bimbingan Rohani.</li> </ul> <p><b><u>MANFAAT</u></b></p> <p>Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan serta kesehatan Lansia Terlantar dan Anak Terlantar tentang Pentingnya Kegiatan Kebugaran Jasmani dan Bimbingan Rohani</p> <p><b>b. Penyebab Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kesadaran diri Lansia Terlantar untuk mengikuti kegiatan kebugaran jasmani</li> <li>- Kurangnya kesadaran diri anak terlantar untuk mengikuti kegiatan bimbingan rohani</li> <li>- Lansia Terlantar dan Anak Terlantar merasa kegiatan bimbingan kebugaran jasmani dan kegiatan bimbingan rohani tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dirinya.</li> </ul> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya analisa kebutuhan dalam penyusunan program kegiatan</li> <li>- Tidak adanya (bimbingan lanjutan) terhadap kegiatan dimaksud</li> </ul>		
	<table border="1"> <tr> <td><b>Komponen</b></td><td>Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Kebugaran Jasmani dan Kegiatan Bimbingan Rohani sesuai Analisa Kebutuhan</td></tr> </table>	<b>Komponen</b>	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Kebugaran Jasmani dan Kegiatan Bimbingan Rohani sesuai Analisa Kebutuhan
<b>Komponen</b>	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Kebugaran Jasmani dan Kegiatan Bimbingan Rohani sesuai Analisa Kebutuhan		
	<table border="1"> <tr> <td><b>Input</b></td><td>Rp. 85.000.000</td></tr> </table>	<b>Input</b>	Rp. 85.000.000
<b>Input</b>	Rp. 85.000.000		
	<table border="1"> <tr> <td><b>Output</b></td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lansia Terlantar yang mengikuti kegiatan kebugaran jasmani</li> <li>- Anak terlantar yang mengikuti kegiatan bimbingan rohani</li> </ul> </td></tr> </table>	<b>Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lansia Terlantar yang mengikuti kegiatan kebugaran jasmani</li> <li>- Anak terlantar yang mengikuti kegiatan bimbingan rohani</li> </ul>
<b>Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lansia Terlantar yang mengikuti kegiatan kebugaran jasmani</li> <li>- Anak terlantar yang mengikuti kegiatan bimbingan rohani</li> </ul>		
	<table border="1"> <tr> <td><b>Outcome</b></td><td>Pelaksanaan Kegiatan Kebugaran Jasmani dan Bimbingan Rohani</td></tr> </table>	<b>Outcome</b>	Pelaksanaan Kegiatan Kebugaran Jasmani dan Bimbingan Rohani
<b>Outcome</b>	Pelaksanaan Kegiatan Kebugaran Jasmani dan Bimbingan Rohani		
<p><b>CAPAIAN PROGRAM</b> (di level kegiatan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Pendataan Lansia Terlantar dan Anak Terlantar yang akan mengikuti kegiatan kebugaran jasmani dan kegiatan bimbingan rohani.</i></li> <li>2. <i>Analisa Kebutuhan yang berhubungan dengan Kegiatan Bimbingan Kebugaran Jasmani dan Bimbingan Rohani</i></li> <li>3. <i>Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Kebugaran Jasmani dan Bimbingan Rohani</i></li> <li>4. <i>Bantuan Sarana Pendukung bagi Lansia Terlantar dan Anak Terlantar yang akan mengikuti Kegiatan Bimbingan Kebugaran Jasmani dan Bimbingan Rohani.</i></li> </ol>		



5. Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan Lanjutan terhadap Lansia Terlantar dan Anak Terlantar yang mengikuti kegiatan Bimbingan Jasmani dan Bimbingan Rohani




Arosuka, 3 Juni 2024  
Kepala Dinas Sosial

**MULIADI MARCOS, S.E, M.M**  
NIP. 19720303 199202 1 001

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER</b> <b>( GENDER BUDGET STATEMENT )</b>	
<b>SKPD</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok</b>
<b>ALAMAT</b>	Arosuka
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	2025
<b>PROGRAM</b>	PENDAFTARAN PENDUDUK
<b>KODE PROGRAM</b>	2.12.02.
<b>KEGIATAN</b>	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
<b>SUB KEGIATAN</b>	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
<b>HASIL/OUTPUT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online untuk 14 Kecamatan</li> <li>2. Terlaksananya pelayanan langsung di Nagari-nagari dengan menggunakan mobil pelayanan disdukcapil ( Inovasi marawa) serta layanan predator untuk kaum marginal ( Lansia, ODGJ, Disabilitas dan Orang sakit)</li> <li>3. Tersedianya sarana dan prasana lengkap yang memenuhi standar pelayanan publik</li> <li>4. Terlaksananya Bimbingan teknis peningkatan kompetensi SDM untuk pelayanan publik</li> </ol>
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi kependudukan 190 orang per hari terdiri dari 100 orang pelayanan langsung, 90 orang pelayanan online.</li> <li>2. Jumlah yang melakukan pelayanan langsung 100 orang / hari terdiri dari Perempuan 70 orang dan laki-laki 30 orang.</li> <li>3. Jumlah loket pelayanan langsung 3 loket, 1 petugas perempuan dan 2 petugas laki-laki.</li> <li>4. Jumlah petugas online 2 operator marawa dan 3 operator marawa nagari.</li> </ol> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>Akses :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasnya wilayah Kabupaten solok yang terdiri dari 74 Nagari dimana sebagian besar nagari terletak dilokasi yang jauh dari Pusat layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.</li> <li>- Terdapat beberapa wilayah yang tidak terjangkau akses internet.</li> <li>- Sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang representatif dalam menunjang pelayanan Publik.</li> </ul> <p><b>Partisipasi :</b>                      Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan fasilitas pengurusan administrasi kependudukan secara online sehingga masih terdapat penumpukan antrian di loket pelayanan langsung Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Solok</p> <p><b>Kontrol :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya perhatian para pengambil kebijakan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik terutama menyangkut pengarusutamaan gender</li> </ul>

	<p><b>Manfaat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh lapisan masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa harus datang ke disdukcapil Kab. Solok dan tidak mengganggu aktifitas hariannya tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama dan lebih hemat dari segi waktu dan biaya</li> <li>Meningkatnya kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil</li> </ul> <p><b>a. Penyebab Internal :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah masyarakat dan dokumen yang akan di proses.</li> <li>Sarana dan prasarana penunjang yang tersedia masih kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.</li> <li>Kurangnya SDM dari segi kualitas dan kuantitas yang dapat memberikan pelayanan maksimal ke seluruh lapisan masyarakat.</li> </ol> <p><b>b. Penyebab Eksternal :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan.</li> <li>Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online.</li> <li>Banyaknya nagari yang lokasinya jauh dari pusat layanan disdukcapil Kab. Solok.</li> </ol>		
<b>PERENCANAAN KEGIATAN</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Tujuan</b>	Tersedianya kemudahan dan kenyamanan bagi semua lapisan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan baik secara online maupun pelayanan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<b>Aktifitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online kepada seluruh lapisan masyarakat untuk 74 Nagari</li> <li>Melakukan pelayanan langsung jemput bola ke nagari-nagari atau kecamatan di seluruh wilayah Kab. Solok ( SIJARLA) serta terlaksananya inovasi predator ( perekaman dengan motor) khusus untuk kaum marjinal ( Lansia, ODGJ, Disabilitas dan Orang sakit)</li> <li>Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang lengkap demi kenyamanan seluruh lapisan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan</li> <li>Meningkatkan kompetensi SDM melalui Bimtek tentang standar pelayanan Publik</li> </ul>



		<b>Sumber Daya ( Out Put )</b>	Dana : Rp. 814.641.500,-
			Panitia : DISDUKCAPIL
			Peserta : Perangkat Nagari, Perwakilan Masyarakat, Camat, Kepala OPD, KUA, Puskesmas, dan Pengadilan Agama
			Sarana Prasarana : ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer, Konsumsi, Honor narasumber. Sarana Prasarana : ruang tunggu, area parkir, area bermain anak, toilet, dan ruang laktasi.
		<b>Out Come</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rumusan kinerja</b></li> <li>- Meningkatnya jumlah pelayanan secara online sehingga mengurangi daftar antrian di loket pelayanan offline</li> <li>- meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan</li> <li>- Terciptanya kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan ( Indeks Kepuasan Masyarakat)</li> <li>- meningkatnya kualitas pelayanan disdukcapil ( Indeks Kepuasan Masyarakat)</li> </ul> <p><b>Indikator Kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan online meningkat sebanyak 20%</li> <li>- Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap demi menunjang kenyamanan penduduk dalam melakukan pengurusan administrasi kependudukan di pusat layanan</li> </ul>
	<b>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Solok</b>  <b><u>RICKY CARNOVA, S. STP,MM</u></b> <b>Nip. 19810618 200112 1 002</b>		

# Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROGRAM : PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	Indikator Kinerja
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	
Program : PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil rata-rata 130 orang/hari, terdiri dari :	Akses : Luasnya wilayah Kabupaten Solok yang terdiri dari 74 Nagari dimana sebagian besar nagari terletak dilokasi yang jauh dari Pusat layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah masyarakat dan dokumen yang akan di proses	Masih Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan	Memberikan kenyamanan kepada Seluruh lapisan Masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan baik secara online maupun pelayanan langsung	Perlu diadakan sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online kepada seluruh lapisan masyarakat untuk 74 Nagari	Jumlah nagari di Kabupaten Solok 74 nagari yang sebagian besar wilayahnya jauh dari pusat pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Arosuka	1. Sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online untuk 14 Kecamatan
Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. 100 orang yang melakukan pelayanan langsung ke Disdukcapil  2. 90 Orang yang melakukan pelayanan secara online	Terdapat beberapa wilayah yang susah akses internet seperti : Nagari pantiyan, Nagari Serlak alahan tiga, Nagari garabak data, Nagari Sumito, Nagari Ma Batumbaak, Nagari Ala luo, Nagari sungai abu	Sarana dan prasarana penunjang yang tersedia masih kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang lengkap demi kenyamanan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan	Melakukan pelayanan langsung jemput bola ke nagari-nagari atau kecamatan di seluruh wilayah Kab. Solok	Jumlah pelayanan yang dilakukan setiap hari sebanyak 130 orang dengan total dokumen kurang lebih 400 layanan per hari	Output : Terlaksananya sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online untuk 14 kecamatan di Kab. Solok
Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rata-rata jumlah dokumen yang diberikan setiap bulannya adalah 8.500 dokumen		Kurangnya SDM dari segi kualitas dan kuantitas yang dapat memberikan pelayanan maksimal ke seluruh lapisan masyarakat		Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai demi menunjang pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat	Pemberian informasi melalui media cetak dan media komunikasi		

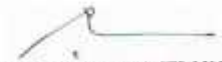
LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBUJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	Indikator Kinerja
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	
<b>Tujuan :</b>  Tersedianya kemudahan dan kenyamanan bagi semua lapisan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan baik secara online maupun pelayanan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Untuk mengurus administrasi secara langsung didominasi oleh perempuan sekitar 70 % ( 100 orang). Dan laki-laki 30 % ( 30 orang)	sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang representatif untuk menunjang pelayanan Publik  <b>Partisipasi :</b>  Kurang nya partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan fasilitas pengurusan administrasi kependudukan secara online sehingga masih terdapat penumpukan antrian di loket pelayanan langsung Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Kurang nya sarana informasi baik cetak maupun elektronik  Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor.	Banyaknya nagari yang lokasinya jauh dari pusat layanan disudut Kab. Solok		Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memenuhi standar pelayanan publik  Meningkatkan kompetensi SDM melalui Bimtek tentang standar pelayanan Publik  Perlu adanya penambahan jumlah SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang menunjang kelancaran pelayanan Publik  Perlu dilaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait	Jumlah operator pelayanan 3 orang operator online, 3 orang operator offline	Outcome : meningkatkan jumlah pelayanan secara online sehingga mengurangi daftar antrian di loket pelayanan offline  2 Melakukan pelayanan langsung jemput bola ke nagari-nagari atau kecamatan di seluruh wilayah Kab. Solok ( SUARLA) serta layanan predator untuk kelompok marginal ( disabilitas, lansia, ODGJ, orang sakit)  Input : Rp. 438.237.000,-  Output : Tertakannya pelayanan langsung di Nagari-nagari dengan menggunakan mobil pelayanan disudutapi
	Jumlah layanan kependudukan yang di proses setiap hari lebih kurang 400 layanan/hari							
	Jumlah loket dan petugas pelayanan terdiri dari : Front office 5 orang							
	loket pelayanan offline 3 loket ( 2 loket umum, 1 loket khusus untuk kelompok rentan )							
	loket pelayanan Online 3 loket Petugas verifikasi dokumen online dan offline 2 orang	<b>Kontrol :</b> Kurang nya perhatian para pengambil kebijakan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik terutama menyangkut pengarusutamaan gender						
	Luasnya wilayah Kabupaten solok yang terdiri dari 74 Nagari dimana sebagian besar nagari terletak di lokasi yang jauh dari Pusat layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.							



LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	Indikator Kinerja
	<p>Terdapat beberapa wilayah yang susah akses internet seperti : Nagari pasilihan, Nagari Sariak alahan tiga, Nagari garabak beta, Nagari Sumiso, Nagari Aia Batumbaak, Nagari Aia Ius, Nagari sungai abu</p> <p>Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik</p> <p>Permendagri No. 19 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik</p>	<p><b>Manfaat :</b> Seluruh lapisan masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa harus datang ke disdukcapil Kab. Solok dan tidak mengganggu aktifitas harrannya tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama dan lebih hemat dari segi waktu dan biaya</p> <p><b>2</b> Meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil</p>						<p>Outcome : meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan</p> <p><b>3</b> Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memenuhi standar pelayanan publik</p> <p>Input : Rp 319,254.500,- <b>Output :</b> Tersedianya sarana dan prasana lengkap yang memenuhi standar pelayanan publik</p> <p>Outcome : Terciptanya kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguntutan administrasi kependudukan</p> <p><b>4</b> Meningkatkan kompetensi SDM melalui Bimtek tentang standar pelayanan Publik</p> <p>Input : Rp. 28.570.000,-</p>

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
		ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
Nama kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	Indikator Kinerja
								Output : Terlaksananya Simbingan teknis peningkatan kompetensi SDM untuk pelayanan publik  Outcome : meningkatnya kualitas pelayanan disdukcapil

Arosuka, Juni 2024  
 Kepala Dinas Kependudukan  
 dan pencatatan Sipil,



RICKY CARNOVA, S. STP.MM  
 NIP. 19810618 200112 1 002

## ***GENDER ACTION BUDGET (GAB)***

*Gender Action Budget (GAB)* disusun untuk memastikan akses, partisipasi, kontrol, manfaat Sub Kegiatan kepada laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan karakteristik Sub Kegiatan (apakah terkait pelatihan/peningkatan kapasitas, penyusunan kebijakan, layanan, dst).

Penyusunan *Gender Action Budget (GAB)* difokuskan pada "Satuan Sub Kegiatan yang memiliki satuan "orang" atau yang tertera di Kepmendagri 900/1317 disajikan dengan data terpilah".

### **SISTEMATIKA**

#### **A. IDENTITAS OPD**

1. Perangkat Daerah
2. Program
3. Kegiatan
4. Sub Kegiatan
5. Kinerja
6. Indikator
7. Satuan

#### **B. Latar Belakang**

1. Dasar Hukum
2. Gambaran umum (merupakan analisis situasi dengan tahapan seperti penjelasan diatas)

#### **C. Penerima Manfaat**

#### **D. Strategi Mencapai Kinerja**

1. Metode
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

#### **E. Kurun Waktu mencapai keluaran**

#### **F. Biaya yang diperlukan**

### **LANGKAH-LANGKAH**

#### **Langkah 1 : Rumusan Data OPD**

#### **Langkah 2: Analisis kondisi eksisting Sub Kegiatan tersebut (masukan di Gambaran Umum.**

Analisis kondisi eksisting Sub Kegiatan dilakukan dengan menggunakan form dibawah ini sebagai jembatan keledai :

No	Pertanyaan	Hasil Reviu
1	Bagaimana gambaran Sub Kegiatan?	Program: ..... Kegiatan: ..... Sub Kegiatan: ..... Kinerja Sub Kegiatan: ..... Indikator Sub Kegiatan: ..... Satuan: ..... Perangkat Daerah Pelaksana: .....
2	Apa kontribusi Sub Kegiatan ini terhadap Rencana Aksi Lima Tahun yang telah disusun?	Berdasarkan gambaran Sub Kegiatan yang telah dijelaskan pada butir 1, Sub Kegiatan ini berpotensi untuk melaksanakan Rencana Aksi .....



3	<p>Bagaimana kondisi Sub Kegiatan saat ini? Apakah sudah mengarusutamakan gender dari aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses (jika relevan)</li> <li>- Partisipasi (jika relevan)</li> <li>- Kontrol (jika relevan)</li> <li>- Manfaat (jika relevan)</li> </ul> <p>Keterangan: langkah 1 GAP</p>	<p>Saat ini Sub Kegiatan sudah/belum (pilih salah satu) mengarusutamakan gender? Jika Sub Kegiatan belum responsif gender, maka perlu diberikan penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses (jika relevan)</li> <li>- Partisipasi (jika relevan)</li> <li>- Kontrol (jika relevan)</li> <li>- Manfaat (jika relevan)</li> </ul>
4	<p>Apa faktor penyebab/ kendala belum mengarusutamakan gender?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Faktor Internal</li> <li>b. Faktor Eksternal</li> </ul> <p>Keterangan: langkah 2 GAP</p>	<p>Penyebab Sub Kegiatan belum responsif gender:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Faktor Internal (internal SKPD) .....</li> <li>b. Faktor Eksternal (masyarakat) .....</li> </ul>
5	<p>Apa Rencana Aksi yang perlu dilakukan agar Sub Kegiatan menjadi responsif gender?</p> <p>Keterangan: langkah 3 GAP</p>	<p>Rencana Aksi agar Sub Kegiatan menjadi responsif gender:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> </ul>

### Langkah 3 : Menyusun GAB

#### ***GENDER ACTION BUDGET/KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE SUB KEGIATAN TA 20XX***

Perangkat Daerah		
Program		
Kegiatan		
Sub Kegiatan		
Kinerja		
Indikator		
Satuan		
A. Latar Belakang		
1. Dasar Hukum		
2. Gambaran umum (merupakan analisis situasi dengan tahapan seperti penjelasan diatas)		
B. Penerima Manfaat		
C. Strategi Mencapai Kinerja		

1. Metode	
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	
D. Kurun Waktu mencapai keluaran	
E. Biaya yang diperlukan	
<p>Kab/Kota, tanggal/bulan/ tahun  Penanggung Jawab,</p> <p>Ttd dan cap</p> <p>Nama  NIP</p>	

**CONTOH**  
**GENDER ACTION BUDGET/KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE**  
**SUB KEGIATAN TA 20XX**

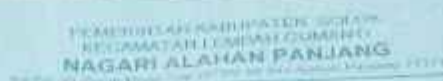
Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan KB
Program	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan	2.08.02.2.01. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	2.08.02.2.01.006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
Kinerja	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kab/ kota
Indikator	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG
Satuan	50 orang
F. Latar Belakang	
1. Dasar Hukum	1. Inpres 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional 2. Permendagri nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender DAlam Pembangunan Daerah 3. Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas

	<p>Permendagri nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah</p> <p>4. Perda PUG di Kabupaten.....</p> <p>5. Peraturan Bupati Nomor .....</p>
<p>2. Gambaran umum (merupakan analisis situasi dengan tahapan seperti penjelasan diatas)</p>	<p>Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai <b>kesetaraan dan keadilan</b> gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.</p> <p>Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Hal ini dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Menurut World Economic Forum (WEF) dalam <i>Global Gender Gap Report 2022</i>, Indonesia mendapat skor indeks ketimpangan gender 0,697 (meningkat 0,009 dari 0,688 pada tahun sebelumnya) dan berada di peringkat ke-92 dari 146 negara (meningkat dari posisi 101 pada tahun sebelumnya). Indeks ketimpangan gender WEF memiliki sistem skor dengan rentang skala 0-1. Skor "0" menunjukkan ketimpangan gender yang sangat lebar, dan skor "1" menunjukkan tercapainya kesetaraan penuh.</p> <p>Walaupun terus menunjukkan tren perbaikan, Indeks Ketimpangan Gender Indonesia masih belum memuaskan. Untuk terus mendorong upaya perbaikan ini, dalam RPJMN 2020-2024, agenda pengarusutamaan gender ditetapkan sebagai salah satu strategi pembangunan nasional yang inovatif dan adaptif. Program pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan nasional tidak hanya mencapai dampak ekonomi, tetapi juga memberikan akses pembangunan yang adil dan merata.</p> <p>OPD didaerah diharapkan mampu memastikan bahwa program pengarusutamaan gender dilaksanakan secara efisien, efektif, dan berdampak. OPD harus mampu melakukan perencanaan pengawasan yang memperhatikan sifat permasalahan gender yang unik dan rumit, sehingga upaya pengawasan dapat secara efektif mengukur keberhasilan program pemerintah dalam menanggulangi ketimpangan gender yang ada. Untuk menjawab hal tersebut maka Sub kegiatan ini</p>



	dilaksanakan	
G. Penerima Manfaat	50 orang berasal dari organisasi kemasyarakatan, LSM, Perguruan tinggi dan OPD. Laki-laki 50% perempuan 50%	
H. Strategi Mencapai Kinerja		
1. Metode	Metode yang digunakan swakelola dengan tata acara adalah ceramah, tanya jawab role playing, diskusi terfokus penyelesaian kasus, dan diselingi dengan ice breaking.	
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	Tahapan yang dilakukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi menentukan nara sumber dan peserta</li> <li>• Persiapan pelaksanaan kegiatan meliputi tempat dan segala keperluan kegiatan</li> <li>• Pelaksanaan kegiatan</li> <li>• Monitoring dan evaluasi</li> </ul>	
I. Kurun Waktu mencapai keluaran	Sub-kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 bulan	
J. Biaya yang diperlukan	Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)	
<div style="text-align: right;">           Kab/Kota, tanggal/bulan/ tahun            Penanggung Jawab,             Ttd dan cap             Nama            NIP         </div>		





BUKLAH KURANG MAMPU

[illegible][illegible]

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir / Umur	Alamat Kelahiran
1.	Rahmi	Perempuan	01.05.1997	2019

[illegible]

Reg. No. 242/2017/CPK-2017  
Tanggal 22.05.2017





Alahan Panjang, 20 Mei 2024

Rekomendasi  
Penggunaan BPJS

Kepada Yth.  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK  
Di  
Arusuka

Dengan ini saya sampaikan Rekomendasi untuk pengundian ulang administrasi Kurang Mampu sebagai salah satu syarat untuk pengundian BPJS yang diberikan kepada:

Nama	VULFAL
NIR	1302041007390003
Tempat, Tgl Lahir	Alahan Panjang 10-07-1930
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Pekerjaan	Petani/Pekelahan
Alamat	Jl. Panmura
	Alahan Panjang
	Kecamatan
	Kabupaten Solok

Berdasarkan keterangan orang yang namanya tersebut diatas dan Menurut pengamatan kami di lapangan bahwa yang bersangkutan adalah termasuk Keluarga Kurang Mampu / Prasejahtera yang memiliki Tanggungan Sebagai Berikut:

No	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir / Umur	Hubungan Keluarga
1	Karni	Perempuan	10-09-1937	Isten

Surat ini dikeluarkan untuk Pengurusan KARTU BPJS Pada Kantor BPJS Kabupaten Solok sebagaimana Kartu Keluarga (KK) Terlampir.

Demiikianlah Rekomendasi ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya oleh yang bersangkutan.



Kepala Jorong Alahan Panjang

SEPTI HANDRI

PROVINSI SUMATERA BARAT  
KABUPATEN SOLOK

IK : 1302045009370001

nama : KARTINI  
tempat/Tgl Lahir : ALAHAN PANJANG, 10-09-1937  
jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
alamat : JALAN PATIMURA JORONG  
ALAHAN PANJANG  
RT/RW : 000/000  
Kel/Desa : ALAHAN PANJANG  
Kecamatan : LEMBAH GUMANTI  
agama : ISLAM  
status Perkawinan : KAWIN  
pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
kewarganegaraan : WNI  
umur : SEUMUR HIDUP



SOLOK  
04-05-2015

*[Handwritten signature]*





PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok
ALAMAT	Arosuka
TAHUN ANGGARAN	2025
PROGRAM	PENDAFTARAN PENDUDUK
KODE PROGRAM	2.12.02.
KEGIATAN	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
SUB KEGIATAN	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
HASIL/OUTPUT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terlaksananya Sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online untuk 14 Kecamatan</li><li>2. Terlaksananya pelayanan langsung di Nagari-nagari dengan menggunakan mobil pelayanan disdukcapil ( Inovasi marawa) serta layanan predator untuk kaum marginal ( Lansia, ODGJ, Disabilitas dan Orang sakit)</li><li>3. Tersedianya sarana dan prasana lengkap yang memenuhi standar pelayanan publik</li><li>4. Terlaksananya Bimbingan teknis peningkatan kompetensi SDM untuk pelayanan publik</li></ol>
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi kependudukan 190 orang per hari terdiri dari 100 orang pelayanan langsung, 90 orang pelayanan online.</li><li>2. Jumlah yang melakukan pelayanan langsung 100 orang / hari terdiri dari Perempuan 70 orang dan laki-laki 30 orang.</li><li>3. Jumlah loket pelayanan langsung 3 loket, 1 petugas perempuan dan 2 petugas laki-laki.</li><li>4. Jumlah petugas online 2 operator marawa dan 3 operator marawa nagari.</li></ol> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p><b>Akses :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luasnya wilayah Kabupaten solok yang terdiri dari 74 Nagari dimana sebagian besar nagari terletak dilokasi yang jauh dari Pusat layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.</li><li>- Terdapat beberapa wilayah yang tidak terjangkau akses internet.</li><li>- Sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang representatif dalam menunjang pelayanan Publik.</li></ul> <p><b>Partisipasi :</b></p> <p>Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan fasilitas pengurusan administrasi kependudukan secara online sehingga masih terdapat penumpukan antrian di loket pelayanan langsung Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Solok</p> <p><b>Kontrol :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya perhatian para pengambil kebijakan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik terutama menyangkut pengarusutamaan gender</li></ul>

	<p><b>Manfaat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh lapisan masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa harus datang ke disdukcapil Kab. Solok dan tidak mengganggu aktifitas hariannya tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama dan lebih hemat dari segi waktu dan biaya</li> <li>- Meningkatnya kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil</li> </ul> <p><b>a. Penyebab Internal :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah masyarakat dan dokumen yang akan di proses.</li> <li>2. Sarana dan prasarana penunjang yang tersedia masih kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.</li> <li>3. Kurangnya SDM dari segi kualitas dan kuantitas yang dapat memberikan pelayanan maksimal ke seluruh lapisan masyarakat.</li> </ol> <p><b>b. Penyebab Eksternal :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan.</li> <li>2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online.</li> <li>3. Banyaknya nagari yang lokasinya jauh dari pusat layanan disdukcapil Kab. Solok.</li> </ol>		
<b>PERENCANAAN KEGIATAN</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Tujuan</b>	Tersedianya kemudahan dan kenyamanan bagi semua lapisan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan baik secara online maupun pelayanan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<b>Aktifitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online kepada seluruh lapisan masyarakat untuk 74 Nagari</li> <li>- Melakukan pelayanan langsung jemput bola ke nagari-nagari atau kecamatan di seluruh wilayah Kab. Solok ( SIJARLA) serta terlaksananya inovasi predator ( perekaman dengan motor) khusus untuk kaum marjinal ( Lansia, ODGJ, Disabilitas dan Orang sakit)</li> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang lengkap demi nyaman seluruh lapisan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan</li> <li>- Meningkatkan kompetensi SDM melalui Bimtek tentang standar pelayanan Publik</li> </ul>
		<b>Sumber Daya ( Out Put )</b>	Dana : Rp. 814.641.500,-
			Panitia : DISDUKCAPIL
			Peserta : Perangkat Nagari, Perwakilan Masyarakat, Camat, Kepala OPD, KUA, Puskesmas, dan Pengadilan Agama

			<p>Sarana Prasarana : ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer, Konsumsi, Honor narasumber. Sarana Prasarana : ruang tunggu, area parkir, area bermain anak, toilet, dan ruang laktasi.</p>
		<b>Out Come</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rumusan kinerja</b></li> <li>- Meningkatnya jumlah pelayanan secara online sehingga mengurangi daftar antrian di loket pelayanan offline</li> <li>- meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan</li> <li>- Terciptanya kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan ( Indeks Kepuasan Masyarakat)</li> <li>- meningkatnya kualitas pelayanan disdukcapil ( Indeks Kepuasan Masyarakat)</li> </ul> <p><b>Indikator Kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan online meningkat sebanyak 20%</li> <li>- Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap demi menunjang kenyamanan penduduk dalam melakukan pengurusan administrasi kependudukan di pusat layanan</li> </ul>
	<p><b>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Solok</b></p> <div style="text-align: center;">  <p><b><u>RICKY CARNOVA, S. STP,MM</u></b>  <b>Nip. 19810618 200112 1 002</b></p> </div>		



# MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROGRAM : PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBUJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	Indikator Kinerja
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	
<p><b>Program :</b> PENDAFTARAN PENDUDUK</p> <p><b>Kegiatan :</b> Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b> Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p>	<p>Jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil rata-rata 130 orang/ hari, terdiri dari :</p> <p>1. 100 orang yang melakukan pelayanan langsung ke Disdukcapil</p> <p>2. 30 Orang yang melakukan pelayanan secara online</p> <p>Jumlah Penduduk Kabupaten Solok 408.424 jiwa</p> <p>Bata-rata jumlah dokumen yang diterbitkan setiap bulannya adalah 8.500 dokumen</p>	<p><b>Akses :</b> Luasnya wilayah Kabupaten Solok yang terdiri dari 74 Nagari dimana sebagian besar nagari terletak dilokasi yang jauh dari Pusat layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Terdapat beberapa wilayah yang susah akses internet seperti : Nagari pasilihan, Nagari Sarlak alahan tigo, Nagari garabak data, Nagari Sumiso, Nagari Ala Batumbuak, Nagari Ala Iuo, Nagari Sungai abu</p>	<p>Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan jumlah masyarakat dan dokumen yang akan di proses</p> <p>Sarana dan prasarana penunjang yang tersedia masih kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas</p> <p>Kurangnya SDM dari segi kualitas dan kuantitas yang dapat memberikan pelayanan maksimal ke seluruh lapisan masyarakat</p>	<p>Masih Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan</p> <p>Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online</p>	<p>Memberikan kenyamanan kepada Seluruh lapisan Masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan baik secara online maupun pelayanan langsung</p> <p>Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang lengkap demi kenyamanan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan</p> <p>Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai demi menunjang pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat</p>	<p>Perlu diadakan sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online kepada seluruh lapisan masyarakat untuk 74 Nagari</p> <p>Melakukan pelayanan langsung jemput bola ke nagari-nagari atau kecamatan di seluruh wilayah Kab. Solok</p> <p>Pemberian informasi melalui media cetak dan media komunikasi</p>	<p>Jumlah nagari di Kabupaten Solok 74 nagari yang sebagian besar wilayahnya jauh dari pusat pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Arosuka.</p> <p>Jumlah pelayanan yang dilakukan setiap hari sebanyak 130 orang dengan total dokumen kurang lebih 400 layanan per hari</p>	<p>1. Sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online untuk 14 Kecamatan</p> <p>Input : Rp. 28.570.000,-</p> <p>Output : Terlaksananya sosialisasi mengenai tata cara pengurusan dokumen kependudukan secara online untuk 14 kecamatan di Kab. Solok</p>

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	Indikator Kinerja
<b>Tujuan :</b>  Tersedianya kemudahan dan kenyamanan bagi semua lapisan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan baik secara online maupun pelayanan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk pengurusan administrasi secara langsung didominasi oleh perempuan sekitar 70 % ( 100 orang). Dan laki-laki 30 % ( 30 orang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang representatif untuk penunjang pelayanan Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya sarana informasi baik cetak maupun elektronik</li> </ul>	Banyaknya nagari yang lokasinya jauh dari pusat layanan disdukcapil Kab. Solok		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memenuhi standar pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah operator pelayanan 3 orang operator online, 3 orang operator offline</li> </ul>	Outcome : meningkatkan jumlah pelayanan secara online sehingga mengurangi daftar antrian di loket pelayanan offline
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah layanan kependudukan yang di proses setiap hari lebih kurang 400 layanan/hari</li> <li>Jumlah loket dan petugas pelayanan terdiri dari : Front office 5 orang</li> <li>loket pelayanan offline 3 loket ( 2 loket umum, 1 loket khusus untuk kelompok rentan )</li> <li>loket pelayanan Online 3 loket</li> <li>Petugas verifikasi dokumen online dan offline 2 orang</li> <li>Luasnya wilayah Kabupaten solok yang terdiri dari 74 Nagari dimana sebagian besar nagari terletak di lokasi yang jauh dari Pusat layanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi : Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan fasilitas pengurusan administrasi kependudukan secara online sehingga masih terdapat penumpukan antrian di loket pelayanan langsung Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.</li> <li>Kontrol : Kurangnya perhatian para pengambil kebijakan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik terutama menyangkut pengarusutamaan gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kompetensi SDM melalui Bimtek tentang standar pelayanan Publik</li> <li>Perlu adanya penambahan jumlah SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang menunjang kelancaran pelayanan Publik</li> <li>Perlu dilaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul> Melakukan pelayanan langsung jemput bola ke nagari-nagari atau kecamatan di seluruh wilayah Kab. Solok ( SIARLA) serta layanan predator untuk kelompok marginal ( disabilitas, lansia, ODGJ, orang sakit)	Input : Rp. 438.237.000,-  Output : Terlaksananya pelayanan langsung di Nagari-nagari dengan menggunakan mobil pelayanan disdukcapil

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (base line)	Indikator Kinerja
	<p>Terdapat beberapa wilayah yang susah akses internet seperti : Nagari pasilihan, Nagari Sariak alahan tigo, Nagari garabak data, Nagari Sumiso, Nagari Ala Batumbuak, Nagari Aia Iuo, Nagari sungai abu</p> <p>Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik</p>	<p><b>Manfaat :</b> Seluruh lapisan masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa harus datang ke disdukcapil Kab. Solok dan tidak mengganggu aktifitas hariannya tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama dan lebih hemat dari segi waktu dan biaya</p>						<p>Outcome : meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan</p>
	<p>Permendagri No. 19 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik</p>	<p>2. Meningkatnya kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil</p>						<p>3. Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memenuhi standar pelayanan publik</p> <p>Input : Rp. 319.264.500,-</p> <p>Output : Tersedianya sarana dan prasana lengkap yang memenuhi standar pelayanan publik</p> <p>Outcome : Terciptanya kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan</p>



LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Nama kebijakan / Program / Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBUJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data: (base line)	Indikator Kinerja
								4. Meningkatkan kompetensi SDM melalui bimtek tentang standar pelayanan Publik  Input : Rp. 28.570.000,-
								Output : Terlaksananya Bimbingan teknis peningkatan kompetensi SDM untuk pelayanan publik  Outcome : meningkatnya kualitas pelayanan di dukrajil

Arosuka, Juni 2024

Ka Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil,



RICKY CARNOVA, S. STP, MM

NIP. 19810618 200112 1 002

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK**

NO.	ASPEK	URAIAN
1.	Program Kegiatan Subkegiatan	Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
2.	Output Subkegiatan	<b>UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kab. Solok</b> Tersedianya gedung pustaka sekolah yang layak dan nyaman dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran siswa terhadap pentingnya ilmu pengetahuan.
3.	Analisis Situasi	<p>1. Kondisi sekarang perpustakaan sejumlah sekolah dari segi struktur sudah tidak layak pakai, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung pustaka.</p> <p>2. Kondisi Pustaka Sekolah yang belum ada di beberapa satuan pendidikan SD, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung pustaka.</p> <p><b>Data Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 364 SD</li> <li>- Jumlah peserta didik SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 44.934 orang</li> <li>- Jumlah guru SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 3.903 orang</li> </ul> <p><b>Akses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah gedung perpustakaan SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 314 unit.</li> <li>- Kondisi perpustakaan SD yang belum ada di Kabupaten Solok saat ini adalah 33 unit.</li> </ul> <p><b>Partisipasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Peserta SD laki-laki 23.255 orang dan perempuan 21.682 orang</li> </ul> <p><b>Kontrol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru SD laki-laki 735 orang dan Perempuan 3.168 orang</li> </ul>

		<b>Manfaat</b> - Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka baik laki-laki maupun perempuan sehingga kebiasaan membaca di kalangan peserta didik baik laki-laki maupun perempuan menjadi meningkat. Selain itu, dalam rangka pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, maka diperlukan ruang perpustakaan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa mengenai literasi membaca, numerasi, sains, TIK, finansial, serta budaya dan kewargaan/ kemasyarakatan	
4	<b>Rencana Aksi</b>	Komponen input 1	Menyediakan fasilitas pustaka dan pendukung kenyamanan dalam perpustakaan  <b>Output:</b> Persentase Bangunan Pustaka yang sesuai Standar Nasional Pendidikan  <b>Anggaran:</b> Rp. 3.344.547.440,-
5.	<b>Alokasi Anggaran Output Subkegiatan</b>	- Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan SD sebesar Rp. 3.344.547.440,-	
6.	<b>Dampak/ Hasil Output Subkegiatan</b>	1. Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka 2. Membudayanya perilaku suka membaca di kalangan peserta didik 3. Meningkatnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Peserta Didik	

Arosuka, Januari 2024  
 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok



**ZAINAL JUSMAR, S.Pd, MM, M.Si**  
 Pembina Tk. I/ IV.B  
 NIP. 19730516 199903 1004



## MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

**OPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SOLOK**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<b>Program :</b> Program Pengelolaan Pendidikan  <b>Kegiatan :</b> Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  <b>Subkegiatan :</b> Pembangunan Perpustakaan Sekolah  <b>Tujuan :</b> Tersedianya gedung pustaka sekolah layak dan nyaman dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran siswa terhadap pentingnya ilmu pengetahuan  <b>Indikator Kinerja :</b> Tersedianya bangunan Pustaka yang permanen, standar, nyaman, representatif, dan layak pakai. Tercapainya Indikator	- Dasar regulasi sub kegiatan pembangunan perpustakaan sekolah, yaitu: Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa terdapat 6 standard nasional perpustakaan, yaitu: standard koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, an standard pengelolaan.	- Kondisi Pustaka Sekolah yang sudah tidak layak pakai, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung pustaka  Akses - Ketidaklayakan kondisi pustaka dan kantin menyulitkan peserta didik khususnya yang perempuan mendapatkan ruang dan waktu yang nyaman saat menggunakan pustaka  Partisipasi - Jumlah siswa lelaki lebih	- Kondisi bangunan pustaka sekolah lain rata-rata belum representatif dan memerlukan kesegeraan penanganan yang sama - Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk memperbaiki bangunan pustaka sekolah lain	- Masih kurangnya lama kunjungan siswa ke pustaka - Koleksi perpustakaan masih kurang lengkap - Lahan ada namun terbatas	Tersedianya gedung pustaka sekolah yang layak dan nyaman dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran siswa terhadap pentingnya ilmu pengetahuan yang berbasis responsif gender	- Menyediakan buku koleksi perpustakaan yang lebih lengkap - Menyediakan fasilitas pendukung kenyamanan dalam perpustakaan - Memfokuskan anggaran untuk perbaikan bangunan pustaka agar sesuai standar nasional	<b>Bangunan Pustaka sekolah yang belum ada:</b>  - bangunan	<b>Output :</b> Rumusan Kinerja : - Bangunan Pustaka yang sesuai Standar Nasional Pendidikan  <b>Indikator Kinerja :</b> - Tersedianya bangunan Pustaka yang sesuai Standar Nasional Pendidikan  <b>Outcome :</b> Rumusan Kinerja : - Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka - Membudayanya perilaku suka membaca di kalangan peserta didik

<p>Kinerja diharapkan berdampak pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka baik laki-laki maupun perempuan</li> <li>2. Meningkatnya kebiasaan membaca di kalangan peserta didik baik laki-laki maupun perempuan</li> </ol>	<p>Selain itu, dalam sekolah diminta untuk: memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik; mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan; mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.</p>	<p>banyak dibanding siswa perempuan</p> <p>Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Representatif perempuan sebagai pengambil keputusan lebih besar karena berperan sebagai kepala sekolah Proporsi Guru yang didominasi oleh perempuan</li> </ul> <p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siswa perempuan dan lelaki tidak mendapatkan manfaat yang maksimal saat menggunakan Pustaka</li> </ul>						<p><b>Indikator Kinerja :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kunjungan peserta didik ke pustaka setiap harinya</li> <li>- Budaya perilaku suka membaca dan lama kunjungan peserta didik ke pustaka</li> </ul> <p><b>Anggaran :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Rp. 3.344.547,40</li> </ul>
--	--	---	--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar penganggaran kegiatan, yaitu Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2025 dalam rangka mencapai tujuan strategis untuk menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan merata.</li> <li>- Kondisi sekarang Pustaka sejumlah sekolah dari segi struktur sudah tidak layak pakai, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung pustaka.</li> </ul> <p><b>Data Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 364 SD</li> <li>- Jumlah peserta didik SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 44.934 orang</li> <li>- Jumlah guru SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 3.903 orang</li> </ul>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



	<p><b>Akses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah gedung perpustakaan SD di Kabupaten Solok saat ini adalah 324 unit.</li> <li>- Kondisi gedung perpustakaan SD yang belum ada di Kabupaten Solok saat ini adalah 33 unit</li> </ul> <p><b>Partisipasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Peserta SD laki-laki 23.255 orang dan perempuan 21.682 orang</li> </ul> <p><b>Kontrol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru 735 laki-laki dan Perempuan SD 3.168 orang</li> </ul> <p><b>Manfaat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kunjungan peserta didik ke pustaka baik laki-laki maupun perempuan sehingga</li> </ul>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	kebiasaan membaca di kalangan peserta didik baik laki-laki maupun perempuan menjadi meningkat. Selain itu, dalam rangka pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, maka diperlukan ruang perpustakaan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa mengenai literasi membaca, numerasi, sains, TIK, finansial, serta budaya dan kewargaan/kemasyarakatan							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Arosuka, Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Solok



**GBS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SOLOK**

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD	: Dinas Perhubungan Kabupaten Solok		
Tahun Anggaran	: 2025		
Program	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
Kode Program	2 15 02 2.06.04		
Kegiatan	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Kinerja Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya sosialisasi PPRG dan PUG oleh Pimpinan, Pengawas dan Pelaksana Kegiatan</li> <li>• Jumlah titik Petugas Pengamanan (PAM) lalulintas di daerah rawan kecelakaan</li> <li>• Jumlah petugas Petugas Pengamanan (PAM) Dinas Perhubungan di Kabupaten Solok</li> </ul>		
Hasil/Output	Terlaksananya PAM lalu lintas di daerah rawan kecelakaan yang berbasis gender.		
Analisis Situasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengguna jalan terutama perempuan seringkali kurang nyaman bila diatur oleh petugas laki – laki, sehingga mereka cenderung menghindari ketika hendak menyeberang.</li> </ul>		
Rencana Aksi	Komponen 1	Tujuan	1. Sosialisasi mengenai PP No 37 Tahun 2017 tentang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Peningkatan Mutu dan Kualitas SDM petugas PAM lalulintas.
		Alokasi Anggaran	Rp.25.000.000,-
	Komponen 2	Tujuan	1. Pengadaan Kelengkapan Pakaian Dinas Keselamatan Petugas PAM Lalu Lintas
		Alokasi Anggaran	Rp. 55.500.000,-
	Total anggaran		Rp. 80.500.000,-
Capaian Program	Output 1. Terlaksananya sosialisasi mengenai keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Peningkatan Mutu dan Kualitas SDM petugas PAM lalin. 3. Tersedianya kelengkapan Pakaian Dinas Keselamatan Petugas PAM Lalulintas		



Indikator Out Come :

1. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas di titik rawan kecelakaan
2. Meningkatnya partisipasi petugas PAM Perempuan di Dinas Perhubungan Kabupaten Solok

Koto Baru, Juni 2024

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Solok,



**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**BINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SOROK**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan Program/Kegiatan	Data Terpilih Masyarakat	ISU GENDER			KURJIKAN DAN KENDANA KURJIPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kewenangan	Salah Kewenangan Internal	Salah Kewenangan Eksternal	Intervensi Tajuk	Relevansi Aksi	Basin Data (Data-Tier)	Indikator Kinerja
Program : Pembangunan Ibu Lahir dan Angkutan Jalan	Data Hutan (D) 10-22 Tahun 2004 hingga 2014 Tahun dan Angkutan Jalan	Akses	Kurang sosialisasi PP No 17 Tahun 2017 tentang Kesejahteraan Ibu Lahir dan Angkutan Jalan	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membaca buku-buku	Peningkatan akses kegiatan ibu lahir	Penyusunan program kegiatan ibu lahir dan Angkutan Jalan dari kegiatan lain melalui media sosial dan sistem informasi kepada masyarakat	Indikator program PAM ibu ( 100% - 100% ) dan pengukuran ( 100% - 100% )	Indikator program ibu ( 100% - 100% ) dan pengukuran ( 100% - 100% )
		Kurangnya program PAM ibu ( 100% - 100% ) dan pengukuran ( 100% - 100% )						Input: Rp 100.000.000
Kegiatan	Data Hutan Terpilih Pemerintah (D) 10-22 Tahun 2004 hingga 2014 Tahun dan Angkutan Jalan		Kurangnya Pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) program PAM ibu terhadap kemajuan dan kegiatan ibu lahir			Peningkatan Kualitas SDM program PAM ibu		Output: Rp 100.000.000
Pengembangan Strategi Pengembangan Kegiatan Lain di Jalan Raya		Partisipasi	Belum semua sumber daya manusia (SDM) program PAM ibu yang bisa diandalkan				Indikator program PAM ibu ( 100% - 100% ) dan pengukuran ( 100% - 100% )	Indikator program ibu ( 100% - 100% ) dan pengukuran ( 100% - 100% )
	Data Program Pengukuran Ibu Lahir ( 100% - 100% ) dan pengukuran ( 100% - 100% )	Kurangnya pengendalian pengukuran ibu lahir	Sumber Daya Manusia Program PAM ibu ( 100% - 100% )			Peningkatan akses dan pengukuran kegiatan ibu lahir		Akses: Rp 100.000.000
Tujuan							Indikator program PAM ibu ( 100% - 100% ) dan pengukuran ( 100% - 100% )	Indikator program ibu ( 100% - 100% ) dan pengukuran ( 100% - 100% )

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kabupaten/Program/Kelembagaan	Data Penduduk Wawancara	SMA GENDER			KUALIFIKASI DAN BENCANA KEDAPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesiapan	Setelah Kesiapan Internal	Setelah Kesiapan Eksternal	Riforasi Tindakan	Kemampuan Aksi	Revisi Data (Bisa/Lain)	Penilaian Akhir
Penyusunan perencanaan tingkat kabupaten/kota untuk aksi nyata	Data kesiapan SMA/PAK/PAK lain yang bekerjasama di dalam wilayah yang ada di Kabupaten Solok	Kontrol	Setelah kesiapan koordinasi dengan mitra sekolah	Kemampuan koordinasi dengan mitra sekolah		Setelah aksi kesiapan dan selanjutnya dengan mitra sekolah		
		Kemampuan pengamatan dari koordinasi dengan PAK/PAK lain yang terlibat					Pemetaan pemetaan nyata, kesiapan aksi nyata (75%)	Pemetaan nyata dan kesiapan SMA/PAK lain yang bekerjasama
	Data kesiapan SMA/PAK lain yang bekerjasama di dalam wilayah							Input: Rp. 10.000.000,-
								Output: Pemetaan dan pemetaan SMA/PAK lain yang bekerjasama
								Diseminasi kesiapan SMA/PAK lain yang bekerjasama
								Output: Diseminasi kesiapan SMA/PAK lain yang bekerjasama
	Penyusunan perencanaan tingkat kabupaten/kota untuk aksi nyata							Output: Diseminasi kesiapan SMA/PAK lain yang bekerjasama





**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2025**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender: Masih tingginya angka kematian Ibu			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Kinerja
<b>Program:</b> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota  Tujuan : Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Solok	Sesuai Peraturan Permenkes Nomor 06 Tahun 2024, tentang Standar Teknis pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Antara lain:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan kesehatan pada ibu hamil 100%</li> <li>Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin 100%</li> <li>Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir 100%</li> </ul>	<b>Akses</b> Masih kurangnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat di daerah terpencil karena keterbatasan tenaga dan transportasi yang belum berdasarkan kondasi geografis Kabupaten Solok  <b>Partisipasi</b> Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penempatan tenaga strategis (dokter dan bidan) yang belum merata terutama di daerah terpencil.</li> <li>Keterbatasan tenaga jumlah tenaga kesehatan (9 jenis tenaga kesehatan)</li> <li>Keterbatasan sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam memberikan pelayanan esensial kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)</li> <li>Pelayanan kesehatan pada ibu dan bayi sesuai standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budaya yang masih susah untuk di rubah tentang perlunya melakukan persalinan di fasyankes sehingga terjadi 3T (Terlambat mengambil keputusan, Terlambat sampai ke fasilitas dan Terlambat Mendapat Penanganan)</li> <li>Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan terutama kesehatan ibu dan bayi sehingga masih terjadi 4 T (Terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 205/100.000 KH menjadi 200/100.000 KH</li> <li>Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 8,35 / 1.000 KH menjadi 8,13 / 1.000 KH</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Analisa terhadap anjalisa jabatan dan Analisa beban kerja serta peta jabatan terhadap tenaga kesehatan</li> <li>Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pemenuhan SDMK sesuai standar di fasilitas kesehatan</li> <li>Menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana dan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan kesehatan pada ibu hamil 84,41% tahun 2021, 97,04% tahun 2022 dan 100% tahun 2023</li> <li>Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin 81,9% tahun 2021, 92,61% tahun 2022, 99,76% tahun 2023</li> <li>Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir 84,64% tahun 2021, 91,59% tahun 2022, 99,84% tahun 2023</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Input: Rp. 20.000.000,- Output: Presentase Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Outcome: Angka Kematian Ibu</li> <li>Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin Sesuai Standar Input: Rp. 50.000.000 Output: Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Ibu bersalin sesuai standar Outcome: Angka Kematian Ibu</li> <li>Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir Sesuai standar Input: Rp. 190.000.000</li> <li>Output: Persentase Pelayanan Kesehatan</li> </ol>

<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standar ketenagaan puskesmas (Tenaga Kesehatan dan tenaga non)</li> <li>Standar bangunan puskesmas, prasarana puskesmas dan peralatan puskesmas</li> </ul> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>Permenkes Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	<p>kesehatan ibu dan bayi (skrining kesehatan sesuai standar.</p> <p><b>Kontrol</b> Masih kurangnya upaya deteksi resiko tinggi dan penanganan komplikasi pada ibu dan bayi</p> <p><b>Manfaat</b> Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan bersalin dapat menurunkan AKI di Kab. Solok</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompetensi tenaga kesehatan (Dokter, Bidan dan Perawat) yang masih kurang terutama tentang Penanganan Obstetri Neonatal Dasar)</li> </ul>	<p>banyak) dan persalinan dengan dukun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan terutama kesehatan ibu sehingga terdapat 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat dan Terlalu Banyak)</li> <li>Masih terdapatnya ibu hamil/bersalin dan bayi tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan</li> <li>Keterbatasan sarana transportasi dan akses jalan di daerah tersulit</li> </ul>	<p>alat kesehatan sesuai standar dan mengalokasikan pengadaan baik melalui APBD maupun DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kesehatan</p> <p>4. Melaksanakan pelayanan kesehatan pada ibu dan bayi sesuai standar</p> <p>5. Meningkatkan upaya promosi kesehatan pada masyarakat</p> <p>6. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui bimbingan teknis dan pelatihan</p> <p>7. Melakukan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait jaminan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar 80%</li> <li>Dokter 1:10.141 Bidan 1:805, Perawat 1:1.489</li> <li>Puskesmas 1:19.749, Puskesmas Pembantu 1:4.414, Tempat Tidur 1:3.506</li> <li>Jumlah dukun aktif 83 orang</li> </ul>	<p>Pada Bayi Baru Lahir Sesuai standar Outcome: Angka Kematian Bayi</p> <p>5. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Input: Rp.250.000.000,- Output: Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan Outcome: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar</p> <p>6. Pemenuhan Kebutuhan SDM Sesuai Standar Input: Rp.700.000.000,- Output: Jumlah SDM yang memenuhi standar di fasyankes Outcome: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar</p> <p>7. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Input: Rp. 345.000.000 Output: Persentase RT yang ber PHBS Outcome: Persentase nagari siaga</p>
--	--	--	---	--	---	--

	Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia  • Dokter 1:2.500, Bidan 1:1.000, Perawat 1:855 • Puskesmas 1:16.000, Puskesmas Pembantu 1:1.500, Tempat Tidur 1:1.000					Kesehatan pada ibu dan bayi dari keluarga kurang mampu		8. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Input: Rp. 9.000.000,- Output: Persentase UHC (Universal Health Coverage Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat
--	---	--	--	--	--	--	--	---

Arosuka, Mei 2024  
 Kepala Dinas Kesehatan Kab. Solor  
  
 ZULHENDRI, SKM. M. Kes  
 NIP. 19660604 198703 1 005



**GENDER BUDGET STATEMEN (GBS)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK  
TAHUN 2025**

ASPEK	URAIAN
Program	<p><b>Program:</b> Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Tujuan : Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB)</p>
Kode Program	Kode Rekening : 1.02.02.2.01
Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota.
Analisis Situasi	<p>Pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan ibu bersalin belum mencapai 100 % Antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka kematian ibu: 148/100.000 KH tahun 2021, 78,85/100.000 KH tahun 2022, 146,32 / 100.000 KH tahun 2023</li> <li>• Pelayanan kesehatan pada ibu hamil 84,41% tahun 2021, 97,04% tahun 2022 dan 100% tahun 2023</li> <li>• Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin 81,9% tahun 2021, 92,61% tahun 2022, 99,76% tahun 202</li> <li>• Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir 84,64% tahun 2021, 91,59% tahun 2022, 99,84% tahun 2023</li> <li>• Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir 84,64% tahun 2021, 91,59% tahun 2022, 99,84% tahun 2023</li> <li>• Dokter 1:10.141 Bidan 1:805, Perawat 1:1.489</li> <li>• Puskesmas 1:19.749, Puskesmas Pembantu 1:4.414, Tempat Tidur 1:3.506</li> <li>• Jumlah dukun aktif 83 orang</li> </ul> <p>Isu Dan Kesenjangan Gender:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Faktor Kesenjangan</b> <p><b>Akses :</b> Masih kurangnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil karena keterbatasan tenaga dan transportasi yang belum memadai berdasarkan keadaan geografis Kabupaten Solok</p> <p><b>Partisipasi</b> Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan bayi (screening kesehatan sesuai standar,</p> <p><b>Kontrol</b> Masih kurangnya upaya deteksi resiko tinggi dan penanganan komplikasi pada ibu dan bayi</p> <p><b>Manfaat</b> Peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dan bersalin dapat menurunkan AKI di Kab. Solok</p> </li> <li>• <b>Penyebab Interna</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penempatan tenaga strategis (dokter dan bidan) yang belum merata terutama di daerah terpencil.</li> <li>➢ Keterbatasan tenaga jumlah tenaga kesehatan (9 jenis tenaga kesehatan)</li> <li>➢ Keterbatasan sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam memberikan pelayanan esensial kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)</li> <li>➢ Pelayanan kesehatan pada ibu dan bayi sesuai standar</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kompetensi tenaga kesehatan (Dokter, Bidan dan Perawat) yang masih kurang terutama tentang Penanganan Obstetri Neonatal Dasar)</li> <li>• <b>Penyebab Eksternal</b></li> <li>➤ Budaya yang masih susah untuk di rubah tentang perlunya melakukan persalinan di fasyankes sehingga terjadi 3T (Terlambat mengambil keputusan, Terlambat sampai ke fasilitas dan Terimbat Mendapat Penanganan)</li> <li>➤ Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan terutama kesehatan ibu dan bayi sehingga masih terjadi 4 T (Terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak) dan persalinan dengan dukun</li> <li>➤ Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan terutama kesehatan ibu sehingga terdapat 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat dan Terlalu Banyak)</li> <li>➤ Masih terdapatnya ibu hamil/bersalin dan bayi tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan</li> <li>➤ Keterbatasan sarana transportasi dan akses jalan di daerah tersulit</li> </ul>	
Capaian Program	<p>1. Tolak Ukur : Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)</p> <p>2. Indikator dan target Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar</li> <li>• Persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar</li> <li>• Persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar</li> <li>• Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar</li> <li>• Persentase nagari Siaga Aktif</li> <li>• Persentase UHC (Universal Healt Coverage)</li> </ul>	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp 10.555.000.000,-	
Rencana Aksi	Komponen input 1	Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Input : Rp. 20.000.000,- Output : Presentase Pelayanan Kesehatan Pada Ibu hamil Sesuai Standar Outcome : Angka Kematian Ibu
	Komponen input 2	Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin Sesuai Standar Input : Rp. 50.000.000 Output : Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Bersalin Sesuai Standar Outcome : Angka Kematian Ibu
	Komponen Input 3	Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Input : Rp. 190.000.00 Output : Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Outcome : Angka Kematian Bayi
	Komponen Input 4	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Input: Rp.250.00.000,- Output: Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan Outcome: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar
	Komponen Input 5	Pemenuhan Kebutuhan SDM Sesuai Standar Input: Rp.700.000.000,- Output: Jumlah SDM yang memenuhi standar di fasyankes Outcome: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar
	Komponen Input 6	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Input: Rp. 345.000.000 Output: Persentase RT yang ber PHBS Outcome: Persentase nagari siaga

	Komponen Input 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Input: Rp. 9.000.000,- Output: Persentase UHC (Universal Health Coverage) Outcome: Indeks Kepuasan Masyarakat
--	---------------------	---

Solosuka, Mei 2024  
Kepala Dinas Kesehatan Kab.Solok  
  
**ZULHENDRI, SKM. M. Kes**  
NIP. 19660604 198703 1 005



**TIM DRIVER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER  
KABUPATEN SOLOK**

Mengetahui:	Tanda Tangan
	1.....
	2.....
	1. ....
	2. ....